



Fundamentalisme Islam Sebagai Ancaman Terhadap Hegemoni Global Amerika Serikat

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
jurusan ilmu Hubungan Internasional
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Arief Fathurrahman
NIM. 010910101241

Dosen Pembimbing:

Drs. M. Nur Hasan, M. Hum
NIP. 131 658 013

Dr. Abubakar Eby Hafa, MA
NIP. 131 833 004

Asal:	Halaman	Klass
	Pembelian	297-911
Terima Tgl :	26 NOV 2005	FAT.
No. Induk		F
KLA IR / PENYALIN :		

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

2005

Lembar Pengesahan

Telah diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Nopember 2005
Pukul : 09.00 WIB

Panitia Penguji,

Ketua Penguji

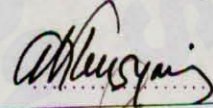

Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
NIP. 130 261 689

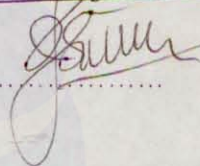
Sekretaris

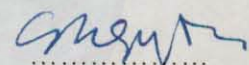

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP. 131 658 013

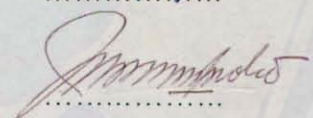
Susunan Panitia Penguji :

1. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA (ketua)
2. Drs. M. Nur Hasan, M.Hum (Pembimbing I / sekretaris)
3. Dr. A. Eby Hara, MA (Pembimbing II)
4. Dr. Sugiyanto, MA (Anggota)
5. Drs. Sunardi P., MIS (Anggota)



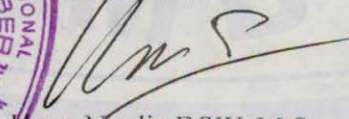








Mengetahui :
Dekan FISIP
Universitas Jember


Dr. El-Lung Nasdia BSW, M.S
NIP. 130 674 836

Halaman Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini kepada.....

*Orang Tuaku..... **Ibnul Yatim, M.AP dan Hindun Syekh Assegaff, S.Pd**
yang tiada hentinya mencintaiku. Semoga Allah SWT meridhoi aku dan
menjadikanku sebagai anak yang berbakti kepada kalian.*

*Adik-adikku Nur Fitria Ramadani, Syarief Fahrurrahman, dan si "anak
kesayangan" Norma Fitalia Rahmi, serta tidak lupa adik iparku Sugiyanto, S.S.*

Almamaterku.....

dan....

*Kepada mereka yang berjuang fiisabilillah melawan neo-imperialisme dan
zionisme*

Perang besar akan tiba dan Jerusalem akan kembali jadi milik kita.....

Allahuakbar!!!!

Motto

*Kita tidak akan mengetahui tentang keberhasilan ataupun kegagalan, kecuali kita telah mencobanya.*¹

*Plan your work and work your plan.*²

*Allah tidak akan memberi cobaan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*³

¹ Hasil renungan dan pengalaman pribadi. Motto yang menjadi pemacu semangat penulis untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Setiap orang bisa mendapatkan keberhasilan maupun kegagalan, tapi tidak semua orang bisa melakukan yang terbaik. Itulah nilai dari sebuah perjuangan.

² Sugar Ray Leonald. Mantan juara tinju dunia ini menginspirasi penulis untuk melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Usaha yang terbaik jelas memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang maksimal.

³ QS Al Baqarah 286. Motto andalan penulis untuk mengingat bahwa ada Dzat Maha Kuasa yang punya rencana atas segala sesuatu. Penulis hanya wajib berusaha, tapi Allah SWT lah yang menentukan. Allah Maha Tahu apa yang terbaik bagi penulis dan penulis yakin Allah SWT pasti akan memberikannya. Keberhasilan ataupun kegagalan sama-sama merupakan cobaan bagi tiap makhlukNya, yang berbeda hanyalah bagaimana "menikmatinya".

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya yang masih memberikan kehidupan kepada penulis dan mengizinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Fundamentalisme Islam Sebagai Ancaman Terhadap Hegemoni Global Amerika Serikat**, sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana strata satu (S1) jurusan ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan segala hormat, penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang juga turut mendukung penulis selama proses studi penulis di Jember, termasuk dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. T. Sutikto, M.Sc, selaku rektor Universitas Jember.
2. Bapak Dr. H. Uung Nasdia BSW, M.S., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Bapak drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku ketua jurusan Hubungan Internasional.
4. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku sekretaris jurusan Hubungan Internasional.
5. Bapak drs. M. Nur Hasan, M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini, serta selalu bersedia "direpotkan" oleh penulis.
6. Bapak Dr. Abubakar Eby Hara, M.A., selaku pembimbing II yang telah membantu penulis dalam memperkokoh *basic* fundamental tulisan ini dan selalu menyediakan waktunya untuk membimbing penulis di tengah padatnya jadwal kesibukan beliau.
7. Bapak drs. Djoko Susilo, M.Si, selaku dosen wali yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dosen di jurusan Hubungan Internasional khususnya, dan di FISIP-Unej umumnya, yang telah banyak mentransfer ilmunya kepada penulis.

9. Tata Usaha FISIP UNEJ, terutama Pak Edi, Mas Bagyo, Mas Zainal, dan Mba' Sri di Jurusan HI.
10. Pangeran-pangeran tampan HI 01 (*horizontally classified*), grup A (Fadli "Nutho", Hans, Rendro "Banjar", Wedar F.C., M. Heru H., Yacob M, Darun "Allo", dan Rahmat), grup B (Hendi P., Suharto, Slamet R., dan Harmoko), grup C (Victor P., Edy W., dan Willy), grup D (Billy, Hadad, Ruliyanto, dan Dwi), grup E (Ustadz Ipul, Fafan, Andi Kurniawan, Suryadi, dan Zainul A.), grup F (Arif H.A, Priyo "Shincan", dan Amirul L.), grup G (Mahdi, Dwi Aji Zainil, dan Oni).
11. Putri cantik HI 01 (*horizontally classified*), grup 1 (Febi, Ana, dan Eka), grup 2 (Lina M., Anik, Pipit, Indit, dan Wahyu), grup 3 (Anggi, Leli, Ida, Nova, Reancy, dan Ruli H.), grup 4 (Ayu, Vina, Dyah A.P., Nia F., Melia A., Bahria, dan Indra), grup 5 (Yela dan Tyas).
12. Seluruh Teman-teman HI yang kenal aku dan atau aku kenal.
13. Teman-teman KKN KXVI Mrawan-Mayang 2004, Arif "Bob", Rio Yoga, H. Heru, Andi H., Ika Dina, Ratna H., Helda S.W., Retno Y., dan Witri W. *Hidup team Socket !!!!*
14. Teman-teman pengurus HIMAHl 2004-.....Phare, Anita, Gre, Tiara, Oneai, Wildan, Wuri, Linda, dan teman-teman lain yang ikut terlibat dalam kepanitiaan berbagai kegiatan HIMAHl.
15. Teman-teman di PMKT-MAHAKAM; Alex. Kris, Ilast, Yulis, Lina, Lilis, Erien, Maria, Suher, Ferdi, Uphi, Ervan, Sarah, Nela, dan tidak lupa Hasta Wulan P.N. Semoga usaha yang dirintis tidak hanya berakhir sampai di sini.
16. Sahabat-sahabat PMII Rayon FISIP, terima kasih telah banyak membantuku "bergerak" dan mengajarkan banyak hal padaku. Aku minta maaf kalau akhirnya aku jadi ga aktif.
17. Teman-teman L.U.F.C., Mas Helmy "Pak Kapten", Rohmen, Anto Bedjo, Huda, Lukman, Supri, Dayat, Abah, Mang Hudan, Edhi, Cahyo, Wawan "Ndut", Arie, Pak Ali, Jacky, Le' Mat, Inul, Azis "Kujay", Deni "Gondrong", Mat Kentung, Harun, Trie, Rahmat, Yayan, Didi, Andi, Masrur, Sugab "Liar & Nakal", Iben "Bringas".

18. Teman-teman mantan kost Jawa VII, Widarto, Rudi, Eky Falah, Iqbal, Affan, dan Bayu.
19. Teman-temanku; Ike, Santi, Anis, serta Kiki, Linggar, Yeni, dan Ifa.
20. Victor P., Suryadi, Edi W., dan Syarif H. Santoso, terimakasih atas pinjaman buku dan diskusinya.
21. Teman-teman diskusi dunia maya di hayatulislam.net, swaramuslim.net, gemapembebasan.or.id, dan A. Fatih Syuhud dari Al Agra University, India. Terimakasih untuk waktu dan masukannya.
22. Operator Warnet Puskom yang sudah cukup sering penulis repotkan terutama dengan disket yang bervirus.
23. Tim Sukses-ku Mirta, Yuli, Ririn, Ida, dan Taurina.....makasih banyak ya!kalian sudah banyak bantu aku, terutama soal "itu".
24. Warga Jawa VII (Bu Topan, Pak Sadin, Mba Yani, Kadi, Tofik, Heri, Mestari, Ipung, dan So) serta warga BTN Mastrip blok Y dan W.
25. Konami Corporation, Namco, dan Capcom yang sudah menciptakan *Winning Eleven*, *Tekken*, dan *Street Fighter* yang ternyata banyak berguna buat penulis.
26. Linkin Park, Muse, Good Charlotte, Sum 41, Greenday, dan Peterpan yang seringkali mengiringi khayal dan lamunanku serta terkadang malah jadi *soundtrack*-ku.
27. Melati Anggraini.....tidak cukup kata untuk sekadar berterimakasih padamu. Terima kasih atas semuanya dan selama ini.

Meskipun demikian, penulis sadar tulisan ini masih banyak kelemahan. Namun penulis berharap tulisan sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Jember, Nopember 2005

A.F.R.

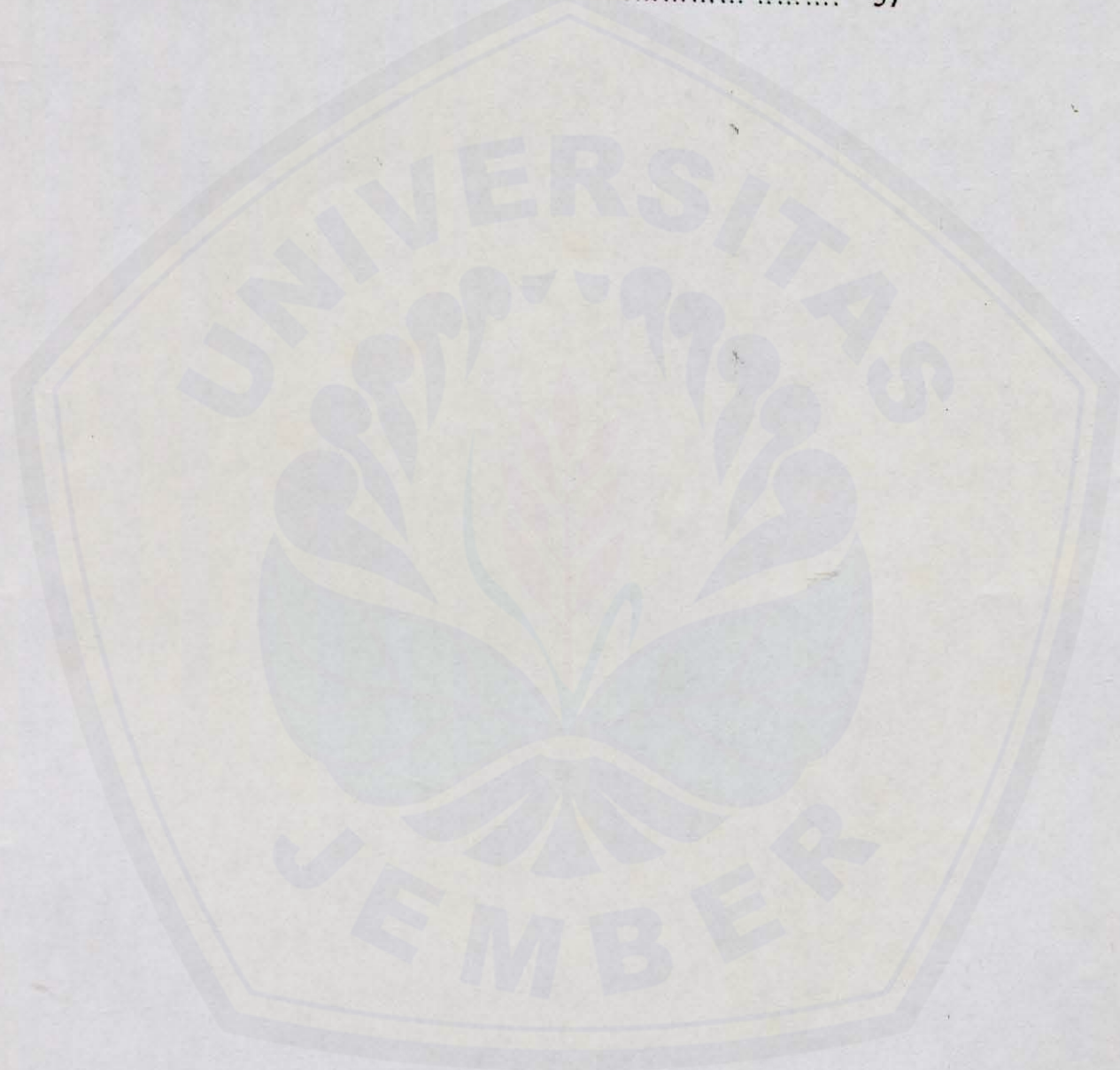
Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persembahan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
1.3 Permasalahan.....	11
1.4 Kerangka Teori.....	11
1.5 Hipotesa.....	15
1.6 Metodologi Penelitian.....	15
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.6.2 Metode Analisa Data.....	16
1.7 Pendekatan.....	16
Bab II Kemunculan dan Perkembangan Fundamentalisme Islam	18
2.1 Kemunculan Fundamentalisme Islam.....	20
2.1.1 Konsepsi Teologis Fundamentalisme Islam.....	20
2.1.2 Fundamentalisme Islam Dalam Tataran Praktis.....	23
Bab III Perspektif Amerika Serikat, Identitas Nasional, dan	
Kepentingan Hegemoni Global	32
3.1 Perspektif Amerika Serikat terhadap Islam.....	38
3.2 Identitas Nasional Amerika Serikat sebagai <i>The Good Power</i> ..	41
3.3 Identitas Amerika Serikat sebagai Negara Hegemon Dan	
<i>Global Super Power</i>	47
3.4 Identitas Amerika Serikat sebagai Kampiun Demokrasi.....	60

Bab IV Strategi dan Kebijakan Amerika Serikat terhadap	
Fundamentalisme Islam	68
4.1 Pengelompokan Umat Islam dan Kebijakan Amerika Serikat..	68
4.1.1 Konsepsi Sebagai Sebuah Kebenaran.....	71
4.1.1.1 Media Akademis.....	73
4.1.1.2 Pernyataan Resmi Pemerintah AS.....	79
4.1.1.3 Pemberitaan Media Massa.....	82
4.1.2 Kebijakan AS terhadap Fundamentalisme Islam :	
Kasus Kelompok dan Negara.....	85
4.2 Pencitraan Negatif Terhadap Fundamentalisme Islam.....	103
4.3 Penisbatan Kekerasan (terorisme) kepada fundamentalisme	
Islam.....	115
4.3.1 Sekilas Tentang Terorisme.....	115
4.3.2 Fundamentalisme Islam Sebagai Teroris Internasional..	118
Bab V Kesimpulan	137
Daftar Pustaka	140
Lampiran I	
Lampiran II	
Lampiran III	

Daftar Tabel

1. Keuntungan Ekonomis Amerika Serikat Pasca Perang Teluk... 56
2. Belanja Militer Amerika Serikat per Tahun dan Perbandingannya
Dengan dunia..... 57



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perhatian dunia Barat terhadap Islam sebenarnya sudah sejak lama dilakukan. Hanya saja intensitas dan kadarnya yang mengalami pasang surut seiring dengan dinamika global yang terjadi. Jika merunut pada sejarah, Barat tentunya tidak akan melupakan pengalaman traumatik bagaimana Islam pernah berjaya selama kurang lebih 12 abad (sejak abad VIII hingga XX). Bahkan pada awal abad ke-12, saat dunia masih dipandang dalam tiga bagian (Asia, Eropa, dan Afrika), Asia dianggap praktis sebagai kekuasaan Muslim, begitu juga dengan sebagian besar Afrika, padahal Eropa tidak seluruhnya adalah Kristen. Dalam pengertian ini, diperkirakan hampir dua pertiga dari seluruh dunia didiami oleh kaum Muslim.¹

Indikasi terjadinya *clash* antara Barat dan Islam diawali oleh terjadinya gerakan perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kaum Muslimin yang pada saat itu memandang dunia ini sebagai *Dar al Islam* (Daerah Islam), yaitu daerah yang dikuasai oleh penguasa Muslim dan memberlakukan syariat Islam dan *Dar al Harb* (Daerah Perang), yaitu daerah yang masih dikuasai dan diperintah oleh orang-orang kafir. Ekspansi yang dilakukan ditujukan pada daerah-daerah perang tersebut agar bisa diislamkan dan diarakkan. Gerakan ini sendiri dilaksanakan oleh para khalifah Muslim pasca Nabi Muhammad SAW. Ini jugalah yang menjadi awal dari era kejayaan Islam di dunia.

Pada masa itu, kekuatan dari pasukan Muslim memang sangat sulit ditandingi. Dalam waktu singkat, serangan tentara Islam berhasil menaklukkan kerajaan Persia kuno dan menyatukan seluruh kekuasaannya dalam kekuasaan khalifah, serta membuka jalan untuk invasi ke Asia Tengah dan India. Kekuasaan kaum Muslimin pun kian meluas dengan keberhasilan mereka melakukan penaklukan. Wilayah yang menjadi target selanjutnya adalah kekuasaan Barat.

¹ W. Montgomery Watt. *Islam dan Peradaban Dunia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997 hal.122

Di sini pun pasukan Muslim secara berturut-turut berhasil menaklukkan Byzantium, Siria, Palestina, Mesir, dan Afrika Selatan, yang mana daerah tersebut selanjutnya dijadikan pangkalan bagi penaklukan Spanyol, Portugal, dan sebagian wilayah selatan Italia. Pada awal abad ke-9, penaklukan oleh pasukan Arab meningkat sampai dengan Pyrene dan Prancis.² Konflik pun jadi kian memanas dengan dikobarkannya semangat agama dalam peperangan, antara *Jihad* versus *Crusade* (perang salib).

Konflik pun terus berlanjut selama berabad-abad. Namun sekitar abad XV, konflik memasuki babak baru, dimana pada kubu Islam terjadi “pergantian pemain”, yaitu bangsa Arab digantikan oleh Turki dan Tartar. Pada masa ini, kekuatan Islam juga menunjukkan prestasi hebat dalam ekspansinya. Mereka berhasil menaklukkan Anatolia, Konstantinopel, sebagian kawasan Balkan, dan sebagian Rusia.

Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Islam pun mulai meredup. Pasca runtuhnya dinasti Turki Utsmani pada 1924 - yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai akhir dari kekhalifahan Islam-, perhatian Barat terhadap Islam pun juga mulai berkurang. Apalagi pasca Perang Dunia II, perhatian Barat lebih terfokus pada persoalan yang jauh lebih penting yaitu masalah Perang Dingin.

Pasca Perang Dingin, sekitar awal dekade 1990an, perkembangan Islam tampaknya mulai kembali disoroti. Hal yang paling fenomenal dari ini adalah munculnya tulisan dari seorang akademisi Harvard University yaitu Samuel P. Huntington dalam tesisnya yang berjudul *The Clash Of Civilizations and The Remaking Of World Order* (1993). Dalam tulisannya ini, Huntington meramalkan bahwa masa depan politik dunia akan didominasi oleh benturan antar peradaban. Ada beberapa peradaban besar dunia yaitu ; Barat, Islam, Slavik, Hindu, Konfusius, Jepang, Latin, Afrika dan Ortodoks. Dan benturan yang akan terjadi adalah antara Barat dengan Islam dan Konfusius.³

Tulisan yang selanjutnya banyak menuai kontroversi ini seakan menabuh kembali genderang perang antara Barat *versus* Islam. Hal ini karena tesis ini tidak

² Bernard Lewis. *The Crisis Of Islam*. Jakarta : Jawa Pos Press, 2004 hal. 46

³ Samuel P Huntington. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam, 2002. hal. x

hanya melahirkan perdebatan panjang di kalangan pemikir dan akademisi, namun juga kemudian turut mengilhami dan “menjustifikasi” kebijakan-kebijakan politik negara-negara Barat terhadap Islam, terutama sekali adalah Amerika Serikat (AS).

Sebenarnya jauh-jauh sebelumnya, gejala terjadinya *clash* antara Barat dan Islam memang sudah tampak. Terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, dimana di sini bermunculan golongan-golongan yang berani menentang dominasi dan pengaruh Barat. Namun pada perkembangan awalnya, hal ini hanya berkaitan dengan masalah sosial kultural (misalnya menentang dampak dari nilai-nilai sekularisasi dan kebebasan individual Barat yang berlebihan seperti praktek aborsi, *free sex*, dan sebagainya). Tujuan mereka lebih pada purifikasi ajaran-ajaran Islam dan perbaikan moral masyarakat. Di sini pun mereka juga tidak hanya menentang pengaruh Barat, tapi juga praktek-praktek keagamaan yang dinilai tidak benar karena dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal. Sebagai contoh dari gerakan ini adalah gerakan Wahabi dan Hambali di Arab Saudi.

Lambat laun gerakan ini mulai mengalami perkembangan. Tidak hanya dalam kuantitas pengikutnya, tapi juga dalam perluasan dimensi perjuangannya. Semakin kuatnya pengaruh Barat di Dunia Islam membuat mereka kian berani melakukan perlawanan. Mereka mulai berani terjun ke dimensi politik dalam hal ini untuk menegakkan syariat Islam dalam negara, menentang konsep sekularisasi negara, maupun segala bentuk pengaruh Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh dari gerakan ini adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir, Al Nahdhah di Tunisia, Jihad al Islam di Lebanon, Hizbut Tahrir di Mesir dan Yordania dan sebagainya.

Pihak Barat pun merespon hal ini. Mereka menganggap bahwa gerakan-gerakan semacam ini adalah penolakan terhadap nilai-nilai Barat. Secara sembarangan, mereka kemudian menyamakan gerakan Islam ini dengan gerakan fundamentalis Kristen yang pernah muncul di Amerika Serikat (AS) pada awal tahun 1900an.

Mereka yang disebut golongan fundamentalis Kristen ini adalah golongan yang sangat kaku dalam menginterpretasikan ajaran Injil dan menolak interpretasi

lain dari Injil dan teologi Kristen dengan pengetahuan modern. Sehingga, mereka juga menolak nilai-nilai dari kemajuan dan perkembangan pengetahuan modern tersebut.

Kemudian tentang gerakan Islam tersebut, Barat menganggap bahwa gerakan Islam ini adalah dari sekelompok orang Islam yang juga terlalu kaku dan literal dalam memahami agamanya, yang tidak akomodatif terhadap berbagai kemajuan dan perkembangan dunia. Karena itu, mereka pun melabeli golongan ini sebagai Islam Fundamentalis.

Hal ini selanjutnya menuai kritik dari berbagai kalangan Islam. Menurut mereka, Islam adalah agama yang akomodatif terhadap kemajuan. Islam mendukung semua upaya yang membawa kemaslahatan bersama, asalkan tetap dalam koridor syariat Islam. Seperti yang dikatakan seorang “fundamentalis” yaitu Sayyid Qutb: “syariat Islam.....terlukis dalam bentuk yang konkrit tapi luas, pasti tapi tidak kaku, tetap tapi luwes dan elastis, mencakup segala bentuk evolusi”.⁴

Beberapa ahli juga mencoba mengkritik term fundamentalisme Islam itu sendiri, yang menurut mereka masih simpang siur dan terlalu “melihat” dengan perspektif Barat. Memang prototipe pemikiran yang menjadi ciri khas dari fundamentalisme itu sendiri berasal dari tradisi Barat dalam hal ini agama Kristen yaitu penafsiran Injil dan seluruh teks agama secara literal dan menolak secara utuh seluruh bentuk penakwilan atas teks manapun, walaupun teks-teks itu berisikan metafor-metafor rohani dan simbol-simbol sufistik, serta memusuhi kajian kritis yang ditulis atas Injil.⁵

Namun jika berpijak pada pemikiran di atas, maka fundamentalisme dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam setiap agama manapun, tidak hanya pada Kristen maupun Islam, tapi bisa juga terdapat pada Hindu, Buddha, Yahudi, dan sebagainya. Hal ini karena fundamentalisme adalah suatu wujud keyakinan yang muncul dari penafsiran akal pikiran manusia terhadap wahyu yang diturunkan oleh Tuhannya.

⁴ Sayid Qutub. *Hari Esok Untuk Islam* (terjemahan oleh Djamaludin Kafie). Surabaya : Bina Ilmu, 1982. hal. 57

⁵ <http://media.isnet.org/islam/Etc/Fundamentalisme.html> diakses pada September 2004

Dalam tataran praksisnya, golongan fundamentalis ini cenderung eksklusif dan biasanya memiliki misi khusus di masyarakat. Citra yang muncul di masyarakat tentang golongan ini pun bermacam-macam. Khusus bagi fundamentalisme Islam, keberadaannya bisa dibilang yang paling kontroversial. Hal ini karena perbedaan pandangan dari golongan Islam dan Barat tentang fundamentalisme Islam itu sendiri. Beberapa pemikir Islam seperti Ibnu Taimiyah menggambarkan fundamentalisme Islam sebagai gerakan *mujaddid* (pembaharu), yang berusaha mengecam dan mengikis segala bentuk keyakinan, kepercayaan, dan praktek-praktek di luar Islam yang menyusup ke dalam ajaran agama Islam, serta mengajak umat Islam untuk kembali ke Al Quran dan Al Sunnah.⁶ Sedangkan di kalangan Barat, stereotip yang berkembang lebih mencitrakan fundamentalisme Islam sebagai golongan yang literal, kaku, radikal, militan, serta anti terhadap nilai-nilai dan kemajuan dari peradaban Barat.

Kontroversi ini terus berlangsung seiring dengan perkembangan dari fundamentalisme Islam itu sendiri. Fundamentalis Islam semakin tumbuh subur, bahkan di negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, AS, dan sebagainya. Fundamentalis Islam menunjukkan perkembangan signifikan dari waktu ke waktu.

Hal ini semakin jadi kekhawatiran Barat. Mungkinkah tesis Huntington jadi kenyataan? Untuk itu kemudian pihak Barat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman baru bagi hegemoni global mereka ini. Barat kemudian berhasil mempermainkan opini global yang menimbulkan kesimpangsiuran tentang fundamentalis Islam ini. Fundamentalis Islam semakin dicitrakan negatif, yang merupakan golongan radikal-ekstemis, kaku, militan, dan menolak berbagai kemajuan dan nilai-nilai positif Barat seperti demokrasi, individualisme, liberalisasi, dan sebagainya. Bahkan fundamentalis Islam juga dicitrakan sebagai golongan yang saking radikalnya, tidak segan-segan melakukan tindakan destruktif untuk mencapai kepentingan tertentu.

Pada negara-negara Islam sendiri, pihak Barat (dalam hal ini terutama AS), melakukan politik pengkotak-kotakan kelompok Islam, yang dilakukan

⁶ <http://oposan.itgo.com/kedua.htm> diakses pada September 2004

seiring dengan kampanye global demokrasi. Banyak tipologi kelompok Islam yang muncul sebagai hasil “hubungan” antara Islam dengan pemahaman Barat, namun secara garis besar kelompok Islam tersebut bisa terbagi dalam moderat dan fundamentalis, yang mana hal ini lebih cenderung didasarkan atas sikap mereka terhadap nilai-nilai peradaban Barat.

Pasca tragedi WTC (9/11/2001), fundamentalis Islam juga diidentikkan dengan “konsep baru” (tapi lama) dari Barat yaitu terorisme. Eskalasi aksi terorisme internasional yang kian mengglobal dikaitkan pula dengan perkembangan fundamentalisme Islam. Hal ini tampak bahwa sebagian besar daftar teroris yang disusun oleh AS dan PBB, adalah gerakan-gerakan Islam.⁷

Fundamentalisme Islam kian diwacanakan sebagai ancaman, tidak saja bagi Barat, tapi juga bagi dunia. Hal ini kembali mengundang kontroversi baik dari kalangan Islam, maupun kalangan Barat sendiri. Mereka menolak labelisasi fundamentalisme Islam, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan radikal-ekstremis (bahkan teroris) yang merupakan ancaman bagi pihak tertentu. Mereka menganggap bahwa hal ini bersifat merusak citra Islam. Di sisi lain, sebagian kalangan pemikir Barat juga tidak setuju dengan hal ini. Patrick J. Buchanan menyatakan bahwa : “menyatakan Islam sebagai musuh Amerika (Barat) setelah runtuhnya Uni Sovyet sama dengan menyalakan kembali Perang Dingin babak II”. (*New Hampshire Sunday News*, 25 Nopember 1990).⁸

Berbagai kritik tersebut tidak juga menggoyahkan pendirian pihak Barat, terutama AS. Mereka tetap menganggap Islam (dalam hal ini Fundamentalis Islam) sebagai ancaman, yang telah muncul sebagai “musuh” baru (*green menace*) yang menggantikan musuh sebelumnya yaitu Uni Sovyet (*red menace*).

Hal yang menarik inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Konstruksi Barat tentang Fundamentalis Islam sebagai ancaman perlu dikaji ulang. Apakah ini memang diakibatkan *Islamophobia* yang berlebihan dari pihak Barat? Ataukah ada kepentingan lain? Sebab, jika kita melihat realitas yang ada, kekuatan

⁷ Firman Saladdin. *Radikalisme, Fundamentalisme Islam, Kata Siapa!* Makalah disampaikan pada *Simposium Regional Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer*. Di Samarinda, 25-27 Nopember 2004

⁸ op. cit. Huntington hal. xiii

fundamentalisme Islam belumlah sepadan dengan Barat. Sebagai contoh kekuatan AS yang dalam ekonomi, politik, budaya, maupun militer sangat jauh keunggulannya jika dibandingkan dengan kekuatan dari golongan fundamentalisme Islam yang meskipun mulai menunjukkan perkembangan popularitas akan tetapi masih dalam *scope* yang relatif kecil. Golongan fundamentalis Islam, kebanyakan masih merupakan golongan minoritas bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sekalipun (misalnya Indonesia).

Di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa dalam setiap agama bisa saja terdapat golongan yang disebut fundamentalis ini. Evangelis di AS dan Amerika Latin, Buddhis di Tibet, China, dan Thailand, Hindu di India, maupun Yahudi di Israel, adalah contoh nyata dari suatu fundamentalisme keagamaan. Jika dalam setiap agama punya fundamentalisme-nya sendiri-sendiri, lantas mengapa hanya fundamentalisme Islam yang dianggap sebagai ancaman?

Jadi, permasalahan inilah yang akan dibahas oleh penulis dalam tulisan yang berjudul ;

Fundamentalisme Islam sebagai Ancaman Terhadap Hegemoni Global Amerika Serikat

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan perlu diberikan pembatasan. Dalam penulisan karya ilmiah hal ini diperlukan untuk memperjelas dan memudahkan dalam menganalisa permasalahan dengan seksama, terarah, dan sistematis. Di sisi lain, pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti dan pembahasan yang terlalu meluas, mengambang, dan bias sehingga mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah dari suatu penulisan.

Kartini Kartono memberikan penjelasan lain tentang pembatasan masalah yang dijabarkan sebagai berikut ;

“Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan limit waktu, peringkasan, sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interelasi permasalahan.”⁹

Kemudian dalam tulisan ini, penulis akan memberikan pembatasan dalam pembahasan yaitu pada materi dan konsep, serta waktu.

Dalam pembatasan materi, penulis sebelumnya akan menjelaskan beberapa konsep yang menurut penulis maknanya masih terlalu luas sehingga bisa menimbulkan bias dalam pembahasan.

Konsep pertama yang akan penulis jelaskan adalah “fundamentalisme Islam” sendiri. Istilah ini berasal dari kata fundamen, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti dasar, pokok, atau asas. Sedangkan fundamentalisme didefinisikan sebagai gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam kitab suci.¹⁰

Dalam tulisan ini penulis akan melihat fundamentalisme Islam melalui perspektif Barat dalam hal ini AS. yang mana bisa kita definisikan secara kasar bahwa fundamentalisme Islam adalah paham, atau aliran dari suatu gerakan keagamaan Islam yang mana para pengikutnya sangat kaku, literal, dan kolot dalam menginterpretasikan ajaran kitab suci dan teologi agamanya, yang sangat tidak akomodatif terhadap berbagai kemajuan dan perkembangan dunia, serta anti terhadap nilai-nilai luhur dari peradaban Barat. Penulis mengambil perspektif dari AS ini karena tulisan ini akan mengkaji konstruksi sosial AS terhadap fundamentalisme Islam dan mengapa ia dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni global AS. Kronologi perkembangan term fundamentalisme Islam dan kontradiksi antara perspektif Barat dan Islam tentang fundamentalisme Islam itu sendiri akan penulis jabarkan selanjutnya.

Selanjutnya tentang konsep “Barat”, dimana yang dimaksudkan penulis disini nantinya akan lebih dirujuk (difokuskan) pada suatu negara yaitu Amerika Serikat (AS). Hal ini karena penulis berasumsi bahwa AS adalah representasi

⁹ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Jakarta : CV Rajawali Pers, 1990 hal. 55

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989 hal.245

yang paling memadai untuk konsep “Barat” ini. Dalam berbagai tulisan, konsep “barat” sendiri memang cenderung diasosiasikan dan tidak terlepas dari AS. Begitu juga dengan definisi term fundamentalisme Islam yang penulis jelaskan sebelumnya, dimana hal tersebut juga merefleksikan perspektif AS tentang fundamentalisme Islam. Hal ini karena tulisan ini nantinya akan berkaitan dengan konstruksi sosial yang dibangun oleh AS tentang fundamentalisme Islam dan mengapa ia dianggap sebagai ancaman bagi hegemoni global AS. Meskipun nanti dalam pembahasan penulis juga akan menjabarkan fundamentalisme Islam yang dilihat dari perspektif Islam sendiri.

Konsep selanjutnya adalah “ancaman”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata ancaman berarti usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.¹¹ Di sini ancaman merupakan konstruksi sosial AS terhadap fundamentalisme Islam, dimana AS menganggap golongan fundamentalis Islam yang anti terhadap nilai-nilai peradaban Barat merupakan ancaman terhadap kepentingan hegemoni global AS.

Konsep yang juga perlu dijelaskan adalah tentang “hegemoni”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hegemoni didefinisikan sebagai pengaruh kekuasaan suatu negara atas negara lain (negara bagian).¹² Selain itu dalam *Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia* hegemoni dijabarkan sebagai sebuah terminologi yang digunakan dalam hubungan politik internasional yang menggambarkan kemampuan atau kekuatan suatu negara untuk memimpin (*hegemony = primacy / leadership*), sehingga negara lain harus menentukan sikapnya terhadap kepemimpinannya.¹³ Konsep ini jelas masih sangat luas, namun dalam pembahasan nanti, penulis akan lebih mengerucutkan pada masalah-masalah yang lebih “terasa *clash*-nya” antara Islam dan Barat (AS), yaitu masalah sosial, budaya, dan politik.

¹¹ *ibid.* hal.33

¹² *ibid.* hal 302

¹³ *Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 hal.86

Konsep terakhir yang akan penulis jelaskan adalah tentang *identitas*. Dalam kamus peristilahan, identitas diartikan sebagai jati diri, atau ciri-ciri, atau keadaan khusus seseorang.¹⁴ Namun dalam konteks ke-Hian, identitas lebih diartikan sebagai jati diri sebuah negara yang dibangun berdasarkan konteks sejarah, budaya, norma, politik, dan sosial yang terdapat di negara tersebut.¹⁵ Alexander Wendt dalam sebuah artikelnya mendefinisikan identitas sebagai definisi sosial dari aktor dimana para aktor tersebut memiliki pengertian tentang “dirinya sendiri” dan “orang lain” dan (dalam hubungan internasional) turut membentuk struktur sosial dunia.¹⁶ Identitas ini sangat penting dalam hubungan internasional, karena hal ini turut menentukan kepentingan-kepentingan dan pilihan-pilihan tertentu yang diambil oleh suatu negara. Kebijakan dari suatu negara, termasuk politik luar negerinya, sangat dipengaruhi oleh identitas yang melekat di negara tersebut.

Secara keseluruhan tulisan ini akan membahas mengapa fundamentalisme Islam dikonstruksikan dan dianggap sebagai ancaman atau musuh terhadap hegemoni global Barat (AS), yang jika kita pikir secara rasional, kekuatan keduanya sangatlah timpang, mungkin ibarat David melawan Goliath. Jelas, disini ada kepentingan ataupun *hidden agenda* tertentu yang melatarbelakangi sehingga AS mengkonstruksikan *green menace* (Islam) yang kini telah hadir menggantikan *red menace* (sosialis-komunis).

Kemudian dalam pembatasan waktu, penulis akan mengambil rentang waktu sejak perhatian Barat terhadap Islam kembali “menguat”, terutama fenomena perkembangan dari fundamentalisme Islam. Dalam hal ini, penulis akan berkuat pada masa sejak berakhirnya perang dingin di awal dekade 90an hingga sekarang. Karena, pada masa inilah, sejak runtuhnya Uni Sovyet, perkembangan Islam menjadi perhatian yang cukup serius dari dunia Barat. Meskipun demikian, hal ini juga masih fleksibel, artinya memungkinkan penulis juga sedikit “keluar”

¹⁴ M.D.J. Al Barry. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*. Surabaya : Penerbit Indah, 1996 hal.125

¹⁵ Yanti Rahmawati. *Berlanjutnya Simbolisasi Negara Pembangkang oleh AS terhadap Kuba Pasca Perang Dingin*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember,2004 hal. 8

¹⁶ Alexander Wendt. *Anarchy is What State Make Of It*. nama jurnal dan tahun tidak diketahui

dari rentang waktu tersebut, dimana hal ini ditujukan untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan itu sendiri.

1.3 Permasalahan

Permasalahan ataupun problematika adalah hal yang mendasar yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Mengetahui permasalahan akan memberikan kita arah di dalam setiap penelitian dan akan mempermudah kita dalam memfokuskan suatu topik permasalahan di dalam penulisan serta membuat kita mampu mencari dan menyarankan suatu solusi dari permasalahan tersebut.

Permasalahan sendiri bisa didefinisikan sebagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam situasi tertentu dan selanjutnya menuntut kita untuk menyelesaikan ataupun mencari jalan keluar. Ketika kita sedang dihadapkan pada masalah, maka kita juga akan berusaha mengetahuinya lebih dalam.

Selanjutnya dalam tulisan ini, penulis ingin membahas tentang fundamentalisme Islam sebagai ancaman terhadap hegemoni global Barat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh AS. Fundamentalisme Islam sebagai ancaman ini adalah sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh AS, dimana AS telah mengkonstruksikan fundamentalisme Islam sebagai ancaman terhadap hegemoni globalnya. Hal ini menjadi sangat menarik, mengingat jika kita komparasikan kekuatan antara keduanya adalah jauh dari kata seimbang. Fundamentalisme Islam tersebut bisa dianggap jadi ancaman oleh AS jelas merupakan hal yang aneh, bahkan mungkin absurd. Hal ini kemudian bisa penulis rumuskan dalam kalimat tanya yang lebih sederhana yaitu ;

Mengapa dan bagaimana fundamentalisme Islam dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni global Amerika Serikat ?

1.4 Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah, kerangka teori punya peranan yang absolut. Dengan teori maka akan memudahkan kita menganalisa permasalahan dengan tepat. M.D. Al Barry mendefinisikan teori sebagai ajaran atau paham (pandangan)

tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal (rasio) ; patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan dan sebagai pedoman dalam praktek.¹⁷

Dalam permasalahan ini, penulis akan menggunakan teori konstruktivis. Digambarkan secara umum dalam *Handbook of International Relations* ;

“ constructivism are interested in how the objects and practices of social life are ‘constructed’, and especially those that societies and researchers take for granted as given or natural.”¹⁸

Teori ini akan menganalisa tentang konstruksi sosial yang dibangun oleh suatu negara yang diwujudkan dalam praktek kehidupan negara tersebut. Realitas yang ada adalah sesuatu yang dikonstruksikan dan konstruksi tersebut terbangun dengan dipengaruhi oleh identitas nasional yang ada pada negara tersebut.

Menurut teori ini, suatu negara mengembangkan hubungan dan rasa saling pengertian dengan dunia luar (termasuk dengan negara lain) dipengaruhi oleh identitas nasional yang melekat pada negara tersebut. Yang kemudian direproduksi secara simultan dalam praktek sehari-hari.¹⁹ Identitas nasional yang dimiliki suatu negara akan mendefinisikan tentang *self* (diri sendiri) dan *other* (orang lain). Kemudian dalam hubungan antara *self* dan *other* ini selanjutnya akan melahirkan konstruksi dan pengertian pula tentang *other* sebagai *ally* (kawan) ataupun *enemy* (musuh). Kontak dengan *ally* maupun *enemy* akan memproduksi dan mereproduksi identitas nasional suatu negara. Inilah yang menjadi dasar suatu negara dalam melakukan politik luar negerinya termasuk dengan membina hubungan dengan negara lainnya. Hal ini karena politik luar negeri adalah *identity making tool* (alat pembentuk identitas).²⁰

Misalnya suatu negara A mau membina hubungan dengan negara B, hal ini terjadi karena konstruksi sosial yang terbangun dalam negara A tersebut

¹⁷ M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Penerbit Arkola, 2001 hal. 746

¹⁸ James Fearon and Alexander Wendt. *Rationalism v. Constructivism : A Sceptical View*. Dalam *Handbook Of International Relations*. Sage Pub, London, 2002 hal. 57

¹⁹ Ted Hopf. *The Promise Of Constructivism*. Dalam *International Security*, Vol.23, No.1, 1998 hal. 175

²⁰ Nizar Messari. *Identity And Foreign Policy :The Case Of Islam In U.S. Foreign Policy*. Nama jurnal, penerbit, dan tahun penerbitan tidak diketahui. Hal. 227

(misalnya dengan menyatakan bahwa negara B adalah “baik”). Mengapa negara B bisa dinilai baik ini karena dipengaruhi identitas nasional dari negara A itu sendiri.

Hal ini menunjukkan pentingnya identitas bagi suatu negara. Identitas turut mempengaruhi, menentukan, dan menyatakan kepentingan dan pilihan tertentu dari suatu negara. Suatu negara yang mengadakan hubungan dengan negara lain, ibarat individu yang sedang berhubungan dengan individu lain. Yang mana di sini sama-sama melibatkan identitas masing-masing dan berbagai kepentingan yang tercermin dari identitas tersebut.

Mengingat pentingnya identitas ini, maka jika suatu negara merasa identitasnya terancam, maka ia akan melakukan *counter* terhadap ancaman tersebut. Seperti seorang individu yang merasa identitasnya terancam, suatu negara akan memandang perlu untuk mengklaim ataupun memperbaiki keadaan. Ketika suatu negara merasa identitasnya terancam, maka negara tersebut akan berusaha memperbaiki keadaan dengan berbagai macam usaha, salah satunya melalui kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya.²¹

Kemudian dalam relevansinya dengan permasalahan ini, bahwa fundamentalisme Islam adalah sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh dunia Barat (dalam hal ini adalah AS). Dalam sejarahnya, AS pernah mengenal adanya golongan fundamentalis Kristen yang sangat menolak berbagai nilai-nilai yang dikembangkan oleh Barat dan menafsirkan Injil serta mempraktekkan ajaran teologisnya dengan sangat kaku dan literal. Inilah yang kemudian mereka labelkan pada golongan Islam yang mereka nilai juga tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemajuan yang mereka bawa.

AS mengkonstruksikan fundamentalisme Islam sebagai ancaman sebenarnya berkaitan dengan identitas nasional mereka. AS mengidentikkan dirinya sebagai kekuatan baik, pelindung kebebasan dunia, *super power*, hegemon, polisi dunia, kampiun demokrasi, dan sebagainya. Intinya, AS mengidentikkan dirinya layaknya *superhero* yang baik dan bertugas untuk menumpas kekuatan lain yang “jahat”. Hal ini semakin kentara pasca perang dingin, dimana tidak ada lagi kekuatan yang sepadan bagi AS. Berbagai identitas

²¹ op. cit, Yanti Rachmawati. Hal. 11

di atas kini melekat kuat di AS dan sangat mempengaruhi berbagai kebijakan luar negeri yang dilakukannya.

Namun lambat laun, identitas ini semakin terancam. Berakhirnya perang dingin ternyata tidak hanya membuat AS bisa dengan tenang menikmati puncak kedigdayaannya, tapi juga mengharuskan AS untuk mencari “musuh” baru. Hal ini karena jika tidak ada musuh, maka identitas yang dimilikinya tidak akan berguna. Memang sebenarnya pada masa pasca perang dingin, AS masih memiliki “stok musuh” lain yang diproduksi dan direproduksi identitas nasionalnya. Negara-negara rogue state, komunisme, fasisme, dan sebagainya masih dianggap AS sebagai ancaman atau musuh bagi dirinya. Namun di antara mereka tersebut, belum ada yang benar-benar menempati posisi signifikan seperti layaknya *Red Menace* Uni Sovyet. Memang negara-negara seperti Iran, Kuba, Korut, dan Libya merupakan potensi ancaman yang terus mendapatkan pengawasan ketat dari AS. Namun untuk saat ini, mereka belumlah benar-benar menjadi ancaman serius. Perbandingan kekuatan antara AS dengan mereka terlampaui jauh. Di sisi lain, ada juga negara-negara besar seperti China dan Rusia, namun dalam perkembangan dunia kontemporer sekarang, adalah tidak mungkin bagi AS untuk memvonis mereka secara vulgar sebagai ancaman atau musuh (seperti saat AS menghadapi Sovyet) dan mengambil posisi konfrontatif dengan mereka. Tindakan seperti ini justru merupakan langkah yang kontraproduktif bagi AS.

Hal seperti inilah yang kini menjadi permasalahan bagi AS. Analoginya, jika AS tidak punya “musuh yang jahat”, maka “sang pahlawan yang baik” tidaklah diperlukan. Hal ini bisa berdampak luas, misalnya terhadap pengembangan kekuatan militernya, dimana jika ada musuh yang kemudian diwacanakan sebagai musuh internasional, maka AS akan mudah mendapat legitimasi dan justifikasi dari negara-negara lain dalam pengembangan kekuatan militernya, karena hal ini ditujukan untuk menumpas “musuh bersama”. Jika musuh tidak ada, maka dunia akan menentang pengembangan kekuatan militer AS, karena justru menilainya sebagai ancaman bagi negara-negara lainnya.

Hal yang sama juga terjadi dalam politik domestik AS, dimana tiap tahun Gedung Putih selalu mengajukan permohonan dana yang sangat besar kepada

senat bagi berbagai proyek di Pentagon.²² Jika pada, masa perang dingin mereka menggunakan Uni Sovyet sebagai alasan. Maka pasca perang dingin, mereka harus mencari alasan baru untuk melindungi elemen vital bagi negara tersebut. Maka dipilihlah golongan Islam sebagai musuh berikutnya. Dengan adanya musuh baru ini, maka AS punya alasan bagi pengembangan kekuatan militernya yang tentu saja merupakan pendukung bagi keberlangsungan hegemoni globalnya.

Hal ini jelas untuk mempertahankan identitas AS sebagai sang pahlawan yang baik dan sekaligus mempertahankan identitas mereka yang lain yaitu sebagai negara hegemon. Dengan diciptakannya musuh baru, maka AS selanjutnya akan melakukan propaganda untuk mendapatkan dukungan dunia internasional terhadap “perang”nya, yang mana sebenarnya lebih ditujukan untuk melindungi kepentingannya dan mempertahankan hegemoni globalnya.

1.5 Hipotesa

Hipotesa dapat dikatakan sebagai jawaban ataupun kesimpulan sementara, yang akan diuji lagi dalam pembahasan lebih lanjut. Hipotesa merupakan pilihan dari sekian alternatif dugaan yang mana dinilai paling mendekati kebenaran. Meskipun kebenaran ini belum final dan masih harus dibuktikan lagi.

Dalam tulisan ini, penulis memberikan hipotesa yaitu ;

Bahwa fenomena radikalisme dan fundamentalisme bisa terdapat pada setiap agama, namun khusus bagi fundamentalisme Islam bisa dikatakan mendapatkan perhatian tersendiri dalam dinamika politik dan keamanan global. Fundamentalisme Islam kini berkembang menjadi sosok yang menakutkan. Perkembangannya yang signifikan sering diidentikkan dengan eskalasi aksi terorisme internasional yang jelas merupakan ancaman bagi seluruh dunia, termasuk bagi negara *superpower* seperti AS.

Namun di balik itu, penulis berasumsi bahwa dikonstruksikannya fundamentalisme Islam sebagai ancaman ini justru merupakan suatu strategi AS dalam memperkuat hegemoni globalnya. Hal ini ditujukan AS untuk

²² Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. *Satu Dasawarsa The Clash Of Civilizations*. Jogyakarta : Ar Ruzz Press, 2003 hal. 52

mempertahankan identitasnya sebagai kekuatan baik dan pelindung dunia seperti yang dilakukannya pada masa perang dingin dengan memunculkan Sovyet sebagai ancaman. Pasca perang dingin dan runtuhnya Sovyet, AS kini membutuhkan “musuh” baru untuk mempertahankan identitas tersebut sehingga dunia akan terus bergantung pada AS dan memaklumi berbagai kebijakan AS (termasuk pengembangan kekuatan militer), di sisi lain hal ini sekaligus pula untuk menjamin negara-negara tersebut agar tetap di bawah kekuatan hegemoni global AS..

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, penelitian berperan penting untuk menghasilkan data dan analisa yang tepat. Penulis menggunakan dua metode dalam penelitian ini yaitu ; metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data-data sekunder, yang telah penulis dapatkan dari ;

1. Literatur yang berkaitan dengan Hubungan Internasional
2. Media Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji
3. Makalah-makalah
4. Surat kabar yang memuat artikel tentang perkembangan fundamentalisme Islam
5. Jurnal Berkala

Adapun sumber-sumber tersebut telah penulis dapatkan di ;

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Situs Internet
4. Koleksi Pribadi
5. Simposium

6. dan lain-lain

1.6.2 Metode Analisa Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisa data deduktif. Metode ini berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian baru mengerucut kepada hal-hal yang lebih khusus.

Penulis akan memulai dari masalah yang lebih luas yaitu *clash* antara Islam dan Barat, baru kemudian lebih dikerucutkan pada permasalahan antara AS dan Fundamentalisme Islam.

1.7 Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yang akan memudahkan penulis menganalisa permasalahan yang ada. Pendekatan yang akan digunakan adalah *pendekatan historis (sejarah)* dan *pendekatan wacana*.

Pendekatan historis. Berdasarkan pendekatan ini, suatu peristiwa internasional kontemporer sangat dipengaruhi oleh proyeksi kekuatan sejarah dan hubungan sejarah dari masa kini menuju masa depan. Begitu pula dengan situasi internasional yang ada saat ini dipengaruhi oleh berbagai konflik masa lalu dan oleh prinsip-prinsip hubungan antar negara yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu.²³

Dengan pendekatan ini, penulis bisa menganalisa bagaimana fundamentalisme Islam dikonstruksikan berdasarkan identitas nasional AS. Salah satu faktor identitas adalah sejarah, sehingga bagaimana AS mengkonstruksikan fundamentalisme Islam sekaligus berbagai kebijakan yang diterapkannya juga dipengaruhi atau dilatarbelakangi faktor sejarah.

Pendekatan wacana. Seperti diketahui, bahwa fundamentalisme Islam adalah sebuah konstruksi sosial. Fundamentalisme Islam adalah sebuah label atau simbol yang diberikan oleh AS terhadap suatu golongan Islam, yang mana hal ini mencerminkan gambaran sosial AS terhadap golongan tersebut, yang kemudian dikembangkannya secara sosial dan dengan makna-makna tertentu.

²³ M. Amien Rais. *Politik Internasional Dewasa Ini*. Surabaya : Usaha Nasional, 1989 hal. ____

Simbol ataupun label merupakan representasi dari nilai, pendapat, ataupun keputusan terhadap sesuatu.²⁴ Sehingga, labelisasi terhadap golongan fundamentalis Islam mewakili pendapat, penilaian, dan keputusan yang diberlakukan oleh AS terhadap golongan yang mereka sebut fundamentalis Islam tersebut.

Pendekatan wacana ini membantu menjelaskan konstruksi AS atas identitasnya dan atas fundamentalisme Islam, serta konsekuensi yang lahir dari konstruksi tersebut.

²⁴ op. cit Yanti Rahmawati. Hal. _____

Bab II

Kemunculan dan Perkembangan Fundamentalisme Islam

Sebelum memasuki ranah fundamentalisme Islam, sebaiknya kita berangkat terlebih dahulu dari asal usul terminologi “fundamentalisme” itu sendiri, yang pada awalnya hanya dikenal dalam tradisi agama Kristen tapi dalam perkembangannya “meluas” ke agama yang lain dan kini menjadi isu yang cukup kontroversial, terutama jika dihubungkan dengan sikap radikalisme dan aksi terorisme yang membawa nama agama tertentu.

Terminologi fundamentalisme sebenarnya sudah ada sejak lama, yang pada awalnya memang dikenal dalam histori teologi Kristen. Ilyas Ba Yunus, seorang sosiolog pada *The State University of New York College at Cortland*, dalam artikelnya yang berjudul *The Myth of Islamic Fundamentalism*, menjelaskan pemakaian diskursus fundamentalisme untuk pertama kali muncul dalam sebuah konferensi mengenai Bibel (Injil) pada 1878 yang diselenggarakan di Niagara Falls, New York. Konferensi ini dihadiri terutama oleh kalangan pemimpin baptis, Prebiterian, dan aktivis gereja. Konferensi ini menghasilkan sembilan prinsip fundamental. Para penandatanganan konferensi tersebut menamakan diri mereka sebagai kaum fundamentalis dan menyebut para penentangannya sebagai kaum heretik.¹ Dalam perkembangan selanjutnya, fundamentalisme kian populer setelah dikeluarkannya 12 risalah yang berjudul *The Fundamentals* pada 1909, yang kemudian disebar oleh sejumlah tokoh Kristen Evangelik dan disebar di seluruh dunia. Pada 1919 didirikanlah *World Christian Fundamentals Association* untuk mengokohkan keberadaan kaum fundamentalis.²

Secara umum, mereka yang disebut fundamentalis ini adalah sekelompok orang yang memiliki penafsiran atas Injil dan teologi Kristennya secara literal dan

¹ Ilyas Ba Yunus. *The Myth of Islamic Fundamentalism*. dalam Syafiq Hasyim. *Fundamentalisme Islam : Perebutan dan Pergesaran Makna*. Dalam Jurnal Tashwirul Afkar. Edisi no.13 , Jakarta : Lakpesdam NU dan TAF. 2002 hal. 8

² Rumadi Akhmad. *Akar-Akar Teologi Fundamentalisme Islam*. Dalam Jurnal Demokrasi dan HAM. *Islam, Radikalisme, dan Demokratisasi*. Vol. 3, No.1, Jakarta : The Habibie Center. Januari – April, 2003 hal.62

kaku. Mereka menolak bentuk-bentuk penafsiran lain maupun kajian kritis atas Injil dan teologi Kristen, meskipun dalam bentuk yang mencoba merelevansikannya dengan realitas aktual yang terjadi. Selanjutnya, mereka juga menolak pengetahuan ilmiah dan dalam tataran yang lebih luas, menolak nilai-nilai dan perkembangan peradaban umat manusia yang mereka anggap tidak sesuai dengan interpretasi mereka atas kitab dan agamanya.

Menurut Rifyal Ka'bah, dari perspektif teologis tersebut, ada beberapa permasalahan sehubungan dengan fenomena fundamentalisme itu sendiri. *Pertama*, fundamentalis melihat *biblical words* (teks-teks tertulis dalam Injil) adalah mempunyai pengertian yang mutlak, jelas, dan tidak berubah. Injil tidak memerlukan tafsir, karena sudah jelas maksud dan maknanya. Meskipun di sini mereka (kaum fundamentalis) mengatakan Injil tidak memerlukan tafsir, tapi sebenarnya mereka telah membuat penafsiran sendiri atas Injil yang kemudian dianggap sebagai Injil itu sendiri. *Kedua*, ungkapan Injil dilihat sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Teks dalam Injil bisa melampaui dan mengatasi segala realitas. Karenanya, realitas harus tunduk (atau ditundukkan) kepada literalisme Injil. *Ketiga*, kaum fundamentalis menyangkal segi manusiawi dalam ungkapan Injil. Mereka tidak mengimani bahwa kitab suci tidak ubahnya pribadi dari Yesus itu sendiri yang terdiri atas unsur manusia dan Tuhan. Hal ini berbeda dengan kepercayaan umum umat Kristen yang memandang penulisan Injil juga mencerminkan pandangan keduniaan tertentu, seperti kepercayaan, perasaan manusiawi, dan gaya bahasa penulisnya. *Keempat*, interpretasi kaum fundamentalis sering berhubungan dengan pandangan ramalan (*apocalypse view*). Hal ini yang mendorong banyak orang berpendapat, kaum fundamentalis tidak bisa dipisahkan dari ramalan. Kejadian dunia lebih dilihat sebagai ancaman dan keputusan Tuhan, sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk menyalurkan aspirasinya secara bebas.³

Golongan fundamentalis ini dalam prakteknya cenderung membentuk sekte-sekte yang eksklusif di masyarakat. Mereka mewacanakan dogma-dogma

³ Rifyal Ka'bah. *Modernisme dan Fundamentalisme Ditinjau dari Konteks Islam*. Dalam *Jurnal Uhumul Quran*, No.3, Vol.IV. tahun 1993. hal 26-27 dalam ibid. hal 63-64

dari penafsiran literal mereka atas Injil tersebut yang disampaikan melalui seminar-seminar, lembaga-lembaga, maupun tulisan-tulisan dari para pendeta mereka. Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat untuk menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memusuhi realitas, serta menjahui nilai-nilai peradaban manusia yang dianggap menyimpang dari Injil sebagai sumber kebenaran.

2.1 Kemunculan Fundamentalisme Islam

2.1.1 Konsepsi Teologis Fundamentalisme Islam

Dalam lingkup pemikiran Islam sebenarnya tidaklah dikenal tentang term fundamentalisme Islam, demikian pula dalam kebudayaan Arab. Fundamentalisme dalam khasanah pemikiran Islam mungkin sedikit bisa dipadankan dengan *Ushuliyah*. Namun, konsep ini juga tidak dijelaskan dalam Al Qur'an maupun Al Hadits. Dalam Al Qur'an hanya didapatkan kata dasar dari istilah itu yaitu *al-ashlu* yang berarti "dasar sesuatu" dan "kehormatan". Bentuk pluralnya adalah *ushul* (QS Al Hasyr : 5) dan (QS As Shaaffat : 64), *al ashlu* juga bermakna "akar" (QS Ibrahim : 24).

Al Ashlu juga disebut sebagai undang-undang atau kaidah yang berkaitan dengan persoalan *furu'* (parsial) dan masa (waktu) yang telah lalu. Dalam ilmu Ushul Fiqh *al ashlu* bisa diartikan dalam beberapa makna yaitu ; "dalil", berhubungan dengan Al Quran dan Al Hadits, "kaidah umum", dan "yang paling kuat", "paling rajih" atau "paling utama".

Dalam perkembangan peradaban Islam juga terbangun ilmu-ilmu *Ushluhuddin*, yaitu ilmu Kalam, Tauhid, Musthalah (*ushul*) Hadits, dan Fiqh Akbar. Selain itu ada juga ilmu Ushul Fiqh yang membahas kaidah-kaidah serta kajian-kajian yang digunakan untuk mencapai kesimpulan hukum syara' praktekal dari dalil-dalil perinciannya.

Dalam pemikiran Islam kontemporer, yang sebagian ulamanya menggunakan kajian ilmu Fiqh, dimana *ushuliyah* dimaknai, "kaidah-kaidah pokok syariat yang diambil oleh ulama Ushul Fiqh yang menetapkan dasar *tasyri'iyah* (legalisasi) seperti ; tujuan umum syariat, hak Allah SWT dan hak

mukallaf, obyek ijtihad, nasakh (manuskrip) hukum, serta *ta' arud* (pertentangan) dan *tarjih* (pemilihan salah satu probabilitas hukum).

Semua istilah di atas tidak dikenal dalam dan tidak punya hubungan substansial dengan istilah fundamentalisme (*ushuliyah*) yang dikenal dalam pemikiran Barat dan agama Kristen.⁴ Jadi, secara tekstual, fundamentalisme tidak dikenal dalam tradisi pemikiran Islam.

Namun terlepas dari hal tersebut, sebenarnya bisa ditemukan sedikit kemiripan (bukan kesamaan) antara fundamentalisme Islam (*ushuliyah*) dengan fundamentalisme versi Barat (Kristen). Prinsip elementer tentang kebenaran absolut dari teks-teks kitab suci sama-sama dipegang teguh oleh keduanya. Fundamentalisme Islam maupun Fundamentalisme Kristen sama-sama mengakui bahwa kitab suci mereka, yaitu Al Qur'an maupun Injil, adalah sumber kebenaran yang paling utama. Hanya saja, dalam agama Islam juga terdapat tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Al Hadits atau Al Sunnah, yang juga merupakan sumber kebenaran bagi umat Islam, yang menjelaskan berbagai persoalan yang belum dicantumkan dalam Al Quran.

Fundamentalisme Islam maupun Kristen memang sama-sama menjadikan kitab suci sebagai sumber kebenaran utama. Namun dalam Islam, tidaklah dikenal sikap literalisme dalam penafsiran ayat Al Quran maupun upaya penolakan terhadap berbagai penafsiran terhadap ayat Al Quran tersebut.

Berbagai aliran pemikiran Islam bisa menerima berbagai tafsir terhadap teks suci Al Quran, di mana dalam hal ini ada *ijma'* (konsensus) yang disepakati bersama oleh para ahli muslim, khususnya Ushul Fiqh. Ayat-ayat Al Quran diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tingkat kejelasan maknanya, mulai dari *al zahir* (paling tidak jelas), *al nash*, *al mufassar*, dan *al muhkam* (paling jelas).⁵ Sebagai contoh misalnya QS Al Baqarah : 110 tentang perintah sholat dan zakat yang berbunyi ; *wa a qii mussholaata wa a tuzzakaata*

⁴ op. cit. <http://media.isnet.org/islam/Etc/Fundamentalisme.html> diakses pada September 2004

⁵ M. Qashim Mathar. *Kecenderungan Pemikiran Islam dan Interaksinya Dengan Dunia Luar*. Makalah disampaikan pada *Simposium Regional Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer*. Di Samarinda, 25-27 Nopember 2004

(dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat). Ayat ini tergolong *al muhkam* karena sudah jelas makna dan substansinya. Sedangkan pada QS An Nisaa : 11 tentang pembagian harta warisan yang berbunyi; *yuu shii ku mullah fii aw laa di kum li dzakaari mits lu hadzzil untsa yaii ni* (Allah telah menentukan bagian anak-anakmu, untuk laki-laki dual kali bagian wanita). Ayat ini bisa tergolong dalam *al nash* karena maknanya tidak begitu jelas dalam hal ini tidak disebutkannya posisi dan hak dari cucu. Namun untuk menyikapi hal ini, para ahli telah melakukan *ijma'* yang mana menyimpulkan bahwa cucu disamakan dengan anak, jika anak tidak ada, maka cucu berhak mendapat bagian harta warisan.⁶

Jadi, setiap penafsiran terhadap Al Quran bisa diterima oleh mahzab-mahzab yang ada dalam Islam, sementara yang membedakan adalah kadar dari penafsiran itu sendiri. Ada yang melakukan pembatasan dalam penafsiran, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang berani melakukan penafsiran. Tidak ada satupun mahzab yang hanya membatasi diri pada makna literal ayat Al Quran dan menolak seluruh bentuk penafsiran sehingga dapat dinamakan sebagai fundamentalis sebagaimana pengertian dari Barat dan agama Kristen.

Memang dalam histori perkembangan Islam juga pernah ditemui berbagai pertikaian antar umat Islam yang disebabkan oleh perbedaaan mazhab yang bahkan beberapa diantaranya terus berlangsung hingga kini, misalnya antara Syiah dengan Sunni. Namun sebenarnya benih pertikaian itu tidaklah ditekarkan oleh umat Islam itu sendiri, tapi oleh orang-orang yang mengaku Islam dan merasuki umat Islam itu sendiri. Di antara mereka adalah kaum Majusiyyah, Sabaiyyah, Syu'ubiyyah, bahkan kaum Yahudi dan Nasrani telah mengambil peran besar dalam perpecahan umat Islam hingga sekarang. Seiiring berjalannya waktu, benih permusuhan tersebut semakin mengakar dalam hati kaum muslimin. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan Islam di berbagai wilayah yang selanjutnya jatuh ke tangan rezim kolonial Eropa seperti di Andalusia, Libanon, Aljazair, Tunisia, Palestina, Syria, dan sebagainya.⁷

⁶ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993 hal. 51

⁷ Mustofa Muhammad Asy Syakah. *Islam Tidak Bermazhab*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994 hal. 420

2.1.2 Fundamentalisme Islam dalam Tataran Praksis

Merunut pada sejarahnya, Azyumardi Azra menggambarkan perkembangan fundamentalisme Islam dengan membaginya dalam dua tahapan perkembangan yaitu fundamentalisme pra modern dan fundamentalisme kontemporer.⁸ Fundamentalisme Islam pra modern muncul pada awal-awal sejarah Islam itu sendiri. Gerakan ini diusung oleh kaum Khawarij yang muncul pada masa pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.

Kaum ini pada awalnya adalah pendukung khalifah Ali, terutama saat mereka (kekhalifahan Ali) terlibat konflik dengan Muawiyah. Namun, beberapa saat kemudian mereka justru memisahkan diri dari kelompok Ali dan tidak juga bergabung dengan kelompok Muawiyah. Mereka menganggap keduanya telah melanggar aturan-aturan dalam Islam. Kelompok inilah yang pertama kali mendeklarasikan Al Quran dan Islam sebagai ideologi resmi, sekaligus menentang interpretasi Al Quran yang dinamik yang dipelopori dan disimbolkan oleh Ali.⁹

Kelompok ini punya slogan yang sangat tegas yaitu, *lâ hukma illâ lillâh* (tidak ada hukum selain hukum Allah) dan *lâ hakama illâ Allâh* (tidak ada hakim selain Allah). Slogan tersebut merupakan elaborasi dari QS Al Maidah : 44 yang berbunyi : *wa man lam yahkum bimâ ânzallâh faulâika hum al-kâfirîn* (siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang ditentukan Allah, maka mereka adalah kafir).

Pandangan radikal mereka tersebut juga diwujudkan dalam sikap politik yang radikal pula. Misalnya, mereka menafsirkan tentang *amar ma'rûf nahi munkar* (menegakkan yang baik dan meninggalkan yang buruk), yang hanya bisa diwujudkan dengan pedang. Akibatnya, mereka berpandangan bahwa mereka yang tidak sepeham dengan mereka adalah golongan musyrik yang harus diperangi. Pada masa inilah muncul istilah *Dar al Islam* sebagai daerah yang harus dilindungi dan *Dar al Harb* sebagai daerah yang harus diperangi.

⁸ Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam*. dalam op. cit. Akhmad, Rumadi. Hal. 67 (buku sendiri)

⁹ Muhammad Mohaddessin, *Islamic Fundamentalism : The New Global Threat*. Washington DC : Seven Locks Press, 1993, hal. 4 dalam op. cit Syafiq Hasyim hal. 12

2.1.2 Fundamentalisme Islam dalam Tataran Praksis

Merunut pada sejarahnya, Azyumardi Azra menggambarkan perkembangan fundamentalisme Islam dengan membaginya dalam dua tahapan perkembangan yaitu fundamentalisme pra modern dan fundamentalisme kontemporer.⁸ Fundamentalisme Islam pra modern muncul pada awal-awal sejarah Islam itu sendiri. Gerakan ini diusung oleh kaum Khawarij yang muncul pada masa pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.

Kaum ini pada awalnya adalah pendukung khalifah Ali, terutama saat mereka (kekhalifahan Ali) terlibat konflik dengan Muawiyah. Namun, beberapa saat kemudian mereka justru memisahkan diri dari kelompok Ali dan tidak juga bergabung dengan kelompok Muawiyah. Mereka menganggap keduanya telah melanggar aturan-aturan dalam Islam. Kelompok inilah yang pertama kali mendeklarasikan Al Quran dan Islam sebagai ideologi resmi, sekaligus menentang interpretasi Al Quran yang dinamik yang dipelopori dan disimbolkan oleh Ali.⁹

Kelompok ini punya slogan yang sangat tegas yaitu, *lâ hukma illâ lillâh* (tidak ada hukum selain hukum Allah) dan *lâ hakama illâ Allâh* (tidak ada hakim selain Allah). Slogan tersebut merupakan elaborasi dari QS Al Maidah : 44 yang berbunyi : *wa man lam yahkum bimâ ânzallâh faulâika hum al-kâfirîn* (siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang ditentukan Allah, maka mereka adalah kafir).

Pandangan radikal mereka tersebut juga diwujudkan dalam sikap politik yang radikal pula. Misalnya, mereka menafsirkan tentang *amar ma'rûf nahi munkar* (menegakkan yang baik dan meninggalkan yang buruk), yang hanya bisa diwujudkan dengan pedang. Akibatnya, mereka berpandangan bahwa mereka yang tidak sepaham dengan mereka adalah golongan musyrik yang harus diperangi. Pada masa inilah muncul istilah *Dar al Islam* sebagai daerah yang harus dilindungi dan *Dar al Harb* sebagai daerah yang harus diperangi.

⁸ Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam*. dalam op. cit. Akhmad, Rumadi. Hal. 67 (buku sendiri)

⁹ Muhammad Mohaddessin, *Islamic Fundamentalism : The New Global Threat*. Washington DC : Seven Locks Press, 1993, hal. 4 dalam op. cit Syafiq Hasyim hal. 12

Pada perkembangan selanjutnya, bentuk fundamentalisme seperti ini mulai ditinggalkan. Memang di beberapa kawasan seperti di Oman dan Aljazair masih ditemukan keturunan dari kaum Khawarij ini, namun mereka tidak lagi seperti generasi awal. Generasi berikut dari Khawarij ini jauh lebih moderat dari pendahulunya.

Pada masa selanjutnya muncul gerakan Salafi yang oleh sebagian ahli justru disebut sebagai akar dari fundamentalisme masa sekarang. Salafi sendiri adalah gerakan yang meneruskan tradisi *salaf* (generasi awal) dari umat Islam, yang dihitung dari 400 tahun pertama dari masa Nabi Muhammad SAW. Ulama yang masuk kategori ini antara lain; Abu Hanifah, Hambali, Malik, dan Syafi'i.

Dasar dari gerakan ini adalah bahwa Islam tidak lagi dipahami secara benar sebagaimana pada masa Nabi. Salafi mengkampanyekan seruan dan ajakan untuk kembali lagi pada ortodoksi Syariah yang akan memurnikan Islam sesuai dengan Al Quran dan Al Hadits.

Gerakan ini awalnya dipelopori oleh Imam Hambali pada sekitar abad IV H, yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah pada abad VIII H, dan akhirnya dipertegas oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad XVIII H di semenanjung Arabia. Gerakan yang disebut terakhir inilah yang kemudian dikenal dengan nama Wahabi (Wahabbism).

Orientasi gerakan Wahabisme awalnya lebih kepada purifikasi ajaran Islam, terutama berkaitan dengan aqidah dan ibadah, namun kemudian berkembang jadi pemurnian Islam dan pembebasan masyarakat dari takhayul, bid'ah, dan kurafat yang pada saat itu sangat marak prakteknya di masyarakat terutama di semenanjung Arabia.

Masyarakat Arab pada saat itu, khususnya umat Islamnya, dinilai telah mengalami dekadensi moral yang cukup memprihatinkan dan telah menyimpang dari ajaran Islam yang asli. Hal ini karena pengaruh dari budaya lokal masyarakat Arab itu sendiri. Maka dari itu, Wahabi ingin memurnikan lagi ajaran dan praktek agama Islam seperti pada masa salaf dan yang sesuai dengan tuntunan Nabi serta membebaskan masyarakat dari praktek-praktek penyimpangan. Dengan

sikap seperti ini, menunjukkan bahwa orientasi gerakan ini adalah ke masa lalu (salaf) dimana Islam dipraktekkan secara benar.

Namun dalam gerakan ini terdapat juga prinsip-prinsip intoleransi, terutama dalam hal penafsiran teologis mereka. Dalam membina hubungan dengan non muslim, mereka berpijak pada ayat-ayat Al Qur'an yang menurut mereka memerintahkan untuk memerangi atau memusuhi kaum non muslim. Mereka menganggap bahwa jalan merekalah yang paling benar.

Di sisi lain, pada gerakan ini sendiri juga terdapat perbedaan dengan gerakan salafi sebelumnya yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini adalah media penyampaian ajarannya. Wahabi dalam menyampaikan ajarannya tidak hanya menggunakan metode "lama" Ibnu Taimiyah yaitu; media tulisan, mujadalah (dialog), maupun da'wah, tapi mereka juga menggunakan kekuatan pedang dan tentara.

Memang sebenarnya, pimpinan dari gerakan ini yaitu Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah seorang yang sangat fanatik sehingga mendorongnya untuk selalu terlibat konflik dan peperangan. Namun, ia adalah seorang ulama yang selalu dimusuhi sehingga mengharuskannya untuk mencari perlindungan. Hal ini kemudian bisa ia dapatkan dari seorang penguasa Dar'iyah, Muhammad bin Su'ud, yang sebenarnya juga merupakan pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Dengan bantuan dari Muhammad bin Su'ud, ajaran Wahabi bisa terus disebarkan. Orang-orang yang mau menerima ajakan dan ajarannya akan dimasukkan dalam barisannya. Sedangkan bagi mereka yang menolak ajakannya apalagi berani menentang dan melakukan perlawanan terhadapnya, maka ayunan pedanglah yang menjadi solusinya.¹⁰

Dalam sejarahnya, golongan ini pernah melakukan penghancuran besar-besaran terhadap yang mereka anggap sebagai "simbol kesesatan" umat Islam. Misalnya kuburan para wali yang sering dijadikan tempat pemujaan yang selanjutnya mereka ratakan dengan tanah dan hanya diberi tanda, begitu pula kubah-kubah sejarah Nabi dan Khulafaur Rasyidin, bahkan Raudah di masjid Nabipun tidak luput dari "pembersihan" yang mereka lakukan.

¹⁰ op. cit Mustofa Muhammad Asy Syakah. Hal. 393-395

Keadaan yang kontras ini kemudian menimbulkan gejala penetrasi nilai-nilai peradaban Barat ke dalam dunia Islam. Hal ini selanjutnya menimbulkan persoalan-persoalan baru yang kemudian menjadi perhatian dari golongan (fundamentalisme) Islam pada masa ini. *Pertama*, salah satu nilai dari peradaban Barat adalah sekularisme, yang memisahkan agama dari politik dan pemerintahan. Hal ini kemudian ditolak oleh golongan Fundamentalis Islam. Memang telah banyak negara Barat yang “sukses” dengan sekularisasinya, tapi bagi golongan ini hal tersebut merupakan bahaya bagi agama Islam yang merupakan pengatur utama dalam masalah duniawi maupun ukhrawi. *Kedua*, banyak umat Islam yang menghendaki agar masyarakat diperintah dan dituntun oleh Al Quran dan syariat Islam sebagai aturan hukum bernegara.¹¹ Kemunduran umat Islam sendiri sebenarnya tidak lepas dari kegagalan negara dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegaranya.

Modernisasi dan sekularisasi oleh peradaban Barat yang terjadi bersamaan dengan kemunduran dari peradaban Islam memang memberikan warna tersendiri dalam perkembangan fundamentalisme Islam. Modernisasi bagaimanapun telah memberikan bukti nyata dengan kemajuan pesat sains dan teknologi, namun di sisi lain kemajuan ini secara kualitatif berbeda dengan kemajuan yang pernah dicapai umat Islam pada masanya. Kemajuan ini membuat umat Islam seperti kehilangan jati diri dan menjadi canggung dalam melihat doktrin agamanya dimana pada satu sisi mereka percaya akan kebenaran dan kebesaran agamanya, tapi di sisi lain mereka juga menghadapi realita yang tidak sepenuhnya didasarkan pada spirit agama. Banyak kasus bahkan menunjukkan bahwa kemajuan juga dicapai dengan menjauhkan agama dari kehidupan publik melalui proses sekularisasi. Hal seperti ini menimbulkan *counter* dari umat Islam sebagai upaya mereka mempertahankan resistensinya yang mana ditunjukkan baik dengan sikap-sikap apologetik maupun dengan respon yang lebih rasional dengan tetap berpijak pada identitas keislamannya.

Sikap apologetik yang banyak dipraktekkan oleh umat Islam antara lain ditunjukkan dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Islam,

¹¹ Karen Armstrong. *Berperang Demi Tuhan*. Dalam op.cit Rumadi Akhmad. Hal. 69

baik dari aspek historisnya seperti masa kejayaan Islam yang telah berhasil menumbangkan dua peradaban terbesar dunia yaitu Romawi dan Persia, maupun dari aspek doktrinalnya yang mengagung-agungkan teks-teks suci Al Quran sebagai sumber kebenaran utama manusia. Sikap yang terkesan normatif, idealis, dan defensif terhadap “serbuan” tantangan, kritikan, dan ancaman dari luar. Sikap yang menunjukkan suatu upaya pembebasan diri dari sebuah situasi represif yang telah menyebabkan alienasi umat Islam dari doktrin agamanya. Situasi ini seperti yang digambarkan oleh Fukuyama, bahwa umat Islam merasa terancam dengan nilai-nilai Barat yang diimpor ke dunia Muslim dan ada perasaan betapa martabat mereka begitu terluka oleh kegagalannya untuk mempertahankan koherensi masyarakat tradisional santeri dan keberhasilan teknik dan nilai Barat yang masuk ke dalam dunia Islam, yang membuat umat Islam mengalami alienasi, anomic, minder, dan kecil hati.¹²

Sikap seperti di atas memang banyak ditunjukkan oleh gerakan fundamentalis Islam pada masa itu. Misalnya Ikhwanul Muslimin (1928) dibawah pimpinan Hasan Al Banna dan Sayyid Qutb dengan program “re-islamisasi”nya yang muncul sebagai dampak dari kekhawatiran atas pengaruh Barat. Begitu pula dengan gerakan MTI (*Mouvement de Tendance Islamique*) di Tunisia yang muncul karena kekhawatiran termarginalkannya agama dari masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang terlalu mengakomodasi sekularisme.

Dalam ranah politik, sikap penolakan terhadap modernisasi dan sekularisme juga diwujudkan dengan perjuangan menegakkan daulah Islamiyah (negara Islam). Menurut para fundamentalis, Islam merupakan agama yang paling mencakup terhadap semua sendi kehidupan, termasuk tata sosial politik masyarakat. Realitas yang terjadi sekarang, merosotnya iman masyarakat menyebabkan terjadinya kemunduran Islam, sehingga konstruksi ideal masyarakat Islami tidak terwujud. Maka dari itu, diperlukan gerakan untuk kembali kepada ajaran Islam yang asli dimana setelah individu telah Islami, maka masyarakatpun akan turut diatur secara Islami, selanjutnya formalisasi syariat Islam pada negara akan merupakan suatu keniscayaan, dan terwujudlah daulah Islamiyah. Setelah

¹² <http://oposan.itgo.com/ke dua.htm> diakses pada September 2004

daulah Islamiyah terbentuk maka dunia Islam akan bersatu dalam suatu kekhalifahan seperti pada zaman Nabi. Cita-cita politik demikian jelas merupakan counter terhadap sekularisasi yang memisahkan agama dan simbol-simbolnya dari ranah politik dan pemerintahan.

Dalam perkembangan selanjutnya beberapa golongan Islam ini berhasil (atau paling tidak hampir berhasil) mewujudkan cita-citanya tersebut, seperti misalnya Wahabi yang bisa mendominasi Saudi Arabia pada tahun 1970an, Ikhwanul Muslimin di Mesir menjadi kelompok yang paling diperhitungkan selama pemerintahan Husni Mubarak, FIS yang berhasil menjadi pemenang mutlak dalam pemilu 1990 di Aljazair, maupun Partai Refah di Turki yang mendapat perolehan suara signifikan pada pemilu 1995. Namun dibandingkan semua itu, keberhasilan dari fundamentalisme Islam yang paling fenomenal adalah saat Ayatullah Khomeini berhasil menumbangkan rezim Shah Reza Pahlevi dalam revolusi Iran 1979. Keberhasilan revolusi Iran ini merupakan poin tersendiri dari perkembangan fundamentalisme Islam dan perhatian Barat terhadapnya.

Perhatian pihak barat terhadap fundamentalisme Islam memang mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika global yang terjadi dan kepentingan aktual mereka terhadap fundamentalisme Islam itu sendiri. Pasca tragedi WTC 11 September 2001, nama fundamentalisme Islam seakan menggaung keseluruhan dunia seiring dengan isu dan kampanye global perang Barat terhadap aksi terorisme. Al Qaeda dengan Usama bin Laden-nya menjadi tersangka utama dari tragedi yang merenggut lebih dari 3000 nyawa manusia tersebut. Al Qaeda sendiri memang dicitrakan sebagai golongan fundamentalis Islam yang banyak mendukung aksi terorisme di berbagai negara seperti Irak, Kenya, maupun Afganistan.

Makna fundamentalisme Islam sendiri kini telah mengalami distorsi, pembiasan, dan perendahan (peyoratif), yang sesungguhnya berbeda dengan makna dan tujuan aslinya. Fundamentalisme Islam sekarang sering dikonotasikan negatif yang menimbulkan kesan-kesan tertentu seperti radikal, ekstrim, intoleran,

dan militan. Bahkan dalam prakteknya, golongan ini sering diidentikkan dengan aksi-aksi terorisme sebagai perwujudan dari keyakinan beragamanya.

Dalam perspektif Barat, sikap radikal dan militan yang ditunjukkan oleh golongan fundamentalisme Islam ini merupakan suatu permasalahan tersendiri yang membedakannya dari golongan Islam yang lebih moderat dan liberal. Penghayatan teologi skripturalistik oleh golongan ini berlanjut pada sikap militansi dalam beragama. Sikap yang menimbulkan dua keniscayaan ; positif dan negatif. Positif dalam artian orientasi ke dalam (*inward oriented*) dimana dalam memandang terhadap mereka yang sepaham adalah sebagai kawan, sehingga harus dilindungi dan dibela. Sementara dalam orientasi ke luar, ia akan bersikap negatif dengan memandang terhadap mereka yang tidak sepaham adalah sebagai musuh dan ancaman yang harus dihadapi. Dengan langgam seperti itu, maka perbedaan dan keragaman yang seharusnya menjadi kekayaan dan harmoni, di tangan kaum fundamentalis-militan ini berubah menjadi disharmoni.¹³

Radikalisme, militansi, dan fundamentalisme Islam juga dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan negara yang sekuler, liberal, dan demokratis. Fundamentalis Islam yang radikal selalu berupaya menyampaikan aspirasinya dengan membawa nama agama dan menghalalkan segala macam cara termasuk dengan berbagai tindak kekerasan yang bahkan terkadang memakan banyak korban yang tidak bersalah. Berbagai tindakan tersebut selalu dicari-cari pembedanya dalam teks-teks kitab suci maupun sunnah Nabi. Namun terkadang juga terdapat berbagai penyimpangan dari suatu usaha justifikasi tindakan mereka yang mana sebenarnya tidak jelas validitas dan reliabilitasnya. Sebagai contoh dari hal ini adalah fatwa masyhur dari Ayatollah Khomeini pada tanggal 14 Februari 1989, dimana ia menyediakan uang tunai 20 juta *tunans* (3 juta dollar) bagi orang Iran dan 1 juta dollar untuk orang non Iran yang berhasil membunuh Salman Rushdi sang penulis novel kontroversial *The Satanic Verses* (ayat-ayat Setan). Selain itu ia mengatakan bahwa sang pembunuh akan mendapatkan pahala di surga, dan jika terbunuh maka akan mendapat gelar mati

¹³ ibid.

secara *Shahid*.¹⁴ Fatwa ini jelas tidak dapat dipegang kebenarannya karena tidak jelas dasarnya baik jika dirujuk pada kitab suci Al Quran maupun Al Hadits Nabi.

Kemudian terhadap sekularisme, perkembangan fundamentalisme Islam juga dianggap sebagai suatu permasalahan terutama pada negara-negara yang selama ini memberlakukan prinsip sekularisme dalam politik dan pemerintahannya. Pada era modernisasi, negara-negara tersebut telah berhasil “memenjarakan” agama dalam ruangan privat yang mana sebelumnya merajalela di ruangan publik. Agama memang sempat begitu dominan dalam politik dan pemerintahan negara pada sekitar abad pertengahan, namun kemudian termarginalisasi oleh penerapan sekularisme dalam negara. Kini, agama seakan menemukan momentum kebangkitan kembali yang disimbolkan dengan munculnya fundamentalisme agama (Islam). Hal ini ternyata menjadi semacam ketakutan tersendiri pada negara-negara sekuler misalnya seperti kembalinya hegemoni agama dalam kedaulatan politik, kehidupan sipil, sampai kemungkinan terjadinya kembali konflik yang didasarkan pada penghayatan agama.

Berangkat dari hal-hal di atas, fundamentalisme Islam kini merupakan isu yang cukup penting di banyak negara. Terutama lagi setelah “disandingkannya” fundamentalisme Islam bersama aksi terorisme Internasional, fundamentalisme Islam menjadi semacam sosok yang menakutkan dan menjadi ancaman bagi keamanan dunia.

Di beberapa negara, hal ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap golongan-golongan Islam, terutama sekali yang mereka anggap fundamentalis. Kontroversi pelarangan jilbab dan simbol-simbol agama lainnya di Prancis, penggeledahan rumah-rumah warga muslim di Australia dan Inggris, hingga permasalahan antara Indonesia dan Singapura setelah tuduhan kontroversial Lee Kuan Yew bahwa Indonesia adalah sarang teroris, merupakan contoh nyata bahwa fundamentalisme Islam kini menjadi masalah internasional yang cukup serius.

¹⁴ Bernard Lewis. *The Crisis Of Islam*. Jakarta : Jawa Pos Press, 2004 Hal. 146

Bab III

Perspektif Amerika Serikat, Identitas Nasional, Dan Kepentingan Hegemoni Global

Munculnya fundamentalisme Islam sebagai sebuah permasalahan dan ancaman global baru merupakan hasil dari sebuah proses konstruksi sosial dari aktor hubungan internasional. Dalam hal ini, faktor internal dari aktor tersebutlah yang memainkan peran penting. Faktor tersebut adalah identitas nasionalnya, yang mana akan membentuk perspektifnya terhadap dunia lain di luar dirinya dan selanjutnya menentukan pula kepentingannya.

Banyak perspektif tentang dunia yang berkembang di kalangan pemikir Barat (termasuk di Amerika Serikat) yang cenderung memandang dan membagi dunia ini dalam dua kategori besar ; Barat (*The West*) dan “Dunia Lain” (*The Rest*). Kategorisasi ini sendiri tidak sepenuhnya didasarkan pada faktor geografis, tapi justru lebih ditekankan pada faktor-faktor non geografis seperti ekonomi, politik, maupun kebudayaan.

Dalam hal ini, Barat mengidentifikasikan dirinya sebagai peradaban dan kawasan yang lebih maju, sejahtera, dan dominan daripada “dunia lain”. Barat dianggap sebagai pemimpin dan determinan dari perkembangan peradaban dunia, dimana mereka menjadi semacam model atau *trendsetter* yang akan selalu diikuti oleh “dunia lain” sebagai kiblat perkembangan mereka sehingga nantinya bisa mencapai pada tingkatan yang lebih baik dan modern, meskipun hal ini tentunya juga didasarkan pada standar kualifikasi dari negara-negara yang telah modern tersebut (Barat).

Identitas seperti ini jelas akan menentukan pandangan mereka terhadap dunia lain. Dunia lain akan selalu dianggap sebagai pengekor dari superioritas yang Barat miliki. Dari sini selanjutnya akan membentuk struktur atau pola hubungan “antar peradaban” yang jelas tidak seimbang karena salah satu merasa lebih baik dari yang lain. Akibatnya, segala praktek hubungan yang dilakukan akan didasari perspektif seperti ini dan akan selalu berusaha mempertahankan pola *status quo* ini.

Hubungan intersivilisasional memang menempatkan Barat superordinat daripada peradaban “dunia lain”. Dalam tataran praksisnya, contoh nyata dominasi peradaban Barat terhadap “dunia lain” bisa kita lihat dalam dinamika hubungan internasional. Konsep peradaban selalu diidentikkan dengan peradaban modern Barat, hukum Internasional adalah hukum dari tradisi Grotius yang merupakan ahli hukum dari Barat, begitu pula sistem internasional yang diadopsi dari sistem Westphalia Barat. Hubungan seperti ini pernah digambarkan oleh Samuel P. Huntington dalam sebuah seminarnya;

*“The most important axis in the world politics will be the relations between The West and The Rest, as The West attempts to impose its values and culture, on the other societies it's declining ability to do so.”*¹

(poros paling penting dalam politik dunia adalah hubungan antara Barat dengan “dunia lainnya”, sebagaimana Barat berusaha menyebarkan nilai-nilai dan kebudayaannya, pada masyarakat lain adalah kemampuan yang tidak mungkin untuk melakukan hal sedemikian (seperti yang dilakukan Barat).

Hal di atas dengan jelas menggambarkan rasa superioritas yang dimiliki oleh Barat. Lebih jauh tentang hal ini, pada bagian kata pengantar dalam buku *Islam dan Peradaban Dunia*, Nurcholis Madjid mengutip pandangan Max Dimont yang menyatakan bahwa Barat menderita semacam penyakit psikologis yang disebut narcisisme. Mereka mengagumi diri sendiri dan kurang mau mengakui hutang budayanya pada bangsa-bangsa lain. Mereka menyatakan bahwa yang mereka dapatkan saat ini adalah warisan dari peradaban Yunani dan Romawi.² Meskipun cara pandang seperti ini sering mendapat kritikan, tapi masih saja terimplementasikan dalam tataran kehidupan –baik bidang politik, sosial, maupun budaya- masyarakat Barat.

¹ Samuel P. Huntington,” Keynote Address: Colorado College’s Symposium. Disampaikan di Colorado College pada 4 Feburari 1999. dalam Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. *Satu Dasawarsa The Clash Of Civilizations*. Jogjakarta : Ar Ruzz Press, 2003 hal.41

² W. Montgomery Watt. *Islam dan Peradaban Dunia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997 hal.xi

Barat akan selalu berpikir dan bertindak atas identitas yang melekat pada diri mereka sebagai bangsa yang paling maju. Dengan pandangan seperti ini maka “dunia lainnya” otomatis akan menjadi sub-ordinat dan juga target mereka. Dunia lain hanya akan menjadi objek permainan yang dibungkus dengan kedok “perkembangan peradaban” yang ditentukan alur dan aturannya oleh Barat. Hal ini sendiri jelas ditujukan untuk menjamin *status quo* akan posisi superior Barat.

Secara lebih khusus, hal seperti ini bisa kita lihat pada AS -yang dalam tulisan ini memang penulis angkat sebagai representasi dari Barat- dimana seperti yang diutarakan oleh Thomas Eliot, seorang Profesor Ilmu Politik, dari University of Wisconsin, bahwa orang Amerika selalu merasa bahwa mereka merupakan contoh yang baik dan patut diikuti oleh negara “dunia lain”.³

Rasa superioritas tersebut merupakan cerminan dari identitas nasional AS sebagai negara besar, maju, pemimpin, baik, dan patut dicontoh. Hal inilah yang mendasari bagaimana kemudian AS melaksanakan politik luar negerinya. Mantan Menlu AS, Warren Christopher pernah mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang utama dianut AS atas kebijakan luar negerinya adalah ;

1. Mempertahankan kepemimpinan global atas politik, keamanan, dan ekonomi.
2. Mempertahankan pola interaksi konstruktif dengan negara kuat lainnya.
3. Memperkuat berbagai institusi internasional sebagai mekanisme penyelesaian masalah secara damai.
4. Perluasan nilai-nilai demokrasi sebagai prasyarat bagi perdamaian internasional.⁴

Hal di atas memang menyiratkan bagaimana AS memandang dirinya dan hubungan internasionalnya. AS merasa bahwa ia adalah negara yang memimpin (*leading state*) dan paling bertanggungjawab terhadap perkembangan dunia. AS merasa bahwa ia harus memiliki peranan global yang utama dan sebagai

³ Thomas G. Elliot. *Governing America*. New York: Dodd Mead Company, 1962. hal.

⁴ Y. Windradi Warastuti. *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap China Masa Pemerintahan W.J. Clinton*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2001. hal. 32

mainstream yang harus diikuti oleh negara-negara lain. Maka dari itu, nilai-nilai peradaban AS harus menjadi model bagi negara lain yang mana hal ini ditujukan bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Identitas seperti ini mendorong AS untuk selalu berupaya menyebarkan nilai-nilai peradabannya terutama kepada negara yang termasuk dalam kategori “dunia lain”. Demokrasi, sekularisme, maupun liberalisasi ekonomi, yang merupakan produk-produk peradaban Barat, menjadi semacam menu wajib yang harus dimiliki oleh negara-negara tersebut. Meskipun dalam realitasnya, hal ini sendiri bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak, dimana sebenarnya “impor nilai” tersebut masih disesuaikan dengan pertimbangan kepentingan nasional AS, terutama yang berkaitan dengan negara tersebut. Jadi, bisa saja suatu negara pada saat ini didoktrin dengan nilai-nilai peradaban AS sementara negara lainnya tidak, begitu juga sebaliknya, tergantung kepentingan aktual AS pada saat itu. Sebagai contoh bisa dilihat dari kebijakan luar negeri AS yang keras terhadap Irak dan sikap lebih lunak terhadap Arab Saudi tentang demokratisasi, meskipun kedua negara tersebut sebenarnya sama-sama di bawah rezim yang otoriter.

Tindakan semacam itu memang dilakukan AS untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya. Dengan melakukan penetrasi nilai-nilainya di negara lain, maka akan memudahkan AS untuk mengontrol negara tersebut, dan pada akhirnya semakin memperkuat kekuatan hegemoni globalnya. Secara lebih gamblang, dengan mengutip Huntington, Kamaruzzaman menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan AS untuk menguasai negara-negara “dunia lain” sekaligus memperkuat hegemoninya;

- Menekan negara-negara lain agar mengadopsi nilai-nilai AS dan melakukannya sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan demokrasi, mencegah negara lain mendapatkan kemampuan militer yang dapat menandingi superioritas konvensional AS.

(to pressure other countries to adopt American values and practises regarding human rights and democracy, to prevent other countries acquiring military capabilities that would counter American conventional superiority).

- ❶ Menjalankan hukum Amerika ekstrateritorial ke masyarakat lain.
(*to enforce American Law extraterritorially in other societies*).
- ❷ Menggolongkan negara-negara menurut kepatuhan mereka kepada segala sesuatu menurut standar AS dalam HAM, obat-obatan, terorisme, proliferasi nuklir, peluru kendali, dan sekarang sangat memungkinkan kebebasan beragama.
(*to grade countries according to their adherence to American standards to human rights, drugs, terrorism, nuclear proliferation, missile proliferation, and now, quite possibly, religious freedom*).
- ❸ Menerapkan sanksi bagi negara-negara yang tidak mematuhi standar AS dan bidang-bidang tersebut dan isu-isu lainnya.
(*to apply sanctions against countries that do not meet American standards on those and other issues*).
- ❹ Memperkenalkan kepentingan-kepentingan perusahaan AS di bawah slogan perdagangan bebas dan pasar terbuka.
(*to promote American corporate interest under the slogans of free trade and open market*).
- ❺ Menentukan kebijakan Bank Dunia dan IMF untuk menjalankan kepentingan-kepentingan perusahaan tersebut.
(*to shape World Bank and IMF policies to serve those same corporates interest*).
- ❻ Mempengaruhi negara-negara lain untuk mengadopsi kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat menguntungkan kepentingan ekonomi AS.
(*to bludge on other countries to adopt economic policies and social policies that will benefit American economic interests*).
- ❼ Memperkenalkan senjata-senjata AS ke seluruh dunia untuk mencegah negara-negara lain melakukan hal yang sama.
(*to promote American arms sales abroad while attempting to prevent comparable sales by other countries*).
- ❽ Menekan Sekretaris Jenderal PBB dan mengontrol penunjukan penerusnya.

(to force out on UN Secretary General and to dictate the appointmet of his successor).

- ❶ Mengembangkan NATO sampai Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko, dan tidak ada yang lain untuk saat ini.

(to expand NATO to include Poland, Hungary, and The Czech Republic and no one else at this time).

- ❷ Ancaman aksi militer untuk terhadap Irak dan menjalankan sanksi ekonomi terhadap Irak.

(the threaten military actions against Iraq and prevent the easing of economic sanctions against Iraq).

- ❸ Menggolongkan beberapa negara sebagai “negara-negara pembangkang” dan berusaha melarang mereka masuk ke dalam lembaga-lembaga dan ekonomi global sebab mereka menolak untuk menjilat terhadap keinginan AS.

(to categorize some countries as “rogue states” and attempt to exclude them from global institutions and the global economy because they refuse to kowtow to american wishes).⁵

Hal tersebut di atas memang dilakukan AS sebagai upaya mencapai berbagai kepentingan nasionalnya, termasuk kepentingan hegemoni globalnya. Khusus untuk hegemoni global sendiri, hal tersebut merupakan kepentingan yang sudah ada sejak lama dan “diwariskan” turun-temurun dari generasi ke generasi. Kepentingan ini sendiri sebenarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dan identitas nasional AS. Identitas yang meyakini bahwa AS adalah sebuah negara besar, terhormat, maju, dan dominan di belahan bumi barat.⁶

⁵ Samuel P Huntington. *Global Perspective on War and Peace or Transiting a Uni-Multiipolar World*. Bradley Lecture Series, American Enterprise Institute. 1998. dalam op.cit Kamaruzzaman, hal.44

⁶ James Cache. *Imperial America and The Common Interest..* Worldpolicy.org/journal/articles/wpj02-1/chace.html dalam Yanti Rahmawati. *Berlanjutnya Simbolisasi Negara Pembangkang oleh AS terhadap Kuba Pasca Perang Dingin*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember,2004 hal.

Lebih lanjut James Cache juga menambahkan bahwa selain ditakdirkan sebagai negara besar, AS juga memiliki misi suci layaknya seorang nabi (*messtianic mission*). Tugas utama yang diemban AS dalam misi ini adalah untuk menyelamatkan dunia. Keyakinan seperti inilah yang kemudian mengilhami terbentuknya identitas AS yang lain yaitu sebagai *good power* (kekuatan baik) yang

3.1 Perspektif Amerika Serikat Terhadap Islam

Perspektif AS terhadap Islam sebenarnya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari perspektif AS terhadap dunia secara keseluruhan. Perspektif AS melalui dikotomi “*the West*” dan “*the Rest*”, maupun “*Occident*” dan “*Orient*”, selalu menempatkan dirinya berseberangan dengan Islam. AS selalu merasa dirinya sebagai bagian bahkan pemimpin dari “*The West*” dan “*Occident*” yang menguasai dunia, sedangkan Islam dianggap sebagai bagian integral dari “*The Rest*” ataupun “*Orient*” sebagai golongan yang dikuasai, dipengaruhi, dan ditentukan oleh kekuatan “*The West*” ataupun “*Occident*” itu sendiri.⁷

Hal tersebut memberikan gambaran kasar tentang pandangan AS terhadap Islam. Pandangan yang sebenarnya terbangun dari identitas bangsa AS sendiri yang selalu merasa dirinya sebagai superior. Meskipun di sisi lain hal ini tidak mewakili keseluruhan pandangan kalangan Barat maupun AS sendiri terhadap Islam. Masih banyak para ahli yang menentang perspektif seperti ini, dan mencoba melihat dengan perspektif lain yang lebih akomodatif dan menghindari hal-hal konfrontatif.

Identifikasi Islam sebagai suatu peradaban yang buruk memang lebih mudah terjadi di negara-negara Barat yang di sisi lain mengidentifikasi diri mereka sebagai wujud peradaban yang terbaik. Karena itu, peradaban lain selain mereka jelas dianggap inferior, termasuk Islam. Hal ini jelas akan membentuk perspektif negatif dari Barat terhadap Islam.

Di kalangan intelektual AS seperti Bernard Lewis maupun Samuel Huntington, Islam memang dipandang dalam stereotip negatif. Islam dianggap sebagai suatu bentuk keyakinan religius yang bertentangan dengan nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan sekularisme. Lebih lanjut Islam juga dianggap sebagai ancaman terhadap Barat itu sendiri, karena gerakan anti Barat memang

bertugas melindungi dunia dari *evil power* (kekuatan jahat) yang tentunya juga dikonstruksikan berdasarkan identitas nasional dan kepentingan AS sendiri.

⁷ Dikotomi ini penulis ambil dari beberapa sumber. Untuk *Orient dan Occident* penulis ambil dari Edward W. Said. *Orientalisme*. Bandung, Penerbit Pustaka :1996, sedangkan *The West dan The Rest* penulis ambil dari Samuel Huntington. *Benturan AntarPeradaban*. Yogyakarta: Qalam, 2003

paling banyak muncul dari kalangan Islam. Banyak analis kebijakan luar negeri AS yang memunculkan Islam sebagai pengganti dari komunisme sebagai sebuah ancaman terhadap AS pada masa pasca perang dingin.⁸ Oleh mereka, gerakan Islam dipandang sebagai pergerakan yang agresif, yang anti terhadap Barat pada umumnya, dan anti AS pada khususnya. Pemikiran seperti ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah hubungan antara Barat dengan Islam yang kemudian menghasilkan perspektif buruk Barat terhadap Islam.

Menurut Ibrahim Abu Khalid dalam artikelnya yang berjudul *The Green Threat, or Green Savior?*, banyak faktor yang mendorong dan melatarbelakangi terbentuknya perspektif negatif negara Barat seperti AS terhadap Islam yang kemudian memunculkan Islam sebagai ancaman (*The Green Threat*) dan mempengaruhi berbagai kebijakan negara tersebut terhadap Islam.

Perspektif dan sikap negatif Barat dan AS terhadap Islam sebenarnya merupakan hasil dari berabad-abad proses kesalahpahaman, propaganda, dan ketakutan, yang telah muncul dan berkembang seiring perjalanan sejarah. Proses penyebaran nilai-nilai negatif terhadap Islam telah dilakukan melalui berbagai media seperti literatur, cerita rakyat (*folklore*), pendidikan, media cetak, media audio dan audio-visual, maupun dalam kebijakan politik domestik dan luar negeri.⁹

Sejak konflik perang salib, sekitar abad XI, kebencian Barat terhadap Islam telah muncul dan berkembang yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan citra miring dan stereotipikal terhadap Islam, yang mereka anggap sebagai musuh peradaban.¹⁰ Upaya pendeskriditan Islampun dimulai dengan pencitraan Islam sebagai golongan haus darah, militan, barbar, dan merupakan ancaman terhadap dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk memunculkan citra negatif Islam ini. Penguasaan Barat atas media menjadi faktor signifikan dalam hal ini sebagai instrumen propaganda dari negara-negara Barat (termasuk AS)

⁸ Nizar Messari. *Identity And Foreign Policy :The Case Of Islam In US Foreign Policy*. Judul jurnal dan penerbit tidak diketahui. Hal. 237

⁹ Ibrahim Abu Khalid. *The Green Threat Or Green Saviour?*. Dalam <http://www.islam.org.au/articles/24/cover.htm> diakses pada April 2005

¹⁰ Karen Armstrong. *Islam Sejarah Singkat*. Yogyakarta : Jendela, 2003.

untuk mendeskreditkan Islam sekaligus untuk memunculkan identitas Barat maupun AS sebagai peradaban dan negara – berdasarkan standarisasi mereka yang baik. Jadi, keseluruhan proses di atas sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk membentuk persepsi negatif tentang Islam sendiri, tapi di sisi lain juga merupakan upaya dari negara-negara Barat seperti AS dalam rangka mereproduksi kembali identitas mereka sebagai peradaban terbaik di muka bumi.

Selain itu, upaya-upaya perusakan citra Islam juga dilakukan dengan pembiasan makna Al Quran dan Al Hadits. Pada artikel yang sama, Ibrahim Abu Khalid, juga mencatat bahwa sejak 1142 oleh Robert Ketton yang kemudian dilanjutkan oleh George Sale (1734), Rodwell (1861), Palmer (1880), dan Wherry (1882), dilakukan berbagai aksi penafsiran teks-teks Al Quran dan kemudian dibiaskan dengan makna-makna yang konyol selanjutnya dilampirkan berbagai *footnotes*. Hal ini tidak hanya merusak makna asli dari Al Quran tersebut, tapi juga mendeskreditkan Islam sebagai suatu agama.¹¹ Begitu juga yang mereka lakukan terhadap Al Hadits dengan merusak makna hadits-hadits shahih dan bahkan mereka juga membuat hadits-hadits palsu. Mereka juga mengkritisi dua sumber kebenaran utama umat muslim tersebut dengan sudut pandang Injil yang mereka anggap sebagai sumber kebenaran. Hasil dari berbagai upaya yang mereka lakukan tersebut kemudian mereka ajarkan pada berbagai lembaga pendidikan, yang selanjutnya nanti menghasilkan para “ahli Islam” yang justru tampil menghujat Islam.

Para “ahli Islam” hasil didikan dengan literatur yang mendiskreditkan Islam tersebut selanjutnya muncul dengan berbagai pemikiran negatif tentang Islam. Mereka seringkali memperbandingkan Islam dengan peradaban Barat. Hasilnya, wacana yang berkembang makin menenggelamkan Islam dalam superioritas Barat. Upaya seperti ini sering mendapat kritikan karena memang masih sangat lemah validitasnya baik dari sudut pandang akademis maupun praksis empirik. Seorang akademisi, Nizar Messari, mengomentari “pembenturan” antara Islam dengan Barat ataupun AS sebagai suatu perbandingan yang sangat lemah keabsahannya. Dari tinjauan akademik, perbandingan antara Islam sebagai

¹¹ op cit. Ibrahim Abu Khalid.

suatu agama dengan Barat sebagai suatu peradaban bukanlah hal yang sebanding. Perbandingan hanya bisa dilakukan jika faktor-faktor pembanding tersebut benar-benar dalam keadaan yang “sebanding”.¹²

Namun yang jelas, terlepas dari sudut pandang akademis di atas, pada kenyataannya hingga kini negara-negara Barat masih bisa mempertahankan identitas mereka sebagai peradaban terbaik dan patut dicontoh dengan menempatkan peradaban lain (termasuk Islam) dalam posisi inferior. Selain itu, pemikiran para ahli-ahli tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap berbagai kebijakan negara Barat terhadap Islam. ide-ide mereka banyak yang menjadi “pedoman” dan sekaligus “justifikasi ilmiah” bagi berbagai kebijakan negara-negara Barat terhadap Islam.

3.2 Identitas Nasional Amerika Serikat Sebagai *The Good Power*

Dalam tradisi budaya politik AS, hubungan internasional selalu dipandang sebagai perjuangan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat (*forces of good and evil*).¹³ AS dalam hal ini selalu memosisikan dirinya sebagai kekuatan baik yang punya tugas suci dalam melindungi dunia dari berbagai kekuatan jahat. Sehingga, dalam hal ini berarti “kebaikan” yang dimiliki AS tidak hanya ditujukan untuk dirinya sendiri, tapi juga disebarkan ke seluruh dunia. Hal ini sebenarnya juga tidak lepas dari rasa superioritas yang dimiliki AS, yang merasa bahwa dirinya adalah negara yang paling baik, terhormat, maju, dan patut untuk dicontoh oleh negara-negara lainnya.

AS yang mengidentikkan dirinya sebagai kekuatan baik (bagi dirinya sendiri maupun seluruh dunia) kemudian akan terus berusaha mempertahankan dan mereproduksi identitas nasionalnya tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena identitas nasional tersebut akan sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan kebijakan politik yang diambil AS, sekaligus pula dalam hubungannya dengan dunia internasional.

¹² Op cit. Nizar Messari

¹³ Robert S. Litwak. *What's in A Name? The Changing Foreign Policy Lexicon*. Journal Of International Affairs. Tempat dan Tahun penerbitan tidak diketahui. Hal. 379

Berbagai upaya memang telah dilakukan oleh AS untuk memperkokoh identitas nasionalnya tersebut. Misalnya pasca perang dunia (sebelum itu AS lebih menutup diri dari pergolakan politik dan keamanan dunia) dimana AS mulai aktif dalam perkembangan dunia. AS mencoba memainkan peranan global yang lebih. Hubungan dengan negara lain pun dibina, namun tetap didasarkan pada identitasnya sebagai kekuatan baik. Hal ini selanjutnya berdampak pada berbagai kebijakan yang dilakukan AS, yang mana ditujukan untuk mempertahankan identitasnya tersebut.

AS berusaha mencitrakan dirinya sebagai kekuatan yang baik, dan untuk itu ia juga membutuhkan musuh yang dianggap sebagai kekuatan jahat. Hal seperti ini misalnya ketika AS menuduh US tidak mengindahkan kesepakatan internasional karena menolak untuk menarik mundur pasukannya dari Iran pada Maret 1946. Padahal sesuai Konferensi London pada September 1945, Sovyet harus menarik mundur semua pasukannya.¹⁴ Tingkah laku Sovyet yang dinilai buruk ini kemudian disikapi oleh AS yang berusaha menjadi kekuatan baik untuk menegakkan hukum internasional (Konferensi London) sekaligus sebagai pembela bagi kebebasan. Dengan dukungan negara-negara Eropa Barat, akhirnya Sovyet bersedia menarik pasukannya beberapa waktu kemudian.

Pasca mundurnya Sovyet, justru AS yang “masuk” ke Iran. AS mengadakan hubungan kerjasama pertahanan dengan Iran. Ini menunjukkan bahwa AS berusaha memunculkan kesan “baik”, meskipun hal ini sebenarnya tidak lebih dari upaya AS dalam pembendungan penyebaran komunisme. Rezim Shah Iran menjadi sahabat dekat AS di kawasan Timur Tengah, hingga terjadinya revolusi pada 1979.

Pasca keruntuhan Sovyet, AS menjadi satu-satunya *superpower*. Namun di sini, AS juga harus lihai dalam memainkan posisi strategisnya ini. Meskipun kini AS berada pada posisi puncaknya, ia harus tetap membina hubungan baik dengan negara-negara lainnya. Artinya, identitas AS sebagai *good power* harus tetap dipertahankan. Hal ini sendiri juga ditujukan untuk menghindari timbulnya rasa kekhawatiran global atas superioritas AS ini.

Untuk itu AS harus tetap membina hubungan dengan negara-negara lain dan tetap memainkan peranan globalnya. Meskipun semua itu masih sangat ditentukan oleh pertimbangan strategis AS untuk mencapai berbagai kepentingannya.

Hal seperti ini terlihat misalnya dalam hubungan antara AS dengan dunia Islam, dimana AS menerapkan standar ganda terhadap berbagai negara maupun kelompok-kelompok Islam. Terdapat perbedaan antara perspektif AS dengan kebijakan resminya terhadap Islam yang selalu didasarkan pada pembagian Islam atas moderat dan fundamentalis-radikal. Meskipun pengelompokan Islam atas dikotomi ini sangat subyektif dan lebih ditentukan oleh standarisasi “kepatuhan” mereka terhadap AS.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, AS memandang Islam dalam perspektif negatif sebagai sebuah agama yang militan, intoleran, dan radikal. Selain itu Islam juga dianggap sebagai anti Barat dan nilai-nilai peradabannya seperti demokrasi dan sekularisme.

Stereotip negatif terhadap Islam memang sudah berkembang di dunia Barat, khususnya AS. Oleh beberapa ahli, stereotip seperti itu diyakini berdampak pula pada kebijakan politik AS terhadap Islam selama ini. Kebijakan AS yang sering menyudutkan Islam (misalnya dengan tudingan aksi terorisme) dinilai sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan negatif mereka terhadap Islam tersebut. Hal ini sendiri seringkali menimbulkan konflik emosional antara golongan Islam dengan AS.

Meskipun memandang Islam secara negatif, namun konflik *vis-à-vis* antara Islam dengan AS ini sebenarnya bukanlah hal yang diinginkan oleh AS sendiri. AS juga menghindari konflik langsung dengan Islam sebagai salah satu entitas religi terbesar dunia. Apalagi citra AS sebenarnya tidak begitu bagus di kalangan Islam, terutama menyangkut masalah konflik Israel –Palestina dimana AS dinilai berat sebelah dan lebih akomodatif terhadap kepentingan Israel daripada Palestina. Untuk itu, berkali-kali AS melalui pernyataan resmi pemerintahnya mencoba mengklarifikasi bahwa AS tidak berhadapan dengan Islam.

¹⁴ Ambarman, *Pakta Warsawa & Comecon*. Bandung : Alumni. 1979 hal.xii

Pada pernyataan resminya, pemerintah AS berusaha mengembangkan sikap toleransi dan respek terhadap Islam. Islam sebagai suatu agama tetap dianggap sebagai ajaran yang baik dan mengajarkan kebaikan kepada penganutnya. Dalam hal ini AS dan Islam dikonstruksikan sebagai sesuatu yang “baik” bagi dunia.

Namun di sisi lain, AS dengan cerdas juga memainkan “kartu” yang baru dengan memunculkan ikon baru yaitu fundamentalisme Islam yang dicitrakan sebagai gerakan radikal dan ekstrim yang selanjutnya dikonstruksikan sebagai ancaman, tidak hanya bagi AS dan Barat, tapi juga bagi seluruh dunia, termasuk bagi Islam itu sendiri.

Di sini AS memainkan teknik propaganda yang disebut oleh K.J. Holsti sebagai teknik Kambing Hitam Frustrasi.¹⁵ Dalam hal ini, AS menciptakan kambing hitam sebagai sasaran pelampiasan emosi baru, yang dianggap sebagai musuh bersama. Fundamentalisme Islam-lah “terpilih” untuk dicitrakan sebagai musuh bersama tersebut. Dengan teknik ini, AS dapat mengubah dan mengarahkan persepsi umat Islam sekaligus menghindari konfrontasi langsung antara Islam dengan AS.

Dalam pernyataan resminya, Mantan Presiden Bill Clinton pernah menyatakan ;

*America refuses that our civilizations must collide. We respect Islam.....but in the middle east and elsewhere across the world, the United States sees a contest between the forces that transcend civilization- a contest between tyranny and freedom, terror and security, bigotry and tolerance, isolation and openness. It is the age old-struggle between fear and hope.*¹⁶

(Amerika menolak bahwa peradaban kita (AS dan Islam) harus bertabrakan. Kami menghormati Islam.....tapi di Timur Tengah dan

¹⁵ Kategorisasi ini sendiri diperoleh dari Alfred McClung Lee and Elizabeth B. Lee. *The fine Art of Propaganda : A Study of Fahther Coughin's Speeches*. New York : Harcart Brace Jovanovich, 1939. p.22-25 dalam K. J. Holsti. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analsis*. Jakarta: Erlangga. 1988 hal. 221

¹⁶op.cit Nizar Messari hal. 238

di mana saja di seluruh dunia, AS melihat sebuah kontes antara kekuatan yang melampaui peradaban. Sebuah kontes antara tirani dan kebebasan, teror dan keamanan, kefanatikan dan toleransi, isolasi dan keterbukaan. Ini adalah zaman perjuangan antara ketakutan dan harapan.)

Pernyataan lain yang menguatkan hal di atas dikemukakan oleh Anthony Lake, Penasihat Keamanan Nasional AS, pada masa pemerintahan Clinton waktu itu yang mengomentari tentang perkembangan gerakan Islam. Menurutnya ;

*No, it (islamic movements) runs instead between oppression and responsive government, between isolation and openness, between moderation and extremism...our foe is oppression and extremism, whether in religious or secular guise. We draw the line against those who seek to advance their agenda through terror, intolerance, and coercion...there is no doubt (that) Islamic extremism poses a threat to our nation's interest. (emphasis added)*¹⁷

(Tidak, hal itu (pergerakan Islam) berlangsung malahan di antara pemerintahan yang responsif dan penindasan, antara isolasi dan keterbukaan, antara kemoderatan dan ekstrimisme.....musuh kita adalah penindasan dan ekstrimisme, apakah dalam samaran religius ataupun sekular. Kita bersiap menghadapi mereka yang mencoba mencapai kepentingannya melalui teror, intoleransi, dan kekerasan.....tidak diragukan lagi bahwa ekstrimisme Islam memiliki sebuah ancaman terhadap kepentingan bangsa kita)

Dari kutipan pernyataan kedua tokoh tersebut, berarti AS kini sedang memainkan langkah penting dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Pertama, dengan memunculkan ikon baru fundamentalisme Islam (yang radikal dan ekstrim) tersebut, AS tetap bisa menjaga hubungan baik dan menghindari konflik langsung dengan umat Islam secara keseluruhan. AS mencitrakan diri sebagai sebuah kekuatan baik yang sedang menghadapi kekuatan jahat dari radikalisme dan ekstrimisme golongan Islam fundamentalis, yang mana dalam hal ini menghadirkan ancaman tidak hanya kepada AS sendiri tapi juga umat Islam dan

seluruh dunia. Hal ini merupakan implementasi dari identitas nasional AS sendiri sebagai negara *good power* (kekuatan baik). Seperti diungkapkan James Cache sebelumnya bahwa AS mengidentikkan dirinya tidak hanya sebagai sebuah negara besar, tapi juga negara yang baik, dengan misi suci untuk menyelamatkan dunia.¹⁸

Identitas ini sangat penting bagi AS, dan sudah “dipelihara” sejak dahulu. Identitas yang juga terbangun dari budaya politik AS yang memandang hubungan internasional sebagai perjuangan moral antara kekuatan baik melawan kekuatan jahat.¹⁹ Identitas yang akan selalu dipertahankan oleh AS melalui berbagai kebijakan dalam dan luar negerinya. Seperti ketika masa perang dingin, AS juga berusaha mendapatkan dukungan dan legitimasi global terhadap perangnya melawan komunisme Sovyet melalui berbagai propaganda yang menyiarkan kebaikan-kebaikan dari AS dan nilai-nilai peradabannya, sementara di sisi lain ia juga mewacanakan adanya ancaman global dari ideologi komunisme yang diusung oleh “si jahat” Sovyet dan blok timurnya. Seperti diungkapkan presiden AS waktu itu, Dwight Eisenhower pada sambutan pelantikannya ;

*Forces of good and evil are massed and armed and opposed rarely before in history. Freedom is pitted against slavery. Lightness against dark.*²⁰

(Kekuatan baik dan kekuatan jahat telah dikumpulkan dan dipersenjatai dan bertentangan yang sebelumnya jarang terjadi dalam sejarah. Kebebasan melawan perbudakan. Cahaya melawan gelap.)

Kedua, dengan mengklasifikasikan umat Islam ke dalam Islam fundamentalis dan Islam yang “baik”, justru akan mempermudah AS dalam upayanya dalam memperkuat kekuatan hegemoni globalnya, khususnya atas golongan Islam. Islam diklasifikasikan pada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan standarisasi yang telah ditentukan oleh AS. Masing-masing dari kelompok Islam tersebut akan mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Pada kelompok yang moderat dan akomodatif akan mendapat banyak dukungan dari AS, misalnya bantuan finansial pembangunan seperti yang diterima Arab Saudi.

¹⁷ ibid. hal.239

¹⁸ loc cit. Yanti Rahmawati

¹⁹ loc cit. Robert S. Litwak

²⁰ *An Outline of American History*. United States Information Agency. 1994 hal. 289

Sedangkan pada kelompok radikal fundamentalis, justru akan mendapat perlakuan yang buruk, seperti sanksi atau embargo yang diberikan kepada Iran.. Namun yang jelas, sikap yang “baik” maupun “buruk” yang diberikan AS kepada kelompok Islam moderat dan fundamentalis tersebut, keduanya sebenarnya tidaklah dilakukan dengan “tulus”. Jelas, ada *hidden agenda* di balik sikap AS tersebut..

Sejauh ini, tampaknya upaya AS dalam memecah belah golongan Islam ini bisa dikatakan cukup berhasil. AS mampu memainkan opini global tentang adanya golongan Islam fundamentalis yang radikal, ekstrim, intoleran, militan, dan berpotensi sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Dunia Islam pun tampaknya ikut terbawa arus pemikiran AS ini, sebagai contoh bisa dilihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sekalipun seperti Indonesia. Wacana dan stereotip negatif tentang keberadaan golongan fundamentalisme Islam berkembang pesat. Terlebih akhir-akhir ini Indonesia sering mendapat aksi teror bom dari sekelompok orang yang dinilai sebagai jaringan organisasi terorisme internasional yang menganut paham fundamentalisme Islam. Beberapa kelompok Islam pun saling tuduh, terutama mereka yang liberal dan moderat dengan mereka yang tergolong (atau digolongkan sebagai) fundamentalis.

3.3. Identitas AS Sebagai Negara Hegemon Dan *Global Super Power*

Perang Dunia II yang terjadi pada 1939-1945 telah mengubah secara drastis konstelasi politik keamanan dunia. Perang tersebut telah menimbulkan pergeseran kekuatan hegemonik dari Eropa ke Amerika. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, maupun Italia yang sebelumnya mendominasi dunia dengan kolonialisme dan imperialismenya kemudian menjadi kolaps pasca perang yang telah meluluhlantakkan benua biru tersebut. Keruntuhan Eropa juga menjadi awal munculnya kekuatan hegemonik baru, yaitu AS.

Selang berakhirnya perang yang berlangsung kurang lebih enam tahun tersebut, AS muncul sebagai kekuatan global baru. Selain itu, ia juga muncul sebagai “dewa penyelamat” yang kemudian mencitrakan dirinya sebagai *good*

power, untuk menyelamatkan negara-negara Eropa dari kehancuran. Eropa yang pada saat itu benar-benar dalam keadaan terpuruk memang sangat membutuhkan bantuan terutama sebagai modal dalam rangka pembangunan kembali semua infrastruktur yang telah hancur akibat perang. Di sini kemudian AS melalui program *Marshall Plan*-nya menawarkan bantuan modal bagi Eropa.²¹ Negara-negara Eropa tersebut memang tidak punya pilihan lain sekalipun mungkin mereka juga menyadari bahwa hal ini (*Marshall Plan*) akan membawa konsekuensi hegemoni politik dan ekonomi AS atas Eropa.

Indikasi ke arah tersebut memang cukup jelas, dimana dengan *Marshall Plan* tersebut AS mulai dapat “menguasai” Eropa. AS mulai bisa mempengaruhi para *policy maker* negara-negara Eropa dan memaksa mereka untuk mendukung kepentingan AS sendiri. Sebagai contoh adalah saat AS mengadakan pembentukan *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* pada tahun 1949 yang mana hal ini langsung diikuti oleh negara-negara Eropa pada saat itu. Kekuatan hegemonik AS benar-benar tertancap kuat pada negara-negara tersebut. Pembentukan *NATO* ini sendiri yang selanjutnya menjadi penabuh genderang perang dingin antara AS dengan blok Baratnya (sebagian besar anggota *NATO* adalah negara-negara Eropa Barat) dan Uni Sovyet yang dengan negara-negara aliansinya di Eropa Timur membentuk *Pakta Warsawa* beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan Mei 1955.

Kemudian dalam hubungannya dengan dunia Islam, AS juga telah menanamkan hegemoninya dengan kuat. Banyak negara yang mayoritas penduduknya muslim kini berada dalam pengaruh AS. Nilai-nilai sosial, budaya, politik, maupun ekonomi dari AS banyak diadopsi oleh negara-negara tersebut. Hal seperti ini tentunya merupakan akses tersendiri yang memudahkan AS dalam mencapai kepentingannya di negara-negara tersebut.

Fenomena menguatnya pengaruh AS pada negara-negara Islam ini sendiri sebenarnya juga tidak lepas dari melemahnya dominasi Eropa pasca perang dunia. Berakhirnya perang dunia yang mengakibatkan kolapsnya Eropa membawa konsekuensi lain yaitu menguatnya perjuangan kemerdekaan di negara-negara

²¹ <http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/57.htm> diakses pada 24 Mei 2005

jajahan. Seperti diketahui, negara-negara Eropa pernah mendominasi dunia dengan politik imperialisme dan kolonialismenya. Banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang menjadi korban dari politik imperialisme dan kolonialisme tersebut. Pasca perang dunia mereka berhasil memanfaatkan momentum emas ini untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan memproklamkan kemerdekaannya. Negara-negara seperti Aljazair (merdeka pada 1962), Yordania (1946), Oman (1951), Kuwait (1961) maupun Indonesia (1945) adalah negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim dan juga merupakan eks-koloni negara Eropa yang telah berhasil mencapai kemerdekaannya pasca perang dunia.

Munculnya negara-negara “baru” ini kemudian dimanfaatkan oleh AS sebagai instrumen bagi dia untuk memainkan peranan lebih di negara-negara tersebut dan seluruh dunia. Hal ini tentunya merupakan upaya dalam pencapaian kepentingan hegemonik AS sendiri. AS yang merasa dirinya sebagai negara hegemon tentunya ingin mengembangkan peranan globalnya dan salah satu aksesnya adalah negara-negara “baru” tersebut.

Sebagai contoh di Timur Tengah, dimana banyak terdapat negara-negara eks-kolonial Eropa. Negara-negara tersebut jadi perhatian bagi AS pasca perang dunia. AS ingin memainkan peranan politik yang lebih besar di kawasan tersebut. Seorang pengamat bernama Alan Taylor pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul *The Superpowers and The Middle East*, bahwa kebijakan Amerika di Timur Tengah kontemporer beranjak dari kebutuhan untuk menegaskan dan melindungi kepentingan AS di sebuah kawasan dimana sebelum perang dunia Washington tidak mempunyai peranan politik apapun.²²

Peranan politik yang lebih besar yang diinginkan AS ini sebenarnya tidak lepas dari konflik perang dingin antara AS dengan Sovyet pada saat itu. Seperti diketahui bahwa perang dingin adalah konflik bipolaristik antara dua *superpower* (AS dan Sovyet) yang terlibat berbagai “perang” baik dalam ideologi (liberal – sosialis-komunis), ekonomi (kapitalis-sosialis), politik, maupun keamanan. Dari

²² Riza Sihbudi. *Timur Tengah, Dunia Islam, dan Hegemoni Amerika*. Jakarta: Pustaka Hidayah. ih. 1993 hal. 17

kepentingan terhadap perang dingin ini, AS berupaya melakukan pembendungan pengaruh Sovyet dan penyebaran sosialisme-komunismenya tersebut di kawasan Timur Tengah. AS membina hubungan aliansi dengan rezim-rezim berkuasa di Timur Tengah yang ditujukan agar bisa mengakomodasi berbagai kepentingan AS di kawasan tersebut, termasuk pembendungan komunisme. Sebagai contoh AS pernah membina hubungan kerjasama pertahanan dengan Iran dan Israel.

Komunisme dan Sovyet memang dijadikan sebagai instrumen bagi AS dalam mencapai kepentingan hegemoni globalnya baik di kawasan Eropa, Timur Tengah, maupun seluruh dunia. Keduanya dianggap sebagai suatu ancaman yang harus dihadapi bersama. Negara-negara Eropa Barat maupun Timur Tengah diajak untuk “berpartisipasi” dalam perang dingin yang sebenarnya lebih ditujukan untuk kepentingan hegemonik AS.

Identitas AS sebagai negara hegemon memang terancam dengan kehadiran Sovyet yang menyaingi kapabilitas AS dalam berbagai bidang. AS harus melakukan upaya *counter* terhadap ancaman identitasnya tersebut dan salah satu cara yang dipilih adalah dengan mengkampanyekan “perang” melawan penyebaran komunisme. Hal seperti ini terus berlangsung hingga berakhirnya perang dingin pada awal dekade 90-an.

Pasca perang dingin, konstelasi politik dan keamanan dunia kembali berubah, dari bipolaritas menuju ke unipolaritas. Runtuhnya Uni Sovyet mengakibatkan AS kini menjadi “penguasa” tunggal dunia. Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang mampu menandingi kedigdayaan AS pada saat ini. Hal yang mana semakin mempertegas identitas AS baik sebagai negara hegemon maupun identitas lainnya yaitu *global super power*. AS kini merasa bahwa mereka adalah *the single super power* tanpa ada kompetitor yang benar-benar seimbang.²³

Meskipun demikian, hal seperti ini di sisi lain ternyata juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi AS. Berakhirnya perang dingin yang notabene memunculkan AS sebagai pemenang, lambat laun ternyata justru menimbulkan ancaman terhadap identitas AS itu sendiri, baik sebagai negara hegemon maupun

super power. AS menyadari bahwa superioritas yang saat ini ada di genggamannya tidaklah akan terus berlangsung. Ancaman bisa datang dari mana saja. Berakhirnya perang dingin menimbulkan gejala baru dalam situasi politik keamanan dunia yang berpotensi mengancam posisi strategis AS saat ini.

Riza Sihbudi menuliskan bahwa salah satu situasi internasional pasca perang dingin adalah menggejalanya regionalisme.²⁴ Sebagai contoh adalah yang terjadi di kawasan Eropa. Pasca perang dingin, gagasan penyatuan Eropa kian menguat. Berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka integrasi Eropa yang mana telah dimulai dalam level *low politics*. Misalnya dalam bidang ekonomi dengan diberlakukannya mata uang tunggal Eropa (euro) maupun berbagai kerjasama ekonomi regional lainnya seperti pertanian, transportasi dan lain-lain. Hal seperti ini sangat potensial menjadi ancaman bagi identitas AS. Sebagai contoh misalnya dalam ekonomi, dimana mata uang euro telah menjadi kompetitor kuat bagi dollar AS selama beberapa tahun belakangan ini. Gejala regionalisme yang melanda Eropa dalam level *low politics* ini (meskipun sulit) bukan tidak mungkin akan sampai pada level *high politics* seperti kerjasama pertahanan keamanan.

Hal seperti ini tentunya menjadi perhatian serius bagi negara yang sedang dalam posisi puncak seperti AS, karena bagaimanapun juga merupakan potensi ancaman bagi identitas AS sebagai negara hegemon dan *global super power*. Logikanya, jika Eropa sudah mulai bersatu maka mereka akan punya *bargaining power* yang kuat terhadap AS. AS tidak akan mudah lagi “mengendalikan” Eropa sesuai keinginannya. Jika hal ini terjadi berarti hegemoni AS terutama terhadap Eropa sudah mulai melemah.

Gejala menguatnya regionalisme juga terdapat di berbagai kawasan lain di dunia. Di kawasan-kawasan seperti Asia Tenggara, Afrika, maupun Amerika Latin ide-ide tentang regionalisme berkembang dengan pesat. Para pemimpin negara di kawasan tersebut mulai mengkaji pentingnya suatu hubungan kerjasama

²³ Ruslan Abdulgani. *Politik Amerika Selaku Penguasa Tunggal*. Dalam http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/siyasah/politik_amerika_selaku_adikuasa_tunggal.xht diakses pada 24 Mei 2005

²⁴ op. cit Riza Sihbudi hal. 171

regional yang lebih erat. Meskipun masih butuh waktu yang lama setidaknya untuk mencapai pada tingkatan seperti di Eropa pada saat ini.

Fenomena lain yang muncul sebagai konsekuensi berakhirnya perang dingin adalah menguatnya nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme di berbagai negara pasca perang dingin ini ternyata juga menimbulkan masalah baru. Kebangkitan nasionalisme ternyata menimbulkan potensi lahirnya negara-negara *super power* baru. Sebagai contoh yang terjadi di China dan Jepang misalnya, fenomena menguatnya nasionalisme ternyata memacu pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, bahkan pertahanan keamanan. Kedua negara tersebut kini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Bahkan keduanya kini sama-sama berambisi untuk menjadi yang terbaik di kawasan Asia Timur dan bahkan dunia.

Kebangkitan nasionalisme juga menimbulkan persaingan baru dalam perebutan pengaruh. Selain China dan Jepang yang punya pengaruh kuat dalam perekonomian di kawasan Asia Timur dan Tenggara, terdapat pula Iran yang punya peranan penting dalam situasi keamanan di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Ada juga Korea Utara yang punya *bargaining power* kuat dalam bernegosiasi dengan AS dan PBB tentang proliferasi nuklirnya.

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa kini telah muncul negara-negara yang mengancam kepentingan dan keberlangsungan hegemoni global AS. AS mulai menemukan potensi “kompetitor” baru yang bisa mengancam identitas nasionalnya sebagai negara hegemon maupun *global super power*. Konstelasi politik dan keamanan dunia pun mulai menunjukkan pergeseran dari unipolaritas menuju multipolaritas.

Ancaman terhadap identitas AS ini jelas memerlukan penanganan yang efektif. AS harus melakukan berbagai kebijakan baik dalam maupun luar negeri untuk mempertahankan identitasnya tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan memunculkan musuh baru sebagai pengganti dari Uni Sovyet.

Musuh baru ini akan dicitrakan sebagai ancaman, tidak hanya bagi AS sendiri, tapi juga bagi kawasan dan seluruh dunia. Dalam lingkup negara, kita mengenal labelisasi *rogue state* (pada masa Presiden Bush) ataupun *state of concern* (pada masa Presiden Clinton) yang dialamatkan pada negara-negara

seperti Kuba, Iran, Libya, maupun Korea Utara, yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman terhadap politik dan keamanan baik bagi kawasan maupun dunia secara keseluruhan. Sementara itu, di luar lingkup negara, kita mendapatkan (fundamentalisme) Islam sebagai ancaman ataupun musuh baru.²⁵

Isu fundamentalisme Islam sebagai ancaman ini sebenarnya sudah dimunculkan pada masa perang dingin. Pada saat revolusi Iran terjadi, fundamentalisme Islam sudah disebut sebagai ancaman terhadap demokrasi dan anti terhadap Barat. Akan tetapi hal ini belum menjadi isu yang cukup penting dibandingkan konflik bipolaristik perang dingin yang terjadi saat itu.

Pasca perang dingin, isu ini kembali muncul. Pada awal Februari 1992 di Munich, Jerman, berlangsung konferensi tentang kebijakan keamanan (The Munich Conference on Security Policy), yang disponsori oleh organisasi pertahanan Atlantik Utara (NATO). Konferensi itu dihadiri oleh para pejabat militer, politisi, maupun kalangan akademisi dari negara-negara Barat. Yang menarik dari konferensi itu adalah munculnya persepsi tentang fundamentalisme Islam sebagai ancaman berikutnya sesudah berakhirnya ancaman dari komunisme.²⁶ Fakta di lapangan yang menunjukkan perkembangan pesat populasi penduduk muslim dunia dan makin suburnya gerakan-gerakan Islam internasional memang dijadikan sebagai "bukti" kemunculan ancaman baru dari fundamentalisme Islam terhadap AS dan seluruh dunia. Terlebih lagi fundamentalisme Islam sering dikait-kaitkan dengan berbagai aksi terorisme internasional terutama yang menyerang sarana dan prasarana kepentingan AS.

Islam (fundamentalis) dicitrakan sebagai ancaman dengan labelisasi seperti *green threat*, *green menace*, ataupun *green peril*. Labelisasi ini terang ditujukan untuk berbagai kepentingan AS terhadap golongan Islam fundamentalis tersebut, termasuk untuk mempertahankan identitasnya sebagai negara hegemon

²⁵ Pada awalnya memang tidak ada pemisahan antara Islam dan fundamentalisme Islam. Namun tuduhan AS yang menyatakan bahwa Islam adalah ancaman langsung mendapat reaksi keras dari umat Islam. Hal ini sempat menimbulkan konflik emosional antara AS dan umat Islam. Menyikapi hal ini maka AS kemudian membagi-bagi Islam pada moderat dan fundamentalis yang juga diidentikkan dengan sikap ekstrim, radikal, militan dan intoleran. Hal ini ditujukan untuk menjaga hubungan dengan umat Islam sekaligus mempertahankan kepentingan hegemoniknya. Lihat Nizar Messari op cit.

dan *global superpower*. Hal yang kurang lebih sama dengan yang mereka lakukan pada Uni Sovyet melalui labelisasi *The Red Menace* (bahaya merah).

Ancaman terhadap identitas AS ini memang terasa pasca perang dingin. Namun hal ini juga tidak terlepas dari “konflik” internal AS sendiri antara kaum idealis dan kaum realis. Berakhirnya perang dingin dan tuntutan dari kaum idealis terhadap pengurangan anggaran militer untuk dialokasikan pada bidang-bidang sosial kemasyarakatan memang menjadi permasalahan tersendiri.

Pada masa perang dingin, setiap tahunnya Gedung Putih mengajukan rancangan keuangan yang besar kepada senat untuk membiayai berbagai proyek Pentagon. Alasannya sangat sederhana yaitu ; “*The Russians are coming, so we need this monstrous budget.*”²⁷ Namun hal yang berbeda terjadi pada 1990 ketika perang dingin berakhir dan Rusia tidak lagi menjadi alasan yang signifikan. Rusia, dalam hal ini Sovyet pada saat itu telah berada pada titik nadir keruntuhannya.

Hal seperti ini menuntut Gedung Putih untuk mencari target lain yang akan digunakan untuk menjamin limpahan dana bagi proyek Pentagon. Harus dicari musuh baru yang bisa dikategorikan sebagai “ancaman”.

Untuk mencari musuh baru tersebut perhatian kemudian dialihkan ke kawasan Timur Tengah untuk perlindungan industri vital AS. Tentang kebijakan AS ini Noam Chomsky mengatakan bahwa ;

*We need massive intervention forces, mostly posed at the Middle East. We protect what's called “the defence industrial base” – that's a euphemism that means high tech industry. We have to ensure that public pays the cost high tech industry by funneling it through the military system under the pretext of defence.*²⁸

(kita butuh kekuatan intervensi yang besar, terutama di Timur Tengah. Kita melindungi apa yang disebut “basis industri pertahanan” yang merupakan industri berteknologi tinggi. Kita harus memastikan bahwa publik membayar biaya industri teknologi tinggi dengan mengalirkannya melalui sistem militer dengan dalih pertahanan).

²⁶ Op cit. Riza Sihbudi hal.172

²⁷ Noam Chomsky. *Clash Of Civilizations?* Dalam op cit. Kamaruzzaman hal. 52

Memang pada awalnya AS kesulitan untuk mencari musuh dan momentum yang tepat. Memang terdapat rezim otoriter Saddam di Irak yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip negara demokratis yang dianut AS. Namun hal itu bukanlah alasan yang tepat untuk menaikkan dana pengembangan militer AS. Saddam Hussein dan Irak pada saat itu masih merupakan kawan bagi AS.

Ceritanya langsung berubah ketika terjadi invasi Irak atas Kuwait pada 3 Agustus 1990, dimana hal ini merupakan kesempatan emas bagi AS. Ribuan tentara gabungan AS dan sekutu dikirimkan untuk menyelamatkan Kuwait. Dari sinilah kemudian Gedung Putih mendapatkan alasan bagus untuk meminta dana perang dan proyek pengembangan di Pentagon karena Irak dinilai telah mengganggu kepentingan AS di kawasan itu, misalnya minyak.

Dengan serangan ke Irak ini, AS mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, AS bisa mengaplikasikan teknologi militer yang telah dikembangkannya selama ini secara absah dan mendapat “restu” dari banyak negara, seperti misalnya penggunaan rudal *Patriot* sebagai penangkal yang efektif bagi rudal *Scud* milik Irak. Kedua, AS juga mendapatkan keuntungan ekonomis dari perang teluk tersebut. Keuntungan ini didapatkan dari kenaikan harga minyak dunia pada masa perang teluk dari sekitar US\$ 15 menjadi US\$ 42 per barelnya. Dalam perminyakan di kawasan Arab, sistem pembagian adalah *fifty-fifty* antara negara yang mengeksploitasi dan mengawasi penambangan perminyakan dengan pemerintah setempat.²⁹ Sehingga dengan naiknya harga minyak maka akan memberi keuntungan ekonomis bagi AS yang lebih besar daripada biaya perang yang telah dikeluarkannya. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ;

²⁸ ibid hal. 53

²⁹ op. cit Kamaruzzaman hal. 156

Tabel 1

Keuntungan Ekonomis AS Pasca Perang Teluk

	Dana Perang	Keuntungan dari naiknya harga minyak	Keuntungan bersih
Negara-negara Arab	US\$ 30 milyar	US\$ 30 milyar	0
Pemerintah AS	US\$ 10 milyar	US\$ 21 milyar	US\$ 11 milyar
Swasta AS	US\$ 0	US\$ 9 milyar	US\$ 9 milyar

Sumber : University Of Milan. Koneksi via mi-lis.³⁰

Kemudian pasca perang teluk dimana Irak bukanlah lagi alasan yang tepat, maka mulailah (lagi) dimunculkan gerakan fundamentalisme Islam yang dicitrakan radikal, ekstrim, dan intoleran yang kemudian juga dihubungkan dengan aksi terorisme internasional. *Oklahoma Bombing*, *WTC Bombing* I dan II, pengeboman kedubes AS di berbagai negara, serta aksi-aksi terorisme lainnya sering dituduhkan pada golongan Islam yang mereka labeli sebagai fundamentalis. Jamaah Islamiyah dan Al Qaeda adalah contoh dari organisasi fundamentalis dan juga terlibat dalam aksi terorisme tersebut.

Pengkonstruksian fundamentalisme Islam sebagai ancaman bagi AS dan dunia ini ternyata cukup efektif. Hal ini juga didukung dengan penguasaan AS atas media, sehingga propaganda yang dilakukannya dapat tersebar luas di seluruh dunia. AS mengajak dunia untuk ikut dalam “perang” barunya yang sering dikampanyekannya dengan tajuk *War On Terror*. Dukungan dari banyak negara pun mengalir, misalnya saat invasi AS ke Afganistan dan Irak, dengan dalih pemberantasan aksi terorisme internasional (dengan mencari jaringan Al Qaeda yang ditengarai bersembunyi dan punya hubungan khusus dengan negara-negara tersebut) dan penyebaran nilai-nilai demokrasi (dengan menggulingkan rezim Taliban dan Saddam Hussein). Dengan kata lain, kampanye “perang” baru AS ini telah mendapat “legitimasi” dan “justifikasi” dari banyak negara. Bahkan beberapa di antaranya ikut ambil bagian dengan mengirimkan kekuatan militernya untuk mendukung tindakan AS tersebut.

³⁰ ibid hal. 157

Hal ini berarti, skenario yang dijalankan AS telah berlangsung dengan baik. Dengan menghembuskan isu adanya ancaman hijau, pihak senat AS kembali mempertimbangkan proposal Gedung Putih untuk pengembangan anggaran militer AS. Hal ini semakin diperkuat dengan maraknya aksi terorisme terhadap berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki AS, baik yang berada di AS sendiri maupun yang ditempatkan di negara-negara lain (seperti kantor Kedubes AS). Dari sini, berarti AS akan kembali bisa mempertahankan “kestabilan” *military spending*-nya. Meskipun secara keseluruhan *budget* yang didapat AS tidak lagi sebesar masa perang dingin, tapi ada hal yang sangat menarik dari perkembangan belanja militer AS ini. Tercatat, anggaran militer AS pada tahun pasca AS terkena aksi terorisme ataupun gangguan terhadap berbagai kepentingannya, cenderung akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Seperti pada anggaran tahun 1992 yang meningkat daripada tahun 1991 (invasi ke Irak), tahun 1999 yang meningkat dari 1998 (pemboman Kedubes AS di Kenya dan Tanzania), dan terakhir pada 2002 pasca WTC Bombing pada September 2001. Hal tersebut bisa kita lihat pada tabel berikut ini yang juga menyajikan perbandingan antara *military spending*-nya AS dan dunia secara keseluruhan :

Tabel 2

Belanja Militer AS Per Tahun dan Persentasenya dengan Dunia

Tahun	AS	Dunia	Persentase AS atas Dunia
1988	426,8	910	46,9
1989	422,1	906	46,6
1990	403,7	884	45,7
1991	354,3	844	N/a
1992	374,4	785	47,7
1993	354,8	762	46,6
1994	334,5	740	45,2
1995	315,1	707	44,6
1996	298,1	691	43,1
1997	296,5	696	42,6

1998	289,7	690	42,0
1999	290,5	696	41,7
2000	301,7	723	41,7
2001	304,1	741	41,0
2002	335,7	784	42,8

* Nilai dalam milyar dollar AS

Sumber : SIPRI (the Stockholm International Peace Research Institute).³¹

Belanja militer AS yang rata-rata menghabiskan dana sekitar US\$ 340,8 milyar pertahun (US\$ 320,7 milyar khusus pasca perang dingin) telah menjadikan AS sebagai negara dengan belanja militer terbesar sedunia. Sehingga, akan sangat wajar pula jika kekuatan militer yang dimilikinya pun adalah yang terhebat di dunia.

Kemudian dalam hubungannya dengan dunia internasional, dengan memunculkan ancaman hijau sebagai ancaman internasional baru, maka AS akan mendapatkan justifikasi global atas pengembangan kekuatan militernya tersebut. Hal ini juga tidak lepas dari propaganda AS yang menyatakan identitasnya sebagai *good power*. AS menjadikan dirinya sebagai seorang pahlawan bagi dunia, dan dunia pun bergantung pada AS. Dunia akan menyerahkan pengaturan keamanannya pada sang pahlawan, termasuk dari ancaman fundamentalisme Islam dan terorisme internasional. Inilah saatnya bagi sang pahlawan untuk turun tangan. Namun, untuk menghadapi ancaman internasional tersebut sang pahlawan butuh persenjataan yang memadai, maka dari itu dunia harus menerima bahwa pengembangan kekuatan militer AS yang *nota bene* juga ditujukan untuk melindungi keamanan dunia dari ancaman internasional sebagai sesuatu yang wajar bahkan patut untuk didukung. Maka dari itu, selain “memaksakan” dunia untuk menerima pengembangan militer AS sebagai sebuah konsekuensi logis, AS juga mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kampanye dan perang terhadap aksi terorisme internasional. Seperti slogan dalam kampanye *War on Terror*-nya AS; *With Us Or Without Us*.

³¹ <http://www.truthandpolitics.org/military-US-World.php> akses pada 3 Juni 2005

Hal ini sebenarnya merupakan skenario besar AS yaitu dengan memunculkan ancaman global baru demi mendapatkan legitimasi dan justifikasi global atas segala kebijakan dalam maupun luar negerinya, termasuk pengembangan kekuatan militer dan berbagai aksi invasi militer yang dilakukannya. Tanpa adanya musuh ataupun ancaman baru bagi dunia, tidak akan ada dukungan internasional atas berbagai kebijakan kontroversial AS tersebut. Pengembangan kekuatan militer yang dilakukan AS justru akan dianggap sebagai ancaman bagi dunia. Begitu juga dengan invasi yang dilakukannya atas Afganistan maupun Irak justru akan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang semena-mena.

Dengan adanya musuh internasional dan dukungan dari berbagai negara, maka AS dapat mempertahankan identitas nasionalnya baik sebagai *good power*, hegemon, maupun *global super power*. Dengan pengembangan besar-besaran pada kekuatan militernya, AS kini menjadi negara dengan persenjataan paling mutakhir dan paling lengkap sedunia dan tidak ada satu negara pun yang bisa menandingi kapasitas kekuatan militernya. Sehingga akan sangat wajar jika kini AS menganggap dirinya sebagai *the single super power*.

Hal ini sendiri selanjutnya juga berperan bagi AS dalam rangka mempertahankan kepemimpinan dan hegemoni globalnya. Didukung oleh kapasitas militer yang menakjubkan tersebut, AS punya *bargaining power* yang kuat dalam membina hubungan dengan negara-negara lain, terutama berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Negara-negara lain akan lebih mudah diajak “kerjasama” sesuai kepentingan AS, dan banyak pula negara-negara lain yang akan “menjilat” kepada AS agar bisa terakomodasi kepentingan-kepentingannya. Penguasaan AS atas media juga turut berperan dalam hal ini. Hal ini akan memudahkan AS untuk mempengaruhi dan mempermainkan opini global melalui berbagai propagandanya, yang disesuaikan dengan kepentingannya, dan untuk mempertegas identitasnya.

3.4 Identitas AS sebagai Kampiun Demokrasi

Term demokrasi berasal dari kosakata bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti memerintah. Sedangkan menurut istilah, demokrasi diartikan oleh Abraham Lincoln sebagai *government of the people, by the people, and for the people* (pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).³²

Dalam perkembangan sejarah AS sendiri, demokrasi memang memainkan peranan penting. Demokrasi memang sudah menjadi identitas tersendiri bagi rakyat dan pemerintah AS. AS memang sering membanggakan dirinya sebagai "*champion of democracy*" (kampiun demokrasi) ataupun "*the guardian of democracy*" (penjaga demokrasi) dengan tradisi demokrasi yang kokoh sejak diproklamirkannya *Declaration of Independence* 4 Juli 1776 hingga kini.³³

Dalam hubungan internasionalnya, AS juga merasa bahwa ia adalah negara yang paling baik untuk dicontoh. Seluruh negara di dunia memang harus meneladai AS. Oleh para pelaku revolusi AS, AS dipandang layaknya sebuah kota yang bersinar terang di atas bukit, sehingga perhatian dunia semua tertuju padanya.³⁴ AS merasa bahwa ia adalah model paling ideal yang patut jadi panutan bagi tiap negara di dunia.

Kemudian karena merasa sebagai teladan dan negara yang paling baik di dunia, maka nilai-nilai peradaban yang dimiliki AS harus pula dimiliki oleh negara-negara lain di dunia, termasuk demokrasi. Bagi AS, nilai-nilai yang terdapat di dalam demokrasi adalah yang paling ideal bagi setiap sistem pemerintahan di seluruh dunia. Demokrasi adalah jauh lebih baik daripada tirani. Demokrasi juga merupakan syarat mutlak bagi tercapainya perdamaian dunia, sedangkan tirani justru menciptakan konflik bagi dunia. Hal seperti ini pernah dinyatakan oleh Presiden Bush jr. dalam pidato pelantikannya setelah terpilih kembali sebagai presiden AS beberapa waktu lalu; "Kebebasan Amerika makin

³² Sugeng Linarto dan Basuki Widodo. *Tata Negara*. Malang: Dian Ilmu. 1997 hal. 39

³³ James Baker. Pidato dalam *World Affairs Council* di Dallas, AS. dalam Sidik Jatmika. *AS Penghambat Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001 hal.1

³⁴ David Forsythe. *Human Rights and US Foreign Policy*. Gainesville: University Of Florida Press, 1988 p. 131-132 dalam op cit Sidik Jatmika hal. 25

tergantung pada kebebasan di luar negeri. Syarat terbaik untuk perdamaian dunia adalah menyebarkan kebebasan dari tirani ke seluruh dunia."³⁵ Jadi, untuk menciptakan perdamaian dunia yang hakiki, terlebih dahulu demokrasi harus disebarkan di seluruh dunia.

Namun, meskipun AS begitu mengagungkan demokrasi sebagai sistem yang paling akomodatif, tapi dalam kenyataannya hal ini tidak lebih dari sekedar retorika karena kebijakan politik AS, terutama luar negerinya, termasuk terhadap demokrasi itu sendiri sangat ditentukan oleh kepentingan AS itu sendiri. Standar ganda diterapkan AS dalam penyebaran demokrasi dan kebijakan luar negerinya.

Banyak kasus yang menunjukkan sikap AS terhadap demokrasi ini. Penerapan demokrasi di suatu negara memang ditentukan atas kepentingan AS atas negara tersebut. Jadi, ada negara yang memang diinginkan AS untuk jadi demokratis, tapi ada juga negara yang lebih "dibiarkan" dalam kondisi a-demokratis. Semua tergantung dalam konteks kepentingan aktual AS.

Sebagai contoh misalnya pada rezim Arab Saudi yang dibiarkan dalam sistem monarkinya sendiri. Meskipun hal ini sering mendapat sorotan, karena pada negara-negara lain seperti Irak dan Afganistan, AS terkesan begitu memaksakan kedua negara tersebut untuk menjadi demokratis. Pada Arab Saudi, rezim monarki memang dibiarkan bahkan malah didukung oleh AS.

Memang jika dilihat lebih jauh, rezim monarki Saudi akan jauh lebih menguntungkan bagi AS ketimbang diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Sidik Jatmika menuliskan adanya kepentingan praktis dan kepentingan kontinuitas dari sikap AS terhadap demokratisasi di Saudi ini. Kepentingan praktisnya, bahwa rezim monarki Saudi justru memudahkan komunikasi kekuasaan antara AS dengan pemimpin Saudi. Dengan merangkul pemimpin Saudi, maka AS bisa dikatakan telah "menguasai" Saudi. Hal ini bakal sulit jika sistemnya diganti misalnya oleh parlementer. Sementara, kepentingan kontinuitasnya lebih berkaitan dengan kelanjutan pemenuhan kepentingan nasional AS. Sistem monarki biasanya beraliran konservatif dan

³⁵ op cit. Ruslan Abdulgani

mempertahankan *status quo*. Mereka akan cenderung mempertahankan keamanan yang ada dan menghindari perubahan, apalagi yang bersifat radikal. Sehingga, hal ini amat mendukung bagi kelanjutan kepentingan AS terhadap Saudi khususnya (misalnya minyak), dan hegemoni AS di Timur Tengah sebagai wilayah pengaruhnya (*sphere of Influence*).³⁶

Contoh lain yang juga menarik adalah yang terjadi di Turki dan Aljazair, dimana pada kedua tempat tersebut telah terjadi penodaan nilai-nilai demokrasi yang selama ini dibangga-banggakan oleh AS. Namun respon yang diberikan AS atas peristiwa tersebut sungguh di luar dugaan dan tidak mencerminkan dirinya sebagai sang kampiun demokrasi. FIS di Aljazair (1992) dan Refah di Turki (1995) adalah simbol kemenangan demokrasi yang justru dihancurkan oleh rezim militer yang berkuasa yang menginginkan *status quo*. Kemenangan yang telah dicapai oleh kedua parpol tersebut melalui pemilu yang demokratis akhirnya harus sirna setelah rezim yang berkuasa mencabut kemenangan mereka. Perdana Menteri Necmetin Erbakan dari Refah Turki harus mundur dari jabatannya, sedangkan FIS di Aljazair mengalami tindakan represif aparat keamanan yang mengakibatkan puluhan ribu penduduk tewas. Hal seperti ini di atas tidak disikapi dengan sepatasnya oleh AS.

Dari kasus Aljazair dan Turki terdapat kesamaan yang menarik. Kedua rezim berkuasa di negara tersebut sama-sama berusaha mencegah bangkitnya kekuatan Islam yang disimbolkan dengan FIS maupun Refah tersebut. Revivalisme Islam dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan rezim di Turki maupun di Aljazair.

Hal yang menarik kemudian muncul di sini, dimana terjadi konfrontasi antara agama dengan demokrasi. Agama, dalam hal ini khususnya Islam, memang dianggap oleh kalangan Barat bertentangan dengan demokrasi. Kebangkitan Islam dinilai justru merupakan ancaman terhadap demokrasi. Hal ini juga yang mendasari sikap lembek Barat, termasuk AS, terhadap konflik Aljazair maupun Turki.

³⁶ op cit Sidik Jatmika hal. 158

Mengenai hubungan antara agama dengan demokrasi ini, Huntington, dengan mengutip hasil penelitian Kenneth A. Bollen (1979), pernah menuliskan bahwa; “*the greater the proportion of the population that is Protestant, the higher level of democracy.*”³⁷ Dari pernyataan Huntington ini, tampak jelas bahwa agama yang paling demokratis adalah Protestan.

Lalu bagaimana dengan Islam? Islam justru dianggap sebagai penghambat demokrasi. Demokrasi identik dengan *Western Christian Connection*, karena lahir dan tumbuh di kalangan kultur Barat dan Kristen.³⁸ Sehingga sulit untuk berkembang di luar itu, termasuk Islam.

Namun pandangan yang menilai Islam bertentangan dengan demokrasi ini selanjutnya menuai banyak kritikan. Sheikh Rashid al Ghannoushi, salah seorang ulama terkemuka dan tokoh pergerakan *Hizb Al Nahda* (Partai Kebangkitan) Tunisia mengatakan; “Tidak ada alasan bagi Barat untuk memandang Islam sebagai suatu ancaman terhadap demokrasi dan nilai-nilai modern yang beradab.”³⁹ Hal ini juga didukung oleh Hamid Enayat, seorang intelektual Iran, yang menuliskan jika yang dimaksud demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam adalah sesuai dengan demokrasi. Karena dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan yang semaunya sendiri, baik oleh satu orang ataupun beberapa orang. dasar dari semua keputusan dan tindakan dari suatu negara Islam bukanlah keinginan individu ataupun kelompok, tapi adalah syariat yang bersumber dari galian Al Quran dan Al Hadits.⁴⁰ Ditambahkan oleh seorang Islamolog Jerman, Gurdun Kramer, bahwa arus utama di kalangan aktivis maupun pemikir Islam dapat menerima elemen-elemen penting dalam demokrasi politik seperti pluralisme (dalam kerangka Islam), partisipasi politik, akuntabilitas pemerintahan, penegakan hukum, serta perlindungan HAM. Namun, mereka menolak unsur liberalisme.

³⁷ Samuel P. Huntington. *Religion and the Third Wave*. The National Interest, 1991. p 29-41. dalam Riza Sihbudi. *Demokrasi dan Gerakan Islam di Timur Tengah*. Dalam jurnal Demokrasi dan HAM. Vol 3, No.1, Januari-April 2002 hal. 124

³⁸ Riza Sihbudi. *Demokrasi dan Gerakan Islam di Timur Tengah*. Dalam jurnal Demokrasi dan HAM. Vol 3, No.1, Januari-April 2003 hal. 126-127

³⁹ Kayhan International, 23 Januari 1992. dalam. *ibid* hal 129

⁴⁰ Hamid Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syiah*. Dalam *ibid*. hal 131

Terutama yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti *free sex*, maupun perkawinan sejenis, sekalipun hal ini dikehendaki oleh mayoritas rakyat.⁴⁰ Jadi, demokrasi bisa menjadi sesuatu yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun bagi Islam, demokrasi belum merupakan sistem yang sempurna.

Riza Sihbudi dengan mengutip dari Kayhan Internasional menuliskan bahwa pandangan yang menyatakan Islam dan pergerakannya sebagai anti demokrasi ini setidaknya didasari dua alasan.⁴² Pertama, konflik kekuasaan. Di mana saat ini negara-negara Islam dikuasai elit sekuler, tapi mereka mendapat tantangan dari perkembangan Islam dan bahkan beberapa kasus gerakan Islam berhasil meraih kekuasaan. Alasan kedua, “konflik peradaban”. Dewasa ini, dominasi Barat atas dunia begitu kuat. Namun hal ini kemudian mendapat counter dari gerakan Islam. kebangkitan Islam jadi perhatian tersendiri di kalangan Barat. Dalam situasi seperti ini, kekuatan politik sekuler di negara-negara Islam mempunyai persamaan kepentingan dengan Barat dalam hal menolak atau menentang oposisi gerakan Islam. padahal, menolak hak bersuara oposisi juga bertentangan dengan prinsip demokrasi, namun bagi mereka justru gerakan Islamlah yang anti terhadap demokrasi. Inilah yang kemudian memunculkan stereotip negatif terhadap gerakan Islam sebagai gerakan fundamentalis yang militan, intoleran, dan juga radikal.

Counter terhadap pandangan bahwa Islam anti demokrasi ini selanjutnya disikapi oleh AS. meskipun tidak mengubah stereotip negatif mereka terhadap gerakan Islam, tapi secara lebih khusus, AS mewacanakan bahwa gerakan fundamentalisme Islam-lah yang mengancam demokrasi. Hal ini sekaligus memisahkan antara Islam yang moderat dan Islam yang fundamentalis. Fundamentalisme Islam yang radikal dan intoleran merupakan ancaman bagi kelangsungan demokrasi.

AS juga menuduh bahwa gerakan fundamentalisme Islam dan juga pemerintahan tirani, memainkan peranan penting dalam instabilitas dan

⁴¹ Gurdun Kramer (1993) dalam Riza Sihbudi. *Islam, Radikalisme, dan Demokrasi*. Dikutip dari http://www.republika.co.id/ASP/kolom_detail.asp?id=173418&kat_id=16.html diakses pada September 2004

⁴² Kayhan Internasional, 23 Januari 1992 dalam *ibid*

merupakan penghambat bagi perdamaian di Timur Tengah. HAMAS di Palestina, Hizbullah di Lebanon, maupun Taliban di Afganistan serta Saddam Husein di Irak merupakan contoh gerakan fundamentalisme Islam dan pemerintahan tirani yang tidak mendukung perdamaian dan demokrasi.

Bagi AS, kunci utama perdamaian di Timur Tengah maupun seluruh dunia adalah demokrasi. Karena itu, AS mengkampanyekan demokrasi pada seluruh dunia. Akan tetapi di sini, AS kembali memainkan standar ganda, yang disesuaikan dengan kepentingan AS sendiri.

Seperti yang diuraikan sebelumnya bagaimana sikap AS terhadap demokratisasi di Arab Saudi, hal yang demikian tidaklah dilakukan di Irak maupun Afganistan. Dengan dalih perang terhadap terorisme dan penegakan demokrasi, AS berusaha untuk menekan dan menggulingkan rezim yang berkuasa dan menggantikannya dengan pemimpin baru yang lebih “demokratis”.

Isu demokrasi, pemberantasan terorisme internasional, dan penertiban senjata pemusnah massal (khusus Irak) memang dijadikan rasionalisasi dan justifikasi tindakan semena-mena agresi militer AS tersebut. Namun ternyata, di kalangan pengamat, banyak faktor lain yang melatarbelakangi hal tersebut.

Antara Taliban maupun Saddam Hussein, keduanya ditengarai berafiliasi dan melindungi gerakan Islam fundamentalis yang dituduh terlibat dalam WTC Bombing, yaitu Al Qaida maupun tokoh sentralnya Usama bin Laden. Sehingga kedua rezim tersebut juga dihubung-hubungkan dengan fundamentalisme Islam dan terorisme internasional. Selain itu keduanya juga bukan merupakan negara yang demokratis. Keduanya juga dinilai tidak “patuh” dan akomodatif terhadap kepentingan AS, bahkan berani menolak dan mengkritik.

Atas dasar itu juga, AS melakukan aksi agresi militer atas kedua negara tersebut. Jutaan dollar AS terbuang untuk membiayai perang, dan ribuan prajurit telah gugur dalam perang di dua negara, yang sebenarnya lebih ditujukan untuk kepentingan nasional AS tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa minyak adalah faktor penting dalam agresi militer AS ini. AS merupakan negara konsumen minyak terbesar dunia. Sedangkan Irak adalah negara penghasil minyak kedua terbesar di kawasan Timur

Tengah, setelah Arab Saudi. Alasdair Drysdale dan GERALD H. Blake mencatat bahwa ;

"The US is by far and away the world's largest consumer of energy. With 5% of the world population, it devours about 30% of its oils..the US has 40% of world'd cars... .." ⁴³

(Amerika Serikat (US) adalah konsumen energi terbesar dunia. Dengan populasi 5 % dari jumlah populasi dunia, menghabiskan 30% minyak dunia...Amerika Serikat memiliki 40% dari mobil dunia).

Namun selain isu minyak, agresi militer yang dilakukan AS tersebut juga mengandung motif lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa terorisme dan fundamentalisme Islam yang berperan besar dalam *WTC Bombing* ditengarai bersembunyi dan mendapat dukungan dari Irak dan Afganistan. Maka, AS yang dalam hal ini adalah sebagai "korban", merasa berhak untuk mencari dan menghakimi mereka yang terlibat dalam aksi tersebut, termasuk dengan agresi militer. Agresi ini sendiri juga didampingi "bumbu penyedap" lain yaitu penyebaran demokrasi. Dengan tujuan, meredam gerakan fundamentalisme Islam dan menggulingkan pemerintahan Tirani, sekaligus menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Karena itu, pasca mengkuadeta rezim Taliban maupun Saddam, AS langsung mendorong pelaksanaan pemilu yang dikampanyekan untuk mendapatkan pemimpin yang demokratis.

Namun tentu saja hal ini tidak "murni" seperti itu. Meskipun belum ada bukti apakah pemimpin baru di kedua negara tersebut bukan hanya sekadar "boneka" dan merupakan perpanjangan tangan kepentingan AS, tapi setidaknya rezim yang sebelumnya tidak akomodatif terhadap kepentingan AS telah digulingkan.

Dengan menumbangkan rezim yang anti terhadapnya, setidaknya akan lebih mudah bagi AS untuk memainkan peran dan mencapai kepentingannya di negara tersebut. Artinya, dengan menumbangkan rezim tersebut, melalui isu terorisme dan demokratisasi, justru lebih ditujukan untuk kepentingan nasional

⁴³ Alasdair Drysdale dan Gerald H. Blake. *The Middle East and North Africa*. Oxford University Press, 1985 p. 332 dalam op cit Sidik Jatmika hal. 165

AS, baik ekonomi, politik, maupun kepentingan AS dalam memperkuat hegemoninya.

Di sisi lain, hal ini sendiri juga untuk mempertegas identitas AS sebagai negara kampiun dan penjaga demokrasi yang telah “berhasil” membawa rakyat di negara yang sebelumnya berada dalam rezim otoriter menuju zaman kebebasan baru yang demokratis. Di mana identitas ini sempat tercoreng akibat kasus Saudi, Aljazair, maupun Turki. Di Irak sendiri, menurut Bara Hasibuan, kebijakan ekspor demokrasi hanyalah sebagai politik citra, setelah Bush ternyata gagal menemukan senjata pemusnah massal di Irak.⁴⁴

⁴⁴ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/24/sorotan/1578786.htm> diakses pada 8 Juni 2005

Bab IV

Strategi dan Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Fundamentalisme Islam

4.1. Pengelompokan Umat Islam Dan Kebijakan AS

Pada bab sebelumnya penulis sedikit memaparkan bahwa AS melakukan upaya “pembagian” Islam ke dalam kelompok Islam (moderat) dan fundamentalis. Hal ini merupakan strategi AS dalam rangka mencegah konflik langsung dengan umat Islam secara keseluruhan namun di sisi lain juga dengan tidak menghilangkan “musuh” barunya yang *nota bene* merupakan instrumen bagi AS dalam terus mempertahankan kekuatan hegemoni globalnya.

Dengan munculnya fundamentalisme Islam sebagai ancaman baik bagi AS maupun dunia secara keseluruhan, maka AS akan memiliki akses dan dukungan baik domestik maupun internasional atas berbagai kebijakannya (seperti pengembangan senjata, kampanye perang, dan sebagainya) yang mana ditujukan untuk menumpas musuh “bersama” tersebut.

Kemudian dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang upaya AS dalam melakukan pembagian kelompok-kelompok Islam tersebut, serta kebijakan yang dilakukan AS terhadap mereka, yang mana hal ini juga ditentukan oleh kemampuan tiap-tiap kelompok tersebut dalam membina hubungan dengan AS serta kemampuan mereka pula dalam mengakomodasi berbagai kepentingan AS.

Hal seperti inilah yang dilakukan AS terhadap Islam. Dalam kasus ini, AS melakukan pengkualifikasian umat Islam dalam beberapa kelompok atau golongan seperti misalnya moderat dan fundamentalis. Hal ini meskipun berawal dari tataran konseptual dalam hal ini pemahaman dan perspektif AS terhadap Islam, namun dalam tataran praksisnya yaitu kebijakan resmi AS, lebih ditentukan oleh “standar kepatuhan” tiap-tiap kelompok Islam tersebut terhadap AS. Kelompok yang “patuh” akan mendapatkan dukungan dan sebaliknya bagi yang tidak “patuh” akan diberi tekanan.

Berbagai pengelompokan dialektis sering dijumpai dalam Islam yang sebenarnya juga merupakan hasil dari pemahaman dan interpretasi pihak Barat

termasuk AS terhadap Islam. Namun hal ini tentunya juga dibungkus oleh kepentingan mereka terhadap Islam itu sendiri.

Strategi AS dalam membagi-bagi Islam dalam berbagai golongan ini bisa dilihat dalam tulisannya Dr. Cheryl Benard, seorang sarjana politik senior AS, yang berjudul *Civil Democratic Islam : Partners, Resources, And Strategies*, yang dipublikasikan oleh RAND Corporation, sebuah organisasi *thinktank* sayap kanan yang sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah AS. Di sini ia menjelaskan bahwa Islam terdiri dari beberapa golongan yang secara umum bisa dibedakan atas empat posisi esensial yaitu fundamentalis, tradisional, modernis, dan sekuler.¹

Menurut Benard, kategorisasi tersebut didasarkan pada sikap dan posisi mereka (umat Islam) terhadap berbagai isu, dalam hal ini termasuk kebebasan politik dan individu, pendidikan, status wanita, keadilan, legitimasi bagi perubahan, dan juga sikap mereka terhadap Barat.²

Golongan pertama adalah fundamentalis. Golongan ini bermusuhan dengan Barat pada umumnya, dan AS pada khususnya. Golongan ini bersifat merusak suatu tatanan yang modern dan demokratis. Mereka merupakan golongan Islam yang agresif, ekspansionis, dan identik dengan kekerasan. Tujuan mereka adalah meraih kekuasaan politik dan menegakkan syariah Islam yang sesuai dengan interpretasi mereka terhadap Islam itu sendiri.

Fundamentalis ini sendiri masih terbagi atas dua golongan yaitu fundamentalis skriptural dan fundamentalis radikal. Gerakan revolusi Islam Iran pada tahun 1979, Wahabi, dan *Kaplan Congregation* adalah contoh dari fundamentalisme Islam skriptural ini. Ciri golongan ini adalah literalisme dan skripturalisme mereka dalam teologi dan tatanan praksis berdasarkan sumber Al Quran dan Al Hadits, yang ditujukan untuk mendirikan suatu bangunan religius yang kokoh dan mantap dalam setiap sendi kehidupan. Sedangkan golongan kedua, yaitu fundamentalis radikal justru dinilai tidak terlalu literal dan malah berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan doktrin ortodok Islam. Mereka sangat

¹ Cheryl Benard. *Civil Democratic Islam : Partners, Resources, and Strategies*. <http://www.rand.org/publications/MR/MR1716> akses pada Mei 2005 hal. 3

² *ibid.* hal.ix

selektif dan otodidak dalam mempelajari Islam. Contoh dari gerakan ini adalah Al Qaeda, Hizbut Tahrir, Taliban, dan organisasi Islam lain yang tersebar di seluruh dunia.

Golongan kedua adalah tradisional. Secara umum golongan ini memegang prinsip yang lebih moderat. Mereka menginginkan sebuah masyarakat yang konservatif. Mereka bersifat skeptis dan antipati terhadap modernitas, inovasi, dan perubahan. Golongan inipun masih terbagi atas dua golongan lagi, yang terdapat perbedaan cukup signifikan antara keduanya yaitu; tradisional konservatif dan tradisional reformis.

Tradisional konservatif meyakini bahwa hukum dan tradisi Islam harus diikuti dengan tegas dan literal. Mereka memperjuangkan secara politis agar kebijakan negara bisa mengakomodasi keyakinan mereka ini. Namun meskipun demikian, secara umum golongan ini tidak berminat untuk melakukan kekerasan dan aksi terorisme dalam mencapai tujuan politiknya tersebut.

Sementara itu, golongan tradisional reformis lebih meyakini bahwa untuk perkembangan dan kemajuan Islam sepanjang zaman, Islam harus dipersiapkan untuk membuat sebuah konsesi dalam aplikasi literal ortodok-nya. Golongan ini menginginkan adanya semacam diskusi dalam Islam tentang reformasi dan reinterpretasi, adaptasi terhadap perubahan, serta fleksibilitas terhadap teks-teks hukum dengan tujuan untuk mempertahankan *spirit* dari hukum itu sendiri.

Golongan ketiga adalah modernis. Golongan ini menginginkan Islam jadi bagian dari modernitas global. Mereka ingin memodernisasikan dan menyelaraskan Islam dengan garis perkembangan zaman. Dengan paradigma seperti ini, tampak bahwa golongan ini lebih kompromis dengan Barat. Mereka ingin mengubah ortodoksi dalam pemahaman dan praktek keagamaan Islam. menurut mereka, dengan “penyesuaian” Islam dengan perkembangan zaman justru akan memperkuat Islam itu sendiri. Mereka menganut nilai-nilai yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi modern Barat seperti keutamaan dan kesadaran individu dan komunitas berdasarkan tanggungjawab sosial, persamaan, dan kebebasan.



Golongan keempat adalah sekularis. Sama dengan modernis, golongan sekularis juga dekat dengan nilai-nilai dan kebijakan Barat. Golongan ini menginginkan agar dunia Islam menerima pemisahan antara *church* (dalam hal ini lebih diartikan sebagai simbol-simbol dan nilai-nilai keagamaan) dengan negara. Hal ini seperti layaknya kebiasaan demokrasi Barat dimana agama lebih diperuntukkan hanya dalam tatanan kehidupan privat. Negara dilarang untuk campurtangan dalam kehidupan beragama masing-masing penduduk, tapi bersamaan dengan itu nilai-nilai dan budaya keagamaan harus tidak melanggar hukum yang berlaku dan menjunjung hak asasi manusia.

Selanjutnya, dari kategorisasi seperti di atas, tentunya akan membawa konsekuensi dalam hal ini termasuk kebijakan yang dilakukan AS terhadap masing-masing kelompok tersebut.

Berangkat dari tataran konseptual di atas, jelas kelompok yang modernis, tradisional, dan sekularis akan mendapatkan dukungan dari AS karena sikap dan posisi mereka yang baik atau setidaknya bisa ditolerir di mata AS. Sebaliknya, bagi kelompok fundamentalis justru harus ditekan perkembangannya. Hal ini karena kelompok inilah yang dinilai paling “tidak benar” dan juga berada dalam posisi yang bertentangan dengan AS, baik secara ideologis maupun kepentingan. Fundamentalisme merupakan ancaman terhadap demokrasi, nilai-nilai Barat pada umumnya, dan nilai-nilai AS pada khususnya, dimana tujuan dan visi mereka secara keseluruhan tidak cocok dengan AS, sehingga dalam hal ini posisi mereka adalah berhadapan-hadapan dengan AS.³

Secara lebih spesifik, jika berpijak pada tulisan Cheryl Benard tersebut, fundamentalisme Islam yang radikal-lah yang lebih berbahaya atau dianggap berbahaya. Berbeda dengan kelompok fundamentalisme Islam skriptural yang cenderung *back to basic* (Al Quran dan As Sunnah), golongan fundamentalisme Islam radikal justru malah cenderung meninggalkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang benar-benar fundamental tersebut. Golongan ini dengan seenaknya menyeleksi ayat Al Quran maupun sunnah Nabi yang dianggap “mendukung” berbagai kepentingan dan aktivitas mereka untuk kemudian dijadikan legalisasi

³ Ibid. hal.27

dan justifikasi teologis mereka. Artinya, golongan ini mengambil sikap pragmatis dalam mempelajari aspek-aspek fundamental dalam Islam. Hanya yang akan memberikan akibat yang positif bagi merekalah yang akan dimunculkan sebagai suatu kebenaran. Sebagai contoh misalnya terhadap ayat-ayat suci Al Quran, dimana mereka akan melakukan proses penyortiran, pendistorsian, dan pemenggalan yang nantinya akan menjadi ayat-ayat pembenaran dari pemahaman teologis mereka terhadap Islam yang memang sempit dan fanatis. Dalam praksisnya, ayat-ayat “modifikasi” tersebut menjadi pedoman dan pembenaran bagi mereka dalam setiap aktivitas mereka.

Golongan Islam seperti ini jelas berpotensi sebagai ancaman. Nilai-nilai ajaran Islam mereka jadikan pembenaran terhadap usaha-usaha pencapaian kepentingan yang seringkali juga mengatasnamakan Islam. Persoalannya, seringkali kepentingan-kepentingan tersebut dicapai dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan aksi-aksi kekerasan dan terorisme. Dampak dari hal ini jelas cukup fatal dan berpotensi menimbulkan banyak korban yang tidak bersalah. Pemahaman Islam secara sempit seperti ini justru akan menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi umat Islam itu sendiri.

Golongan fundamentalisme Islam radikal inilah yang seringkali dikumandangkan oleh AS sebagai ancaman global baru. Golongan Islam yang memiliki pemahaman keislaman yang sempit, fanatik, radikal, identik dengan kekerasan, dan menjadikan agamanya sebagai pembenaran atas berbagai tindakan-tindakannya, termasuk dalam berbagai aksi terorisme yang memang marak akhir-akhir ini.

4.1.1. Konsepsi Sebagai Sebuah Kebenaran

Dari konsepsi tentang pengelompokan umat Islam tersebut, langkah selanjutnya adalah mengambil sikap dan tindakan terhadap masing-masing kelompok tersebut. Dalam hal ini nantinya akan tertuang dalam kebijakan AS terhadap mereka, menekan yang fundamentalis dan mendukung yang moderat. Namun sebelum mengambil sikap dan tindakan terhadap masing-masing kelompok Islam tersebut, hal yang lebih dahulu harus dilakukan adalah berupaya

menanamkan konsep tersebut di masyarakat dengan tujuan agar mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Hal ini mutlak dilakukan agar segala kebijakan yang nantinya diberlakukan, akan mendapat justifikasi dan dukungan dari masyarakat, baik domestik maupun internasional.

Masyarakat ataupun publik secara spesifiknya, juga butuh semacam “pedoman” untuk mengambil sikap dan tindakan, karena itu mereka harus memiliki suatu kebenaran yang bisa mereka yakini. Publik akan mengambil sikap terhadap setiap kebijakan yang diberlakukan oleh *policy makers* tergantung bagaimana mereka memahami kebijakan tersebut. Jika publik meyakini sebagai suatu kebenaran dan keharusan, maka kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahnya akan mendapatkan dukungan dari mereka. Karena itu, penanaman sebuah konsep di masyarakat sebagai suatu kebenaran adalah hal yang mutlak diperlukan untuk mendapatkan pembenaran dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Begitu pula dalam kasus ini dimana yang harus dilakukan oleh AS terlebih dahulu adalah bagaimana meyakinkan masyarakat maupun publik (termasuk dari kalangan Islam sendiri) tentang adanya kelompok-kelompok dalam Islam sebagaimana yang mereka sebutkan di atas baik itu fundamentalis, sekularis, modernis, maupun tradisonalis. Masyarakat harus diyakinkan akan kebenaran dari konsep pembagian kelompok Islam ini, termasuk berbagai permasalahan di dalamnya seperti adanya kelompok fundamentalisme Islam yang buruk dan merupakan ancaman bagi siapa saja.

Dalam konsep ini memang peranan kepentingan AS sangat signifikan. Cheryl Benard sendiri menuliskan bahwa salah satu unsur dari pengelompokan tersebut adalah sikap umat Islam dan bagaimana mereka membina hubungan terhadap Barat (lebih spesifik AS). Mereka yang sejalan dan akomodatif terhadap nilai-nilai dan kepentingan AS dan Barat tergolong dalam kelompok tradisonalis, modernis, maupun sekularis. Sedangkan bagi mereka yang berseberangan akan termasuk dalam kelompok fundamentalis.

Meskipun unsur kepentingan sangat kuat di sini, namun konsepsi inilah yang harus ditanamkan di masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa Islam

memang terbagi-bagi atas kelompok-kelompok seperti disebutkan Cheryl Benard tersebut. Di masyarakat harus dimunculkan konstruksi opini dan alternatif perspektif dalam melihat Islam. Dengan meyakinkan mereka akan eksistensi kelompok Islam tersebut beserta ciri khas, aktivitas, baik-buruknya, dan permasalahannya masing-masing maka diharapkan masyarakat akan menerima konsepsi yang diberikan tadi sebagai suatu kebenaran dan jika hal ini terjadi maka segala kebijakan yang diberlakukan AS terhadap kelompok-kelompok Islam tersebut akan dibenarkan dan bahkan didukung oleh masyarakat, termasuk dari kalangan Islam sendiri.

Untuk mencapai tahapan tersebut, berbagai cara bisa dilakukan dengan melalui saluran / media seperti ;

1. hasil pemikiran kaum ilmuwan (akademisi)
2. pernyataan resmi pemerintah AS
3. pemberitaan media massa

Melalui ketiga saluran tersebut, AS bisa menyebarkan, mengembangkan, dan menanamkan konsepnya di masyarakat tentang kelompok-kelompok dalam Islam agar terbangun konstruksi opini yang tentunya sejalan dengan konsep AS tersebut yang selanjutnya akan menggiring mereka untuk turut mendukung berbagai kebijakan yang diberlakukan AS terhadap kelompok-kelompok Islam tersebut.

4.1.1.1. Media Akademis

Kalangan ilmuwan atau akademisi punya peranan penting dalam pembentukan, pengembangan, penyebaran, dan penanaman konsepsi ataupun wacana. Terlepas dari hal tersebut mengandung misi maupun kepentingan tertentu ataukah benar-benar merupakan penjelasan obyektif terhadap suatu fenomena, yang jelas hasil pemikiran dari kalangan ini mendapat tempat yang cukup "istimewa" di masyarakat. Hal ini karena masyarakat menilai bahwa hasil karya dari kalangan ini didapat dari serangkaian proses yang metodis dan sistematis, sehingga dalam hal ini bisa terjamin "tingkat keilmiahannya" dan pertanggungjawaban kebenarannya.

Namun jika hasil pemikiran kaum akademisi ini mengandung misi atau kepentingan tertentu, bisa jadi hal ini akan merupakan pembenaran dari suatu kepentingan yang dilakukan dalam kerangka ilmiah. Sehingga yang tampak adalah suatu kebenaran yang ilmiah.

Hal yang sedemikian memang banyak terjadi. Banyak kalangan akademisi (dalam hal ini di AS) yang memang menjadi corong proyek kepentingan pemerintahnya. Pemikiran mereka memang sejalan dengan kepentingan pemerintah AS. Bisa dikatakan terdapat hubungan timbal balik antara keduanya. Di satu sisi, kalangan akademisi macam ini akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah AS dalam berbagai riset dengan ide dasarnya yang sejalan dengan kepentingan AS tadi, dan di sisi lain AS akan mendapatkan semacam "justifikasi ilmiah" terhadap berbagai kebijakannya dengan hasil pemikiran kaum intelektual yang pro AS tersebut. Sebagai contoh kasus ini adalah tesis kontroversial Samuel Huntington, *The Clash Of Civilization and The Remaking of World Order* (1993) yang ternyata merupakan sebuah proyek dari Olin Institute tentang perumusan perubahan strategi keamanan dan kepentingan nasional AS pasca perang dingin. Khusus untuk Huntington, ia mendapat tugas dalam proyek "*an emerging trend toward world conflict taking a place along cultural, rather than economic or ideological line*" (kecenderungan yang muncul dalam konflik dunia akan lebih banyak terjadi pada jalur kebudayaan, dari pada ekonomi maupun ideologis). Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya tesis tersebut. Selain Huntington, dalam proyek ini, AS juga banyak menggunakan bantuan para sarjana yang pro dengan kepentingannya. AS juga merekrut Stephen P. Rosen, Susan Marquis, maupun Zachy Karabell yang semuanya juga menyajikan pemikiran yang mendukung kepentingan AS.⁴

Lebih lanjut, dalam kasus hubungan dengan Islam, AS juga membutuhkan dukungan dari para kaum intelektualnya tersebut. Selain Huntington dengan *Clash Of Civilization*-nya, tulisan dari Cheryl Benard yang penulis bahas sebelumnya juga bisa menjadi contoh. Dalam tulisan itu, jelas AS berupaya untuk memeta-

⁴ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. *Satu Dasawarsa The Clash Of Civilizations*. Jogjakarta : Ar Ruzz Press, 2003 hal. 73

metakan kelompok Islam berdasarkan hubungan dengan kepentingannya. Dari sini ditunjukkan agar tercipta suatu konstruksi wacana di masyarakat yang juga turut memandang bahwa Islam memang terbagi-bagi atas berbagai kelompok tersebut. Lebih lanjut Cheryl Benard juga menggiring opini masyarakat bahwa di antara kelompok Islam tersebut ada yang paling bermasalah, tidak hanya bagi umat Islam sendiri, tapi juga seluruh umat manusia, dan bagi AS mereka jelas berada dalam posisi berseberangan dengan nilai dan kepentingan AS. Kelompok inilah yang disebut fundamentalis.

Perlakuan AS terhadap setiap kelompok Islam yang disebutkan oleh Cheryl Benard di atas akan berbeda-beda, terutama terhadap kelompok fundamentalisme Islam yang bermasalah tersebut. AS akan mendukung bagi kelompok Islam yang baik dan moderat serta akan menekan kelompok Islam fundamentalis yang merupakan masalah bagi umat manusia.

Cheryl Benard sendiri merekomendasikan beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah AS terhadap setiap kelompok Islam tersebut. Antara lain ;

Pertama, mendukung kelompok-kelompok modernis. Hal seperti ini bisa diwujudkan dengan ;

- ❶ Mempublikasikan, mendistribusikan, dan mensubsidi berbagai kegiatan mereka.
- ❷ Memperkenalkan pandangan kaum modernis dalam kurikulum pendidikan Islam.
- ❸ Mendukung mereka dengan kebijakan-kebijakan publik.
- ❹ Menciptakan akses yang luas bagi masyarakat terhadap pandangan dan opini kaum modernis tentang berbagai persoalan keagamaan.
- ❺ Mewacanakan bahwa sekularisme dan modernisme sebagai jalan terbaik bagi para pemuda Islam.
- ❻ Memfasilitasi dan mendukung suatu kesadaran tentang sejarah dan budaya *pre-Islamic* dan *non-Islamic* dalam media massa dan kurikulum pendidikan.
- ❼ Membantu pengembangan organisasi kewarganegaraan independen untuk mempromosikan kultur kewarganegaraan dan menyediakan ruang bagi

warga negara agar bisa mendapatkan pendidikan tentang proses politik dan artikulasi kepentingan mereka.

Kedua, mendukung kelompok tradisionalis dalam menghadapi kelompok fundamentalis.

- ❶ Mempublikasikan kritik-kritik tradisionalis terhadap fundamentalisme dan ekstrimisme.
 - ❷ Mengembangkan permusuhan antar tradisionalis dengan fundamentalis.
 - ❸ Mengembangkan hubungan baik dengan modernis.
 - ❹ Pendidikan dan pelatihan bagi kelompok tradisionalis.
 - ❺ Meningkatkan profil dan peranan kelompok modernis dalam berbagai institusi tradisionalis.
 - ❻ Mendorong popularitas dan penerimaan terhadap sufisme.
- Ketiga*, menentang dan melawan terhadap fundamentalisme.
- ❶ Menentang interpretasi inakurat mereka terhadap Islam.
 - ❷ Mencitrakan mereka sebagai kelompok ilegal.
 - ❸ Mempublikasikan akibat-akibat dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh mereka.
 - ❹ Menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam pemerintahan, dalam rangka mencapai kemajuan positif dari masyarakat dan negara.
 - ❺ Menyampaikan pesan ini kepada para pemuda, alim ulama tradisionalis, minoritas muslim di Barat, dan para wanita.
 - ❻ Tidak menunjukkan sikap respek atau kekaguman terhadap berbagai aksi yang dilakukan kaum fundamentalis dan teroris. Memandang mereka sebagai golongan pengganggu dan pengecut, bukan sebagai pahlawan.
 - ❼ Mendorong para jurnalis untuk mengekspos kasus korupsi, kemunafikan, dan asusila di kalangan fundamentalis dan teroris.
 - ❽ Menciptakan garis pemisah yang tegas antara fundamentalis dan kelompok Islam lain yang lebih moderat.

Keempat, secara selektif mendukung kaum sekularis.

- ❶ Mengenalkan fundamentalisme sebagai musuh bersama yang menyebarkan ketakutan terhadap kelompok sekularis yang bersahabat dengan AS.
- ❷ Mendukung ide-ide bahwa agama dan negara dapatlah dipisahkan dan isu ini bukanlah suatu ancaman terhadap iman dan keyakinan umat Islam, justru malah akan memperkuatnya.⁵

Dari tulisan Cheryl Benard di atas, setidaknya bisa dilihat dua “misi” utama dari tulisan tersebut. *Pertama*, tulisan tersebut berusaha memberikan suatu konsepsi kepada masyarakat tentang adanya kelompok-kelompok dalam Islam. Hal ini jelas ditujukan untuk membentuk opini masyarakat bahwa Islam memang terdiri atas kelompok-kelompok tersebut dan memberikan alternatif perspektif dalam melihat Islam dengan mendasarkan pada pembagian kelompok Islam tersebut. Berbagai kelompok tersebut punya ciri khas masing-masing, namun ada satu di antaranya yang bisa dikatakan “paling buruk” karena sifatnya yang a-demokratis, militan, agresif, dan identik dengan kekerasan. Sehingga, kelompok ini berpotensi masalah tidak hanya bagi kelompok lainnya, tapi juga seluruh umat manusia. Dengan kata lain, tulisan ini juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kelompok fundamentalisme Islam adalah ancaman bagi umat manusia. *Kedua*, untuk mendapatkan justifikasi atas setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Islam. Hal ini bisa dicapai jika konsep awal tadi benar-benar tertanam di masyarakat dan opini masyarakat juga tergiring sejalur dengan AS. Sebagai contoh jika AS memandang fundamentalisme Islam sebagai ancaman terhadap manusia, maka masyarakat juga akan mengamininya. Jika ini terjadi, maka setiap kebijakan yang diberlakukan AS terhadap kelompok fundamentalisme Islam akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, bahkan dari kalangan Islam sekalipun.

Hal di atas menunjukkan pentingnya peranan kaum akademisi dalam penanaman konsepsi di masyarakat untuk menjustifikasi berbagai kebijakan AS dan seperti diketahui pula bahwa Dr. Cheryl Benard adalah seorang ilmuwan politik sekaligus kontributor di RAND Corp. yang *notabene* merupakan lembaga

⁵ ibid hal.xi-xii

kajian strategis kepentingan nasional AS. Karena itu, tulisan dia tersebut ujung-ujungnya juga ditujukan untuk kepentingan AS.

Sebagai contoh lain dari peranan kaum akademisi adalah seperti Daniel Pipes, direktur lembaga kajian Middle East Forum dan mantan pengajar di University of Chicago. Ia juga berperan dalam menanam konsepsi tentang keberadaan kelompok-kelompok Islam di masyarakat. Dalam sebuah artikelnya ia menuliskan bahwa dalam Islam memang terdapat kelompok-kelompok fundamentalis. Namun secara ekstrem ia membedakan antara Islam dan fundamentalisme. Pipes mengatakan bahwa fundamentalisme Islam adalah bukan Islam. Islam adalah suatu agama dan wujud kebudayaan, sedangkan fundamentalisme Islam adalah sebuah ideologi pergerakan modern yang sempit dan agresif. Pembedaan atas keduanya setidaknya akan memberikan keuntungan ganda bagi AS. *Pertama*, akan memudahkan AS dalam melakukan setiap kebijakan terhadap keduanya, mendukung terhadap Islam dan mengambil sikap tegas terhadap fundamentalis. *Kedua*, pemisahan ini akan memungkinkan pembinaan hubungan yang lebih baik dengan kelompok ataupun negara muslim yang non-fundamentalis, sekaligus mengajak dan mendapatkan dukungan dari mereka atas kebijakan AS terhadap kelompok fundamentalis.

Kemudian beberapa kebijakan yang patut diambil oleh AS dalam rangka menghadapi kelompok fundamentalis yang merupakan wujud sikap tegas dari AS terhadap kelompok fundamentalisme Islam antara lain dengan ;

- ❶ Tidak melibatkan diri dalam dialog resmi dan dialog publik. Dialog hanya akan membuang waktu dan hal ini justru sangat kontraproduktif karena sekaligus melegitimasi keberadaan dan keyakinan yang dianut oleh kaum fundamentalis tersebut.
- ❷ Tidak membantu kaum fundamentalis. Mungkin tepat saat membantu mujahidin dalam menghadapi Sovyet pada 1980an. Tapi seiring dengan perkembangan mutakhirnya saat ini, adalah tidak mungkin untuk membantu mereka (kaum fundamentalis).
- ❸ Menekan negara-negara fundamentalis untuk mengurangi agresivitas mereka. Afganistan, Sudan, dan Iran harus mengurangi agresivitas mereka.

AS dan sekutunya punya hak untuk melakukan tekanan ini, baik melalui jalur diplomatik, maupun kekuatan militer jika diperlukan.

- ❶ Mendukung mereka yang menentang fundamentalisme Islam. AS harus berada di posisi yang sama dengan anti fundamentalisme Islam dan mendukung berbagai kebijakan mereka seperti taktik penggunaan kekuatan militer (di Mesir dan Palestina), pembatalan hasil pemilu (Aljazair) dan deportasi (Israel).
- ❷ Pendekatan yang sama, baik terhadap suatu institusi atau organisasi maupun terhadap individu .
- ❸ Himbauan terhadap pelaksanaan demokratisasi secara bertahap.⁶

Hal di atas kurang lebih sama dengan yang dimaksudkan oleh Cheryl Benard. Daniel Pipes juga berusaha membangun opini publik bahwa Islam tidak lah homogen dan kelompok fundamentalisme Islam itu memang ada, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Pipes juga menambahkan bahwa pengelompokan umat Islam tersebut jelas berguna untuk memperjelas “target” bagi kebijakan AS sendiri. Rekomendasi yang dituliskannya pun menyiratkan adanya perbedaan perlakuan terhadap kaum moderat dan fundamentalis. Artinya, kedua akademisi ini tetap mengusung satu konsepsi bahwa Islam memang terbagi-bagi atas beberapa kelompok yang secara umum kita bisa sederhanakan jadi dua yaitu moderat dan fundamentalis. Keduanya jelas sangat berperan dalam menanamkan konsep dan membentuk opini masyarakat tentang pengelompokan umat Islam apalagi dengan dukungan kuat dari media massa AS terutama yang pro terhadap pemerintahnya.

4.1.1.2. Pernyataan Resmi Pemerintah AS

Suatu konsepsi juga bisa dianggap sebagai suatu kebenaran jika didukung oleh otoritas yang memadai dalam hal ini misalnya oleh pemerintah. Konsepsi akan menjadi kuat dengan dukungan pemerintah misalnya lewat berbagai pernyataan dan sikap resmi terhadap konsepsi tersebut. Pernyataan dan sikap

⁶ Pendapat Daniel Pipes ini bisa dilihat di situs pribadinya yaitu <http://www.danielpipes.org/article/274> akses pada 14 Juni 2005

resmi dari pemerintah juga merefleksikan respon dan posisi pemerintah terhadap suatu realitas persoalan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat sendiri pun selalu menuntut dan menunggu sikap yang diambil pemerintah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi.

Dalam kasus ini, peranan pemerintah AS dalam penanaman konsep tentang pengelompokan umat Islam di masyarakat juga memiliki peranan penting seperti juga hasil pemikiran kaum akademisi di atas. Keduanya bisa memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung. Ide dan pemikiran kaum akademisi menjadi pijakan dan sekaligus “justifikasi” ilmiah dari kebijakan pemerintah. Sedangkan pernyataan resmi pemerintah, yang biasanya merupakan preseden dari kebijakannya, memiliki otoritas “legalisasi” atas konsepsi dari kaum akademisi. Konsep-konsep yang muncul dari kalangan akademisi dan kemudian “dipertegas” dengan pernyataan resmi pemerintah maka akan lebih mudah ditanamkan di masyarakat. Lebih lanjut, hal ini akan semakin mudah lagi diterima oleh masyarakat jika berhubungan dengan permasalahan aktual yang terjadi pada mereka.

Pernyataan resmi pemerintah AS tentang konsepsi pengelompokan umat Islam akan turut membentuk dan mengarahkan opini publik bahwa Islam memang memiliki banyak kelompok aliran baik itu yang moderat maupun radikal-ekstrimis (fundamentalis). Hal ini memang lebih mudah diterima masyarakat mengingat isu seputar radikalisme Islam mulai mencuat pasca perang dingin seiring dengan maraknya aksi terorisme yang berkedok agama (khususnya Islam).

Pemerintah AS berusaha menanamkan konsepsi di masyarakat tentang adanya kelompok-kelompok Islam dan tentunya dengan memunculkan adanya kelompok yang berbahaya yaitu fundamentalisme Islam yang radikal, ekstrimis, militan, dan identik dengan kekerasan. Sebagai contoh bisa kita lihat dari pernyataan Anthony Lake, penasehat keamanan Nasional era Bill Clinton pada tahun 1994, “*there should be no doubt that islamic extremism poses a threat to our national interest*”⁷ (tidak ada keraguan bahwa ekstrimisme Islam membawa

⁷ Nizar Messari. *Identity and Foreign Policy : The Case of Islam in U.S. Foreign Policy*. Nama jurnal dan penerbit tidak diketahui hal. 239

sebuah ancaman bagi kepentingan nasional kita). Seperti diketahui, saat itu pemerintah maupun rakyat AS memang sedang mengalami permasalahan akibat serangan teroris (Islam) yang menyerang kedubes AS di Yaman (1992) dan gedung WTC di New York (1993). Momentum yang “tepat” ini jelas memudahkan konsepsi tersebut ditanamkan di masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah menerima bahwa ada kelompok fundamentalisme Islam (atau ekstrimisme Islam) yang merupakan ancaman bagi mereka.

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh presiden Bush. Memperingati 4 tahun tragedi WTC pada 11 September 2005 lalu, dalam pidatonya Bush mengatakan, *“Some call this evil Islamic radicalism; others, militant Jihadism; still others, Islamo-fascism. Whatever it's called, this ideology is very different from the religion of Islam. These extremists distort the idea of jihad into a call for terrorist murder against Christians and Jews and Hindus -- and also against Muslims from other traditions, who they regard as heretics. Many militants are part of global, borderless terrorist organizations like al Qaeda, which spreads propaganda, and provides financing and technical assistance to local extremists, and conducts dramatic and brutal operations like September the 11th. Other militants are found in regional groups, often associated with al Qaeda..... Islamic radicalism is more like a loose network with many branches than an army under a single command.”*⁸ (beberapa orang menyebut (kejahatan) ini radikalisme Islam, yang lain (menyebutnya) jihadisme militan, ada juga yang menyebut fasisme-Islam. Apapun sebutannya, ideologi ini jelas berbeda dengan agama Islam...kaum ekstrimis seperti ini mendistorsi ide jihad menjadi panggilan untuk membunuh kaum Yahudi dan Nasrani dan Hindu- serta juga kaum Muslim lain yang berbeda tradisi dengan mereka, yang mereka anggap sebagai kaum kafir-. Banyak kaum militan adalah bagian dari organisasi teroris global seperti Al Qaeda, yang menyebarkan propaganda, dan menyediakan bantuan finansial dan teknis kepada kaum ekstrimis lokal, dan melakukan aksi brutal dan dramatis seperti peristiwa 11 September. Kaum militan lain ditemukan dalam kelompok-kelompok regional, sering berhubungan dengan Al

⁸ <http://www.juancole.com/2005/10/arguing-with-bush-and-gwot-bush.html> akses 24 oktober 2005

Qaeda.....radikalisme Islam lebih merupakan sebuah jaringan kerja yang longgar dengan banyak cabang daripada seperti tentara dalam satu komando tunggal.)

Pidato Bush tersebut jelas juga berusaha mempertegas tentang adanya kelompok radikal dan ekstremis Islam yang berbeda dengan Islam lain pada umumnya. Kelompok seperti ini jelas merupakan permasalahan tersendiri, termasuk bagi umat Islam sendiri. Bush juga berusaha menampilkan sosok “konkret” seperti Al Qaeda yang sudah terstigmatisasi sebagai pelaku terorisme 11 September 2001 dan memunculkan wacana tentang jaringannya yang tersebar di seluruh dunia.

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa pemerintah turut berperan dalam proses penanaman konsepsi ini. Dengan berbagai pernyataan resmi tersebut, jelas akan menggiring opini masyarakat terhadap Islam dimana masyarakat akan turut memetakan Islam atas kelompok fundamentalis, radikal, eksterimis dengan kelompok Islam moderat. Jika masyarakat sudah meyakini hal ini, maka setiap kebijakan yang akan diberlakukan AS nantinya jelas akan mendapatkan respon positif dari masyarakat, termasuk dari kelompok Islam sendiri. Terutama kebijakan yang diberlakukan terhadap kelompok fundamentalisme Islam yang merupakan masalah nyata bagi mereka.

4.1.1.3. Pemberitaan Media Massa

Dari ketiga saluran yang dikemukakan penulis di atas, media massa bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari proses penanaman konsepsi ini. Media massa punya peranan penting dalam penyebaran pemikiran para akademisi ataupun penyajian pernyataan dan sikap resmi pemerintah. Media massa bisa menjadi alat propaganda yang sangat efektif karena cakupannya yang sangat luas di setiap dimensi masyarakat dan kemampuannya dalam menimbulkan kesan yang mendalam bagi konsumennya. Media massa tidak hanya bisa menjadi penyaji berita faktual dan obyektif, tapi di sisi lain juga bisa membawa misi kepentingan dari pemerintah. Melihat dari yang fungsi terakhir, maka dalam hal ini media massa menjadi *Repressive State Apparatus* (RSA) yang berfungsi menanamkan

konsep ataupun ideologi secara represif untuk menjamin kepentingan hegemoni ideologis pemerintahnya.

Dalam proses penanaman konsepsi pengkotakan kelompok Islam, media massa AS memang sangat mendukung. Hal ini karena, sebagian besar media massa AS tersebut lebih pro pemerintah. Selain itu, mereka juga lebih berminat menyajikan tulisan-tulisan dari para akademisi yang konfrontatif terhadap Islam. Karena itu, media massa AS memiliki peranan sangat signifikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kelompok-kelompok Islam tersebut memang ada, termasuk tentang adanya marabahaya fundamentalisme Islam.

Sebagai contoh dari media massa AS yang paling berperan dalam hal ini adalah *New York Times* (NYT) dan *Cable News Network* (CNN). Peranan mereka dalam proses ini memang tidaklah sedikit. Media seperti ini punya pengaruh kuat di masyarakat karena kredibilitasnya yang tinggi di mata mereka. Selain itu, hasil pemberitaan dari media ini juga banyak dijadikan referensi oleh media lain dan kembali diolah untuk konsumen mereka masing-masing. Secara institusional, CNN dan NYT juga memiliki gengsi tersendiri bagi konsumennya.

Peranan media dalam meyakinkan publik tentang kebenaran dari konsepsi ini antara lain bisa dilihat dari pemberitaan-pemberitaannya. *New York Times* (edisi majalah) pada tanggal 7 Oktober 2001, mengomentari pelaku terorisme 11 September menuliskan ; *The terrorists' strain of Islam is clearly not shared by most Muslims and is deeply unrepresentative of Islam's glorious, civilized and peaceful past. But it surely represents a part of Islam -- a radical, fundamentalist part -- that simply cannot be ignored or denied.*⁹ (tekanan teroris Islam adalah jelas bukan bagian dari kebanyakan muslim dan tidak sama sekali merepresentasikan kejayaan masa lalu Islam yang beradab dan damai. Tapi yang pasti (teroris tersebut) mewakili sebuah kelompok Islam- kelompok radikal fundamentalis- yang jelas tidak bisa diabaikan). Dalam tulisan tersebut, NYT jelas berusaha menerangkan dan juga membangun opini pembacanya bahwa dalam

⁹ New York Times Magazine, 7 Oktober 2001.

<http://www.andrewsullivan.com/print.php?artnum=20011007> akses 18 Oktober 2005

Islam memang terdapat kelompok-kelompok. Dalam Islam juga terdapat kelompok radikal fundamentalis yang jelas berbahaya dan membawa ancaman bagi umat manusia. Kelompok inilah yang kini banyak melakukan aksi teror dengan membawa-bawa nama Islam.

Selain itu, dalam sebuah pemberitaannya, CNN menyajikan, "*The Muslim world is a phrase that in itself is misleading. We're talking about more than 50 countries with a variety of forms of government. If you were to place these countries on a spectrum, from the most radical, to the most secular and modern, certainly, the country on the most radical end would be Afghanistan. The country on the other end of the spectrum, the Muslim country closest to universal ideals of democracy and individual rights, is Turkey.*"¹⁰ (dunia muslim adalah sebuah frase yang menyesatkan di dalamnya. Kita bicara tentang lebih dari 50 negara dengan bermacam-macam bentuk pemerintahan. Jika anda menempatkan negara-negara ini dalam sebuah spektrum, dari yang paling radikal ke yang paling sekuler dan modern, tentu saja negara yang paling radikal adalah Afganistan. Negara Muslim yang paling dekat dengan ide-ide universal demokrasi dan hak-hak individu, adalah Turki). Upaya media dalam meyakinkan pembaca tentang pengelompokan umat Islam bisa lebih jelas dilihat dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini pengelompokan dilakukan dalam dimensi yang lebih luas dan jelas, yaitu negara. Tujuannya pun jelas untuk turut meyakinkan publik bahwa konsepsi AS tentang pengelompokan umat Islam adalah suatu hal yang faktual dan realistis. Dengan demikian diharapkan opini konsumen (masyarakat) juga akan terbentuk dalam memandang Islam dalam kategorisasi yang sesuai dengan konsepsi AS tersebut.

Jika opini pembaca sudah bisa dibentuk dan diarahkan seperti itu maka akan lebih mudah lagi untuk meyakinkan mereka akan kebijakan yang akan di ambil pemerintah AS terhadap kelompok Islam tersebut, khususnya yang fundamentalis. Hal ini karena masyarakat (khususnya pembaca), memiliki opini yang sejalan dengan *mainstream* pemikiran pemerintah AS yang sama-sama memandang bahwa Islam terdiri atas kelompok-kelompok dan kelompok Islam

¹⁰ <http://archives.cnn.com/2001/COMMUNITY/10/09/rec.kinzer.cnn/> akses 24 Oktober 2005

fundamentalis adalah yang paling bermasalah dan membawa ancaman bagi umat manusia.

Karena masyarakat juga telah meyakini bahwa kelompok fundamentalisme Islam adalah ancaman maka mereka pun akan lebih mudah dan yakin dalam memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah AS, terutama dalam menanggulangi masalah tersebut. Masyarakat sendiri juga akan lebih yakin jika tindakan mereka (memberikan dukungan) tersebut punya dasar ataupun “justifikasi” ilmiah di mana hal ini ditentukan oleh kemampuan para kaum akademisi dalam meyakinkan masyarakat akan ide-idenya dan di sisi lain masyarakat juga butuh “legalisasi” dari otoritas yang terkait di mana dalam hal ini pemerintahlah yang memainkan peran dalam meyakinkan masyarakatnya tentang tindakan mereka tersebut.

Dengan keadaan sedemikian, dimana ide-ide kaum akademisi, pernyataan dan sikap resmi pemerintah, dan didukung oleh pemberitaan media massa yang kuat, maka konsepsi yang berusaha ditanamkan di masyarakat bisa secara efektif diterima. Dalam hal ini tentang pengelompokan umat Islam dan lebih spesifiknya permasalahan fundamentalisme Islam yang mana hal ini akan membentuk opini masyarakat dan mengarahkannya agar meyakini bahwa kelompok-kelompok Islam tersebut memang ada dan tentang kelompok fundamentalis, meskipun merupakan bagian dari umat Islam, tapi membawa potensi ancaman tidak hanya bagi umat Islam sendiri, tapi juga bagi seluruh dunia. Jika konstruksi seperti ini sudah terbangun, maka bisa diharapkan setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah AS terhadap kelompok Islam khususnya fundamentalis, akan dianggap sebagai sebuah kebenaran dan keharusan yang selanjutnya juga akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, bahkan dari kalangan Islam sendiri. Inilah tujuan utama dari proses ini sebelum pemerintah AS benar-benar mengambil sikap dan kebijakan terhadap kelompok-kelompok Islam tersebut.

4.1.2. Kebijakan AS Terhadap Islam : Kasus Kelompok dan Negara

Dalam kenyataan konkret di lapangan, berbagai rekomendasi hasil pemikiran para ahli seperti Cheryl Benard maupun Daniel Pipes di atas secara

signifikan cukup berpengaruh terhadap berbagai kebijakan resmi pemerintah AS. Hal ini bisa kita lihat bagaimana kebijakan AS yang cenderung represif terhadap kelompok maupun negara Islam yang mereka labeli sebagai atau berhubungan dengan gerakan Islam fundamentalis. Sebaliknya, AS juga memberlakukan kebijakan yang mendukung terhadap mereka yang lebih moderat, akomodatif, dan kompromis.

Dalam level group (kelompok) sebagai contoh kasus misalnya adalah sikap AS terhadap kelompok Hizb Tahrir (HT) yang dituduh sebagai salah satu pengusung fundamentalisme Islam. Banyak fitnah dan tuduhan yang sering dialamatkan pada HT. Misalnya tuduhan bahwa HT adalah organisasi sempalan, militan, dan teroris.¹¹ Dr. Ariel Cohen, seorang akademisi, pernah menyatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah sebuah ancaman yang muncul bagi kepentingan AS di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah. HT adalah organisasi klandestain, radikal, anti Amerika, serta menganut prinsip-prinsip seperti Marxisme-Leninisme, yang *notabene* merupakan musuh ideologis liberal kapitalisnya AS.¹² HT juga dituduh sebagai organisasi teroris dan merupakan “pemasok” teroris bagi Al Qaeda, Taliban, maupun aktivitas teroris internasional lainnya yang mengatasnamakan *jihād*. Dalam tragedi WTC 2001, diketahui beberapa orang pembajak pesawat dalam aksi tersebut memiliki hubungan kuat dengan HT yang beraktivitas di Jerman. Akibat tuduhan ini, nama HT sempat tercemar. Publikasi dari berbagai media massa negara-negara Barat semakin menyudutkan HT.

Kemudian seiring dengan kampanye perang terhadap terorismenya, AS dengan slogan “*With Us or Without Us*”nya menciptakan tekanan baru kepada negara-negara lain untuk mengambil sikap terhadap kampanye perang melawan terorisme internasional, apakah turut mendukung AS dan akan dianggap sebagai kawan, ataukah memilih berseberangan dengan AS dan dianggap sebagai lawan.

¹¹ Yahya Abdurrahman. *Hizbut Tahrir Menjawab Tuduhan Miring*. Dalam redaksi@hayatulislam.net. Koneksi via mi-lis akses 3 Maret 2005

¹² Ariel Cohen adalah seorang peneliti dari Russian and Eurasian Studies in the Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies at The Heritage Foundation. Tulisan dia ini bisa dilihat dalam Ariel Cohen. *Radical Islam and US Interest in Central Asia*. <http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/Test102903.cfm> akses pada 27 Juni 2005

Sebagai tindak lanjut, AS juga menekankan kepada setiap negara untuk bertindak tegas terhadap organisasi yang ditengarai sebagai fundamentalis dan berhubungan dengan aksi terorisme. Akibat tekanan ini, banyak organisasi Islam yang harus menjadi korban akibat tuduhan yang sering tidak berdasar tersebut. Tidak jarang kelompok Islam seperti ini mendapat perlakuan represif dari pemerintah di negara Islam sendiri apalagi di negara-negara di bawah kepemimpinan sekuler yang memang sering merasa terancam dengan kebangkitan gerakan Islam.

HT termasuk salah satu “korban” dari kebijakan AS ini. Ariel Cohen juga menuliskan bahwa AS memberikan “pengarahan” kepada para sekutunya di kawasan di mana HT beroperasi, untuk lebih mengenal dan memperlakukan HT sebagai *the growing threat*.¹³ Akibatnya, seringkali kelompok ini mendapatkan perlakuan represif dari negara di mana organisasi ini berada, seperti Yordania, Mesir, Pakistan, maupun Turki.

Di Inggris, pasca terjadinya bom London pada Juli 2005, Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengeluarkan pernyataan yang menyatakan HT sebagai organisasi yang terlarang dan dalam waktu dekat akan dibubarkan sebagaimana organisasi Al Muhajirun yang sudah dibubarkan sebelumnya pada Nopember 2004.¹⁴ Selain itu, para pemimpin maupun pengikut organisasi ini pun sering mendapat perlakuan yang kejam dari rezim penguasa seperti penangkapan, pemenjaraan, hingga pembunuhan.

Penderitaan paling berat bagi HT mungkin terjadi di Uzbekistan, yang rezim pemerintahannya memang dekat dengan AS. Kepentingan domestik rezim sekuler Islam Karimov (presiden Uzbekistan) terhadap kelompok Islam bisa dikatakan menemukan momentumnya dengan kepentingan global AS terhadap terorisme dan fundamentalisme Islam. Rezim Karimov memang sedikit mengalami masalah dengan kelompok-kelompok Islam di negaranya yang menentang praktek sekularismenya dan menuntut diberlakukannya syariah Islam. HT memang termasuk kelompok Islam yang paling “vokal” di Uzbekistan. Kebijakan *war on terror* yang dikampanyekan secara global oleh AS akhirnya

¹³ *ibid.*

¹⁴ Jawa Pos, 6 Agustus 2005

menjadi justifikasi tersendiri bagi kebijakan represif Karimov terhadap HT. Tuduhan pemerintah AS bahwa HT juga memiliki keterkaitan dengan tragedi WTC seakan merupakan dukungan dari pihak AS yang memang dekat dengan rezim Karimov. Di Uzbekistan, HT diperlakukan layaknya organisasi kriminal. Anggota-anggotanya banyak yang ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan yang sering tidak jelas. Setelah dipenjarakan, mereka pun diperlakukan serin di luar batas kemanusiaan. Laporan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) pada tahun 2003 menyebutkan di sebuah penjara di koloni no. UY a 64/47 daerah Navoiy, distrik Qizil Tapa, telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap narapidana yang merupakan anggota HT. Di penjara itu, anggota HT banyak mengalami pelanggaran seperti pemasungan kaki dan percobaan pemerkosaan. Pada musim dingin 2003, 44 orang anggota HT dibiarkan tanpa busana di tengah kondisi udara dingin penjara. Selain itu, yang juga tidak kalah parah, adalah larangan adanya praktek keagamaan di penjara tersebut, artinya narapidana tidak boleh ada yang beribadah. Sanksi penyiksaan fisik telah dipersiapkan kepada mereka yang masih “nekat” untuk beribadah.¹⁵

Hal sedemikian ternyata tidak terlalu ditanggapi oleh pemerintah AS, yang di sisi lain selalu mempromosikan perjuangan terhadap HAM dan demokrasi. AS terkesan membiarkan saja hal ini terjadi. Bahkan bisa dikatakan justru mendukung terhadap kebijakan Karimov ini.

Hal ini memang tidak lepas dari kepentingan AS terhadap terorisme dan fundamentalisme Islam. Pasca tragedi WTC 2001, Uzbekistan merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Afganistan yang paling kooperatif terhadap kepentingan AS dalam memburu Osama bin Laden di Afganistan. Sebagai persiapan penyerangan ke Afganistan, pada tanggal 5 Oktober 2001, menteri pertahanan AS, Donald Rumsfeld, mengadakan kunjungan ke Uzbekistan dalam rangka membangun koalisi anti teror. Kedua negara sepakat untuk memerangi terorisme dan beberapa jam setelah kesepakatan tersebut, AS langsung mengirim beberapa pesawat tempurnya untuk menempati pangkalan di

¹⁵ http://www.muslimuzbekistan.com/eng/ennews/2004/02/ennews07022004_g.html akses pada 12 Oktober 2005

Uzbekistan. Sebagai imbalan atas sikap positif Uzbekistan ini, AS menjanjikan bantuan pembangunan ekonomi.

Pada tanggal 11-14 Maret 2002, giliran presiden Karimov yang berkunjung ke Washington dengan agenda pembicaraan kemungkinan kerjasama ekonomi. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, direncanakan pemberian bantuan sebesar US\$ 60 juta pada tahun 2002 sebagai tambahan bantuan yang telah diberikan pada Desember 2004 sebesar US\$ 100 juta.¹⁶

Dalam kasus ini, jelas bahwa HT menjadi korban dari kepentingan dan kebijakan AS. Posisi HT, sebagai organisasi Islam fundamentalis secara konseptual dan kepentingan jelas bertabrakan dengan AS. Untuk itu, AS jelas akan melakukan kebijakan *pressure* terhadap HT. Meskipun dalam beberapa kasus di atas, AS tidak memberlakukan kebijakan langsung terhadap HT, akan tetapi memberikan tekanan terhadap negara di mana HT beraktivitas untuk selanjutnya rezim di negara tersebutlah yang mengambil sikap represif terhadap HT. Jika negara tersebut akomodatif, tentunya akan mendapatkan imbalan tersendiri dari AS. Hal seperti ini jelas akan lebih efektif jika rezim di negara yang bersangkutan juga memiliki kepentingan yang sama. Misalnya rezim sekuler yang merasa terancam dengan eksistensi dan aktivitas dari kelompok fundamentalisme Islam termasuk HT.

Setali tiga uang dengan HT, hal yang kurang lebih sama juga dialami oleh berbagai organisasi lain seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jihad Islam dan Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan contoh kasus di Indonesia seperti Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Thalib, Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizieq, maupun Abu Bakar Ba'syir dari MMI, yang sering mendapatkan perlakuan tidak simpatik dari pemerintah seperti penangkapan para anggotanya dengan tuduhan tindak kekerasan maupun keterlibatan dalam aksi terorisme. Meskipun tuduhan seperti itu terkadang belum bisa sepenuhnya dibuktikan dan masih merupakan tekanan dari tuduhan buta pemerintah AS.

¹⁶ Evin Asmira. *Kebijakan Presiden Uzbekistan Islam Karimov Dalam Memerangi Terorisme Internasional Pasca Serangan 11 September 2001*. skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember: 2003 hal. 104

Namun di sisi lain, berbeda dengan hal tersebut di atas. Kebijakan AS terhadap kelompok Islam yang menurutnya lebih moderat dan kompromis justru lebih manis dan cenderung mendukung keberadaan dan fungsi kelompok tersebut. Kelompok-kelompok Islam yang menurut mereka moderat dan sejalan dengan nilai-nilai serta kepentingan AS, maka akan dibantu dan terus didukung perkembangannya. Bantuan dan dukungan tersebut bisa dalam berbagai bentuk seperti bantuan dana, pelatihan, seminar-seminar, dan sebagainya.

Sebagai contoh di Indonesia, banyak organisasi Islam yang mendapat bantuan dari pemerintah AS maupun LSM-LSM yang berasal dari AS (seperti TAF, maupun USAID). Organisasi seperti JIL, KISDI, KIUK, bahkan NU dan Muhammadiyah diberitakan pernah mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini disebabkan sikap dan posisi positif mereka terhadap nilai-nilai yang ditanamkan oleh pemerintah AS dan LSM-nya baik itu liberalisme, pluralisme, inklusivisme, maupun demokrasi.

Jika melihat kondisi yang seperti ini, jelas bisa kita lihat adanya *hidden agenda* dari kebijakan AS dalam memberikan bantuan terhadap organisasi Islam tersebut. Seperti dikemukakan oleh Cheryl Benard dan Daniel Pipes di atas, salah satu langkah yang bisa diambil AS dalam menghadapi permasalahan fundamentalisme Islam adalah dengan memunculkan “tandingan” dari kalangan Islam sendiri, dalam hal ini kelompok Islam lain yang moderat. Dukungan terhadap Islam moderat diharapkan akan mampu memberikan *counter* baik wacana maupun praktek terhadap kelompok fundamentalisme Islam. Lebih lanjut hal ini ditujukan untuk meredam perkembangan fundamentalisme Islam itu sendiri. Untuk itu, AS harus mendukung keberadaan dan perkembangan kelompok-kelompok Islam moderat sebagai salah satu strateginya dalam melumpuhkan kelompok fundamentalisme Islam. Hal seperti ini juga disebutkan dalam publikasi lain dari RAND Corporation yang berjudul *The Muslim World After 9/11*, “bahwa hubungan disharmonis antara Islam dan Barat sebenarnya lebih diakibatkan oleh kelompok ekstrimis dan teroris Islam, yang merupakan sosok jahat dan sangat anti Amerika. Karena itu yang harus dilakukan AS adalah

menetralisir keberadaan dari kaum ekstrimis Islam tersebut dengan dukungan kaum Muslim yang moderat.¹⁷

Hal seperti inilah yang diterapkan AS di Indonesia. AS berusaha memberikan berbagai bantuan dan dukungan kepada organisasi Islam yang moderat. Organisasi Islam yang dibantu AS jelas memiliki kesamaan pemikiran dengan *mainstream* pemikiran AS dan mendukung nilai-nilai yang diusung AS. Kesamaan seperti itu bisa dilihat dari kutipan pernyataan tokoh-tokoh dari organisasi Islam yang pernah dibantu AS tersebut. Said Agil Siradj dari NU pernah mengatakan, “*Prinsip lain yang digariskan Al Quran, adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan oleh karena itu layak memperoleh pahala dari Tuhan*”.¹⁸ Dari sini jelas, bahwa tokoh tersebut berusaha memberikan pemahaman tentang inklusivisme dan pluralisme agama yang “dibenarkan” sesuai dengan prinsip Islam (Al Quran). Dalam Al Qur’an sendiri dijelaskan bahwa hanya agama Islamlah yang paling diridhai Allah SWT, artinya tidak ada inklusivisme dan pluralisme semacam itu. Hanya umat Islam, yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang akan mendapatkan pahala atas setiap kebajikan yang dilakukannya. Inklusivisme dan pluralisme tidak lain hanyalah “pesanan” ideologis hegemonik AS yang coba diterapkan dan dicari pembedanya dalam Islam. Contoh lain lagi adalah komentar dari salah satu kontributor JIL, Denny J.A. yang mengatakan, “*Islam Liberal adalah kelompok yang menginterpretasikan Islam dengan modernitas dan demokrasi. Dan demokrasi sebagaimana yang diteorikan dan dipraktikkan di seluruh dunia, adalah bersifat sekuler. Di mana negara mengambil jarak yang sama atas pluralitas agama maupun pluralitas interpretasi agama*.”¹⁹ Kembali lagi hal ini menunjukkan keselarasan pemikiran antara organisasi Islam tersebut dengan *mainstream* pemikiran AS. Dalam hal ini isu yang diangkat adalah modernisasi, sekularisme, demokrasi, dan pluralisme agama, yang mana masing-

¹⁷ A. Fatih Syuhud. *Amerika Serikat dan Islam Liberal*. <http://aneka-media.blogspot.com/> akses 27 Juli 2005

¹⁸ Adian Husaini. *Islam Liberal : Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003 hal. 81

¹⁹ *ibid.* hal. 8

masing dari isu itu adalah saling terkait. Kesemuanya adalah ide-ide dari budaya AS yang memang coba diterapkan di Indonesia. Berbagai ide tersebut jelas ditujukan untuk mengkondisikan umat Islam Indonesia seperti “pola” yang diinginkan AS. Umat Islam yang liberal, pluralis, sekuler, dan demokratis, yang tidak lain adalah umat Islam yang akomodatif terhadap nilai dan kepentingan AS. Di sisi lain, dengan menanamkan ide-ide seperti ini dan mendukung kelompok Islam moderat yang turut memperjuangkan ide-ide tersebut maka hal ini juga ditujukan untuk menekan kelompok Islam fundamentalis yang mereka citrakan sebagai kelompok yang eksklusif, militan, radikal, ekstrimis, fanatik, ademokratis dan identik dengan kekerasan.

Selain itu, dalam hubungannya dengan kelompok Islam fundamentalis, AS tidak hanya berusaha memunculkan *counter* dari kalangan Islam sendiri, tapi dari pemerintah resmi AS dalam rangka kampanye global perang melawan terorismenya, juga melarang siapapun untuk mendukung kelompok-kelompok terorisme atau kelompok yang punya hubungan dengan aksi terorisme internasional. Hal seperti ini memang diberlakukan AS baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Di dalam negeri pemerintah AS memberlakukan Undang-undang *Financial Anti Terrorism* sedangkan untuk *level* internasional, AS menggunakan peran dominannya di PBB untuk memberlakukan resolusi 1373 pada tahun 2001 tentang pembentukan *Counter Terrorism Council* yang salah satu isinya adalah “*The Council also decided that States should prohibit their nationals or persons or entities in their territories from making funds, financial assets, economic resources, financial or other related services available to persons who commit or attempt to commit, facilitate or participate in the commission of terrorist acts.*”²⁰ (dewan (CTC) juga memutuskan bahwa negara-negara seharusnya memberlakukan larangan baik terhadap pemerintahnya, warganya, maupun kelompok-kelompok yang berada di wilayahnya (negara tersebut) untuk mengumpulkan dana, aset-aset keuangan, sumber-sumber ekonomi, dana dan sebagainya kepada orang-orang yang melakukan ataupun mencoba melakukan, memfasilitasi atau berpartisipasi dalam tindakan-tindakan teroris).

²⁰ <http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm> akses 8 agustus 2005

Hal di atas jelas merupakan landasan yuridis bagi kebijakan AS dalam melarang bantuan kepada kelompok-kelompok yang dinilai berhubungan dengan tindakan terorisme. Karena kelompok-kelompok fundamentalisme Islam seringkali diasosiasikan dengan terorisme maka kelompok fundamentalisme Islam tersebut juga tidak akan diberi bantuan.

Hal seperti ini pula yang akhirnya turut didukung oleh lembaga-lembaga donor AS. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Lies Marcoes, salah seorang tokoh TAF yang juga merupakan anggota Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama, ketika ia ditanyai mengapa tidak memberikan bantuan dana (seperti yang dilakukan TAF terhadap JIL) kepada ormas Islam lain yang juga turut memperjuangkan kepentingan Islam, seperti FPI, MMI, ataupun Laskar Jihad. Ia mengatakan ;” *Kami committed dengan antiterorisme dan kekerasan. Kalau kedua hal itu ada pada sebuah lembaga, maka kami tidak akan membantu*”. Ulil Abshar Abdhalla, seorang tokoh JIL, juga menambahkan. *“Sudah tentu mereka (pemerintah maupun LSM dari AS) hanya akan mendanai kegiatan-kegiatan yang punya satu visi dengan mereka. Tidak mungkin mereka mendanai kegiatan organisasi yang bersifat fanatisme agama”*.²¹

Dari sini maka lebih jelas, bahwa kebijakan AS dalam mendukung kelompok-kelompok Islam moderat tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki citranya di mata umat Islam. Selain itu, mereka juga berkepentingan untuk memperoleh dukungan resiprokal dari umat Islam yang mereka dukung tadi terhadap berbagai kebijakan dan kepentingan AS sendiri. Sebagai contoh dalam rangka perang melawan terorisme dan kepentingan AS terhadap fundamentalisme Islam. AS butuh dukungan Islam moderat untuk turut menekan aktivitas dan perkembangan kelompok Islam fundamentalis dan dalam konteks yang lebih luas lagi AS juga membutuhkan dukungan mereka atas kampanye perang melawan terorisme. Meskipun dalam hal ini terkandung kepentingan lain yang lebih besar, yaitu mempertahankan hegemoni globalnya.

²¹ http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1499&Itemid=1 akses 27 Juli 2005

Pada tingkatan negara (*state*), hal seperti ini juga diterapkan oleh AS. Dalam hal ini khususnya pada negara-negara Islam (berpenduduk mayoritas muslim atau pemerintahannya berasaskan agama Islam). Pada negara Islam yang penduduknya dinilai sebagai muslim moderat, kompromis, dan akomodatif terhadap nilai-nilai dan kepentingan AS, maka AS pun akan memberikan penghargaan dan dukungannya, sebaliknya jika negara Islam tersebut dianggap punya hubungan dengan fundamentalisme Islam seperti melindungi ataupun membiarkan pertumbuhan aktivitas fundamentalisme Islam dalam negaranya, maka AS akan mengambil sikap represif dan agresif terhadap negara tersebut.

Contoh nyata dari kasus ini misalnya bisa kita lihat bagaimana sikap AS terhadap muslim Bosnia semasa konflik Balkan. Dalam kasus ini, AS lebih menempatkan posisinya dalam mendukung Bosnia. AS pun mengakui kemerdekaan Bosnia pasca referendum pada tahun 1992. AS memang memperlihatkan sikap yang mendukung karena menilai muslim Bosnia adalah muslim yang moderat, sebagai muslim yang baik (*nice muslim*) yang berbeda dengan kebanyakan muslim lainnya (*dangerous muslim*), sebagai *westernized muslim* yang mendukung prinsip multietnisitas dan demokrasi. Islam di Bosnia pun juga dianggap sebagai Islam yang modern dan toleran.²²

Hal ini menunjukkan sikap dan posisi “baik” muslim Bosnia terhadap nilai-nilai dan kepentingan AS. Hal ini pulalah yang turut melandasi AS untuk membantu kepada muslim Bosnia terutama pada masa konflik Balkan. Meskipun pada awalnya, AS lebih bersifat pasif dalam menyikapi konflik ini dan baru “beraksi” setelah negara-negara Eropa turun tangan dan AS sendiri mendapatkan desakan publik internasional.

Sebagai langkah konkret, AS kemudian bersama-sama negara Dewan Keamanan PBB mengambil sikap tegas dengan memberlakukan berbagai resolusi DK PBB sebagai landasan yuridis dalam upaya menghentikan konflik di Semenanjung Balkan tersebut. Berbagai resolusi yang diprakarsai oleh AS dan anggota DK PBB lainnya tersebut antara lain ; 781 dan 786 pada tahun 1992 tentang pemberlakuan *Non Flight Zone* (zona larangan terbang) di kawasan

²² op cit Nizar Messari. Hal.244

Bosnia Herzegovina, 819, 824, dan 1031 pada tahun 1995 tentang pemberlakuan *safe area* (wilayah aman) di kawasan Bosnia Herzegovina (meliputi Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihać, dan Srebrenica), 1174 pada tahun 1998 tentang jaminan kedaulatan dan integritas nasional negara Bosnia Herzegovina dalam batas-batas wilayah yang diakui, dan 1422 pada tahun 2002 tentang perpanjangan masa negara Bosnia Herzegovina dalam mandat dan perlindungan PBB.²³

Hal di atas menunjukkan sikap “baik” AS dalam membantu muslim Bosnia, umat muslim yang dianggap AS sebagai muslim yang baik dan patut untuk dibantu.

Namun meskipun demikian, di sisi lain AS melakukan hal yang berbeda terhadap negara Islam yang dianggapnya berhubungan dengan fundamentalisme Islam. Dalam hal ini, negara tersebut dituduh turut membiarkan dan melindungi perkembangan paham-paham radikalisme dan ekstrimisme beragama yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi melahirkan aksi terorisme. Untuk itu, sepantasnya negara tersebut mendapatkan “hukuman”.

Hal ini bisa kita lihat pada kasus Afganistan pasca tragedi WTC 2001. Rezim Taliban yang berkuasa negara tersebut dihubungkan dengan organisasi Al Qaeda dan Osama bin Laden yang dituduh sebagai otak dari serangan terhadap WTC tersebut. Rezim Taliban dituduh melindungi keberadaan Osama bin Laden. Hal ini seperti diungkapkan dalam pernyataan resmi pemerintah AS yang dikutip oleh CNN dalam sebuah pemberitaannya, “*Pelaku 11 September adalah Osama bin Laden dengan Al Qaeda sebagai organisasinya, dan Taliban di Afganistan yang melindunginya*”.²⁴

Taliban pun kemudian didesak untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada AS. Bahkan desakan ini pun juga datang dari PBB melalui sekjenjnya Kofi Annan yang juga menyarankan agar Taliban menyerahkan segera Osama bin Laden sekaligus juga menutup kamp-kamp pelatihan militer Al Qaeda.²⁵ Namun

²³ <http://home.wanadoo.nl/tcc/un/scr/r0836.html> akses pada 31 Juli 2005

²⁴ CNN.com. *Propaganda War May Miss Target*. Dikutip dari M. Mufti Ali. *Propaganda AS Dalam Penyerangan Ke Afganistan Pada Tahun 2001*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Jember: Jember, 2004 hal. 87

²⁵ *ibid.* hal.99

pemimpin Taliban saat itu, Mullah Mohammad Omar, menolak keras permintaan AS tersebut sebelum AS menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas keterlibatan Osama dalam peristiwa WTC tersebut. Akibat sikapnya ini, Taliban pun turut dianggap bersalah dan harus bertanggungjawab karena telah melindungi pelaku teror. Hal ini sesuai dengan slogan Bush dalam kampanye perang melawan terorismenya, *“Either you are with us, or you are with the terrorists”* dan dalam hal ini Taliban menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang “salah” (bersama teroris) sehingga Taliban pun harus menerima konsekuensinya.

Karena Taliban tidak kooperatif dengan kampanye anti terorismenya AS, maka Talibanpun juga dianggap sebagai musuh. Pada Oktober 2001, pasukan dari operasi *Infinite Justice* (yang selanjutnya diganti namanya menjadi operasi *Enduring Freedom*) AS berangkat menyerang Afganistan. AS pun mendapat dukungan banyak pihak, terutama sekutunya di NATO yang turut mengirimkan baik personel maupun persenjataan. Dalam waktu yang hanya sekitar satu bulan, rezim Taliban pun berhasil ditumbangkan.

Meskipun pada akhirnya Osama bin Laden pun tetap tidak dapat ditemukan, tapi pemerintah AS kembali berkilah bahwa serangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mencari Osama bin Laden sang pelaku teror, tapi juga untuk menciptakan suasana atau iklim demokrasi di Timur Tengah dan hal ini pada akhirnya ditujukan untuk meredam perkembangan fundamentalisme Islam maupun juga aksi terorisme internasional.

Namun di samping contoh di atas, dalam tataran prakteknya, AS tidak selalu berpedoman dengan konsepsi bahwa negara yang berhubungan dengan fundamentalisme Islam harus ditekan dan yang tidak berhubungan akan mendapat dukungan. Lebih jauh lagi, hal ini disesuaikan pula dengan kepentingan aktual AS dan “standar kepatuhan” dari negara tersebut terhadap AS, terutama dalam mengakomodasi kepentingan AS itu sendiri.

Hal ini bisa kita lihat pada standar ganda yang diterapkan AS pada Arab Saudi dan Irak. AS menerapkan politik yang agresif terhadap Irak, terutama rezim Saddam dengan menghubungkan-hubungkannya dengan Osama bin Laden, pimpinan organisasi fundamentalisme Islam Al Qaeda yang juga merupakan pelaku

terorisme internasional. Pasca tragedi WTC 2001, Presiden Bush menuding Saddam Hussein berhubungan dengan Al Qaeda. Hal ini diungkapkan dalam pidatonya; “*This is a man that we know has had connections with al Qaeda. This is a man who, in my judgment, would like to use al Qaeda as a forward army*”.²⁶ (inilah orang yang kita ketahui punya hubungan dengan Al Qaeda. Inilah orang yang, dalam penilaianku, akan menggunakan Al Qaeda sebagai tentara.). Selanjutnya, meskipun tanpa bukti yang memadai tentang hubungan Saddam, dan Al Qaeda maupun Osama bin Laden, Irak tetap dijadikan target kedua setelah Afganistan. Aksi penyerangan ke Irak pun dilakukan pada pertengahan tahun 2003. Selain sebagai “upaya lanjutan” perburuan Osama bin Laden, serangan itu juga diklaim AS sebagai bentuk *preemptive strike* (serangan pencegahan sebelum diserang) dimana ditujukan untuk melumpuhkan terlebih dahulu potensi ancaman dari Irak (Saddam Hussein dan Al Qaeda) sebelum mereka benar-benar melakukan serangan ke AS. Apalagi menurut AS, rezim Saddam di Irak saat ini sedang mengembangkan persenjataan pemusnah massal (WMD, *Weapon of Mass Destruction*) yang jelas merupakan ancaman nyata bagi usaha perdamaian khususnya di Timur Tengah. Dalam waktu yang relatif singkat pula, rezim Saddam Hussein pun akhirnya ditumbangkan dan Saddam sendiri saat ini berada dalam penahanan AS untuk menunggu proses persidangan.

Hal ini berbeda dengan sikap AS terhadap rezim Saudi Arabia. Seperti diketahui, di negara ini tumbuh dan berkembang organisasi Wahabi, yang *notabene* merupakan salah satu organisasi fundamentalisme Islam terbesar di dunia. Pemikiran-pemikiran organisasi ini banyak dijadikan landasan bagi berbagai kelompok pergerakan Islam di seluruh dunia dan punya hubungan baik dengan kelompok-kelompok tersebut seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaat Al Islami dan sebagainya, bahkan juga dengan Osama bin Laden. Dalam politik dan pemerintahan, organisasi ini juga punya pengaruh yang cukup kuat dan pemerintah Arab Saudi sangat mengakomodasi kepentingan kelompok ini.

Jika berpedoman pada konsepsi awal pembagian dan sikap yang diambil pada tiap kelompok dan negara Islam seperti di atas, maka harusnya Arab Saudi

²⁶ <http://www.rotten.com/library/history/terrorist-organizations/al-qaeda/> akses 9 Juli 2005

merupakan target yang jelas bagi AS untuk memberikan “hukuman”nya, apalagi pemerintahan Arab Saudi tergolong rezim totaliter yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang merupakan ikon bagi AS. Namun dalam kenyataannya, di Arab Saudi, AS tidak menerapkan politik yang agresif sebagaimana pada Irak.

Hal ini jelas lebih ditentukan oleh kepentingan AS dan “kepatuhan” rezim tersebut dalam mengakomodasi kepentingan AS. Seperti diketahui, AS sama-sama punya kepentingan di kedua negara tersebut, baik ekonomi (minyak) maupun politik (hegemoni di Timur Tengah).

Untuk kasus Arab Saudi, sekalipun pemerintahnya “membiarkan” perkembangan fundamentalisme Islam yang diusung oleh Wahabi, tapi secara politis pemerintah Saudi “tunduk” dan akomodatif terhadap kepentingan AS. Jika AS menerapkan politik yang agresif dan akhirnya menggulingkan rezim yang sudah “tunduk” tersebut, jelas akan membawa kerugian bagi AS sendiri karena akan menghilangkan pengaruhnya dan berpotensi memunculkan rezim baru yang belum tentu akan mudah “tunduk” kepada kepentingan AS lagi. Karena jika pemerintahan pro *status quo* sekarang digulingkan dan selanjutnya menimbulkan krisis politik dan kepemimpinan di Arab Saudi, maka dikhawatirkan bisa jadi justru kelompok garis keraslah yang akan meraih tampuk kekuasaan. Maka dari itu, untuk kasus Arab Saudi, AS tidak memiliki kepentingan untuk menggulingkan rezim yang berkuasa sekalipun rezim tersebut bersifat a-demokratis dan di sisi lain juga membiarkan tumbuh dan berkembangnya gerakan fundamentalisme Islam.

Lain halnya dengan kasus Irak. Rezim Saddam di Irak adalah rezim yang mengambil posisi konfrontatif terhadap AS. Saddam termasuk salah seorang pemimpin dunia yang berani menentang AS. Dari sini, penggulingan Saddam merupakan akses tersendiri bagi AS untuk meraih kepentingannya, terutama di Irak. Jadi, AS punya kepentingan untuk menggulingkan rezim di Irak. Isu berhubungan dengan organisasi fundamentalis Islam dan teroris (Al Qaeda), menyembunyikan pelaku terorisme (Osama bin Laden), demokratisasi, dan pemusnahan senjata pemusnah massal, menjadi “senjata” AS untuk melegalkan aksi agresifnya di Irak pada tahun 2003. Hingga kini belum terdapat bukti yang

memadai tentang keterkaitan Saddam Hussein dengan Al Qaeda berikut semua tuduhan lainnya tersebut. Jadi, untuk kasus Irak ini, isu fundamentalisme Islam yang juga dihubungkan dengan isu-isu terorisme dan demokratisasi, lebih difungsikan menjadi semacam “perangkap” AS bagi mereka yang tidak akomodatif terhadap kepentingannya dan selanjutnya menjadi akses tersendiri bagi AS untuk mengambil tindakan “legal” terhadap mereka.

4.1.2. Kepentingan Identitas Nasional

Semua yang dilakukan AS di atas sebenarnya memang tidak lepas dari berbagai kepentingannya. Politik luar negeri yang diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan tindakan tersebut jelas ditujukan untuk mencapai kepentingan. Dalam hal ini tidak hanya kepentingan ekonomi (misalnya minyak) dan politik (hegemoni) yang ingin dicapai terutama dalam kasus Irak dan Afganistan, namun di sisi lain ada pula upaya untuk mempertahankan dan mereproduksi kembali identitas nasional. Hal ini karena politik luar negeri adalah instrumen untuk mereproduksi identitas nasional.

Dalam kasus kelompok Islam moderat dan kelompok Islam fundamentalis, AS berusaha mempertahankan identitasnya sebagai *good power*, terutama di mata kelompok Islam yang moderat. Dengan memberikan bantuan atau “penghargaan” baik kepada ormas Islam moderat dan sementara itu memberlakukan larangan untuk membantu kelompok Islam fundamentalis bahkan yang sebaiknya harus dilakukan adalah memberikan tekanan kuat kepada kelompok ini. Dari sini berarti AS telah melakukan upaya pemisahan tegas antara umat Islam yang moderat dan yang radikal-fundamentalis.

Hal ini sendiri memang ditujukan untuk menjaga hubungan antara AS dengan umat Islam secara keseluruhan dan terutama yang moderat, sementara kepentingannya terhadap kelompok yang dituduh fundamentalis dapat terus dijalankan dan dengan ini pula berarti AS bisa mempertahankan identitasnya sebagai *good power* dan mengantisipasi citra buruknya di mata umat Islam.

Begitu pula dalam kasus Bosnia, dimana AS memberikan bantuan juga dalam rangka usahanya untuk mereproduksi identitas nasionalnya baik sebagai

good power, negara hegemon, maupun sebagai *justice maker*.²⁷ Hal ini karena AS sempat merasa identitasnya tersebut terancam seiring dengan pasifnya AS pada awal-awal konflik Bosnia terjadi. Sikap seperti ini akhirnya mendorong negara sekutunya di Eropa, terutama NATO, untuk mengambil inisiatif sendiri (tanpa menunggu AS). Hal ini bahkan sempat membuat hubungan keduanya menjadi renggang. Tuntutan masyarakat dunia agar AS lebih aktif pun kian menggema dan semakin menyudutkan AS.

Karena itu, AS harus mengambil langkah strategis dengan lebih meningkatkan perannya untuk menyelesaikan konflik di kawasan tersebut baik lewat DK PBB maupun NATO, apalagi menurut pandangan AS sendiri sebenarnya muslim Bosnia adalah muslim yang moderat dan demokratis, sehingga sangat pantaslah untuk diberikan bantuan.

Semua itu ditujukan untuk mereproduksi kembali identitas AS sebagai *good power* dan *justice maker*, dan yang merupakan pelindung bagi dunia. Semua ini bisa diperoleh AS dengan kebijakannya membantu muslim Bosnia tersebut. Selain itu, AS juga dapat mereproduksi kembali identitasnya sebagai negara hegemon dalam hal hubungannya dengan PBB dan sekutunya di Eropa. Dengan mengambil peran signifikan dalam kasus Bosnia ini, AS sekaligus juga bisa mempertahankan hubungan dan pengaruhnya baik atas sekutunya di NATO maupun DK PBB yang sempat bermasalah karena sikap awal AS yang terlalu pasif terhadap kasus ini.

Begitu pula untuk kasus penyerangan ke Afganistan dan Irak pasca tragedi WTC 2001. Isu fundamentalisme Islam dan terorisme sengaja diangkat yang selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan resmi AS, termasuk aksi agresi ke Afganistan dan Irak. Hal ini juga merupakan upaya mereproduksi identitas AS sendiri dalam hal ini identitasnya sebagai *good power* (termasuk negara kampiun demokrasi), *global super power* dengan anggaran belanja dan kekuatan militer yang tidak adaandingannya di dunia, maupun negara hegemon yang begitu dominan dan berpengaruh di seluruh dunia.

²⁷ Khusus tentang konsepsi identitas nasional AS sebagai *justice maker* dikutip dari op. cit Nizar Messari hal. 243

Isu fundamentalisme Islam maupun terorisme yang dikumandangkan AS sebagai sebuah ancaman global tidak lain adalah sebuah instrumen bagi pencapaian kepentingan AS atas identitas nasionalnya. Dengan menggunakan kedua isu tersebut maka setiap kebijakan yang diambil AS yang dimaksudkan sebagai “solusi” atas kedua isu tersebut akan mendapatkan dukungan dunia internasional. Hal ini karena dunia internasional juga turut memandang baik itu fundamentalisme Islam maupun terorisme sebagai ancaman terhadap mereka. Maka mereka akan mendukung setiap “solusi” yang ditujukan untuk mengatasi ancaman terhadap mereka tersebut, termasuk terhadap aksi agresif AS di Afghanistan dan Irak. Dalam proses ini jelas bahwa AS berusaha menggiring dunia dalam sebuah struktur “permainan”nya dan dunia pun akan memandangnya sebagai suatu keharusan ataupun kebenaran. Tentang hal ini sendiri akan penulis lebih jelaskan pada sub bab berikutnya.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa pengelompokan umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan AS terhadapnya dengan pendekatan yang berbeda (mendukung terhadap yang moderat dan menekan yang fundamentalis), tidak hanya merupakan strategi AS dalam rangka menghadapi gerakan fundamentalisme Islam. Lebih jauh sebenarnya hal ini lebih ditujukan untuk kepentingan AS yang lebih besar lagi yaitu, kepentingan atas identitas nasionalnya. Dengan strategi ini, AS bisa mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus yaitu *pertama*, AS bisa menghindari konflik *vis-à-vis* dengan umat Islam secara keseluruhan yang diakibatkan pandangan negatifnya terhadap Islam. Dalam hal ini, AS bisa lebih memfokuskan targetnya yaitu fundamentalisme Islam yang secara jelas dibedakan dengan Islam lain yang moderat. Yang mana selanjutnya akan diberikan ganjaran sebagai “konsekuensi” dari posisi mereka tersebut, bahkan hal ini bisa dilakukan AS dengan dukungan dari umat Islam (moderat) sendiri. Selain itu dengan memberikan bantuan dan dukungan pada mereka yang dinilai moderat dan akomodatif, seperti kasus Bosnia misalnya, akan menjadi sarana bagi AS untuk bisa mereproduksi kembali identitas nasionalnya yaitu sebagai *the good power*. Jadi, AS bisa mempertahankan identitas nasionalnya tanpa harus kehilangan musuh barunya yang tidak lain juga

merupakan instrumen bagi kepentingan identitas nasionalnya. *Kedua*, membantu AS dalam upayanya mempertahankan hegemoni globalnya. Dengan memunculkan fundamentalisme Islam dengan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme sebagai ancaman global baru, maka AS akan mendapatkan legitimasi dan dukungan baik domestik maupun internasional atas berbagai kebijakannya terhadap “ancaman dunia” tersebut, termasuk akan membantu AS misalnya dalam pengembangan persenjataan maupun “perang melawan terorisme”-nya. Bahkan bantuan ataupun dukungan ini bisa didapatkan justru dari kalangan Islam (moderat) sendiri. Labelisasi fundamentalisme Islam sendiri bisa menjadi perangkap AS bagi “musuh-musuh”nya. Dengan memasukkan (melabeli) mereka sebagai fundamentalisme Islam atau yang berhubungan dengannya (fundamentalisme Islam), maka AS akan mudah mengambil tindakan atas mereka, yang tentu saja dengan dukungan internasional. Jika hal ini terjadi, maka selanjutnya akan mendukung kelangsungan hegemoni AS, dan di sisi lain hal ini berarti pula bahwa AS bisa mereproduksi kembali identitasnya sebagai *global super power*, maupun negara hegemon. *Ketiga*, dalam hubungannya dengan dunia Islam, hal ini juga akan memperkuat hegemoni AS khususnya dalam dunia Islam dengan memunculkan disharmoni antara pemeluknya sendiri baik itu antar kelompok Islam, maupun antara pemerintah negara Islam dengan umat Islam. Dengan memecah belah dan menimbulkan hubungan disharmonis antar umat Islam ini sendiri akhirnya akan menjadi akses bagi AS untuk memainkan peran lebih khususnya di dunia Islam itu sendiri.

Dalam kenyataannya, strategi ini tampaknya memang cukup efektif. Umat-umat Islam di negara-negara seperti Mesir, Aljazair, Maroko, Pakistan, Arab Saudi, Turki, maupun Indonesia dan berbagai negara muslim lainnya, telah berhasil “dipecah-belah”. Inilah strategi besar AS dalam merusak Islam dan dengan cara ini pulalah yang akan membantu AS agar bisa semakin mantap menancapkan kuku-kuku hegemoni globalnya di dunia.

4.2 Pencitraan Negatif Terhadap Fundamentalisme Islam

Salah satu langkah atau strategi yang juga diterapkan AS terhadap kelompok fundamentalisme Islam adalah melalui upaya pencitraan negatif. Ini tentunya merupakan bagian dari propaganda AS yang berusaha memunculkan musuh global baru dan di sisi lain juga untuk mempertahankan identitas dirinya sebagai sebuah negara yang baik sekaligus pelindung bagi dunia.

Dalam strategi ini, peranan media massa mutlak diperlukan. Media massa selain berfungsi sebagai penyaji fakta yang akurat, di sisi lain juga berfungsi sebagai alat propaganda dimana dalam hal ini media massa berperan dalam pembentukan, pengembangan, dan pengarahannya opini publik.

Dalam hal ini posisi AS memang menguntungkan. Seperti kita ketahui, AS memiliki penguasaan yang kuat atas media massa. CNN, FOX, NBC, dan sebagainya adalah media massa AS dengan jaringan siaran internasional. Mereka merupakan raksasa dalam dunia pertelevisian dengan jutaan pemirsa di seluruh dunia sebagai konsumennya. Selain itu terdapat juga *New York Times*, *Associated Press*, *Time*, dan *CBS* yang sangat kuat pengaruhnya dalam pemberitaan di media cetak. Edward Said pernah mengungkapkan kelebihan dari media cetak tersebut dalam sebuah bukunya yang berjudul *Covering Islam*. Ia menuliskan bahwa media-media tersebut (*New York Times*, *Associated Press*, *Time*, dan *CBS*) memiliki lebih banyak konsumen, membuat kesan lebih mendalam, memperoleh materi berita yang lebih banyak, dengan wartawan *on the spot* (yang berada di lokasi kejadian) yang lebih banyak dibandingkan media lainnya yang lebih kecil dan lebih miskin. Tulisan-tulisan dari media tersebut punya kredibilitas yang tinggi atas sumber-sumbernya, gengsi institusionalnya, frekuensi pemunculannya, atmosfer keahlian dan pengalamannya. Tidak jarang, tulisan-tulisan dari media-media tersebut selanjutnya akan menjadi materi dasar bagi koran-koran, stasiun televisi, maupun radio-radio untuk suatu topik yang sama untuk kemudian disebarkan kepada konsumen pelanggan mereka.²⁸

Penguasaan media ini tentu saja akan memudahkan AS dalam propagandanya. Dengan menyampaikan berbagai informasi dan opini yang

²⁸ Edward Said. *Covering Islam*. Yogyakarta : Jendela, 2002 hal.76-77

“berpihak” padanya, AS akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi global atas berbagai kebijakannya yang mengatasnamakan perang terhadap terorisme (*war on terrorism*). Hal ini bisa terjadi karena seperti kata Dan Nimmo, bahwa tiap orang ingin memperhatikan atau memiliki ketertarikan terhadap media massa. Hal ini karena, mereka berusaha menambah khasanah pengetahuan (informasi) dan juga bimbingan (opini). Dipandang dari fungsi ini, media massa mendifusikan informasi dan juga mempersuasi.²⁹ Dengan demikian, jika AS memiliki penguasaan atas media massa, maka ia akan memiliki “fasilitas” dalam menyampaikan informasi dan mengembangkan opini yang tentu saja ditujukan untuk mencapai berbagai kepentingan mereka. Dalam kasus ini, AS menyampaikan informasi tentang berbagai keburukan dari fundamentalisme Islam dimana hal ini tentunya juga ditujukan untuk mempersuasi ataupun membentuk opini publik bahwa fundamentalisme Islam adalah sesuatu yang buruk dan merupakan ancaman bagi seluruh dunia. Hal seperti ini pernah diungkapkan oleh John L. Esposito bahwa penguasa dan media massa sangat berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan ketakutan akan ancaman Islam (*islamophobia*) pada masyarakat dan seluruh dunia.³⁰

Fungsi media sebagai instrumen bagi pencitraan buruk terhadap fundamentalisme Islam memang merupakan strategi AS dalam upayanya merusak Islam dan memunculkan dirinya sendiri sebagai sang pahlawan. Media massa AS memang seringkali mendeskriditkan gerakan-gerakan fundamentalisme Islam terutama yang dinilai tidak akomodatif terhadap kepentingan AS. Media massa kemudian turut mencitrakan fundamentalisme Islam dengan ekstrimisme, radikalisme, militansi, dan bahkan terorisme. Hal seperti ini terkadang lebih bersifat propaganda daripada faktual. Seperti diungkapkan Ust. Firman Saladdin, bahwa istilah “fundamentalisme Islam” ataupun “Islam fundamentalis” banyak dilontarkan oleh kalangan pers terhadap pergerakan Islam kontemporer. Penggunaan istilah tersebut di samping bertujuan untuk memberikan gambaran

²⁹ Dan Nimmo. *Komunikasi Politik*. Bandung :Remaja Rosdakarya. 2004 hal.172

³⁰ Adian Husaini. *Paradoks Kebangkitan Islam*. dalam http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/hukum/paradoks_kebangkitan_islam.xhtml akses 1 Juli 2005

negatif terhadap berbagai aktivitas gerakan Islam, juga bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas mereka di mata dunia.³¹

Fundamentalisme Islam juga diidentikkan dengan fundamentalisme Kristen yang pernah tumbuh di AS yang identik pula dengan gerakan anti pengetahuan dan modernisasi, absolutisme dengan menganggap dirinya sendiri sebagai yang paling benar, eksklusivisme dalam artian menutup diri dari realita dunia luar, fanatisme, agresivisme, dan berbagai konotasi negatif lainnya.³² Bahkan oleh seorang pemikir Barat bernama David R. Blank, fundamentalisme Islam dianggap tidak lebih layaknya seperti kafir raksasa (*gigantic heresy*).³³

Hal seperti ini memang disinyalir sebagai upaya Barat khususnya AS dalam terus mempertahankan hegemoni globalnya. Dalam konteks ini AS menggunakan media untuk mendominasi dan memarjinalkan fundamentalisme Islam. Ini berarti memfungsikan media sebagai *Repressive State Apparatuses* (RSAs), dimana media akan berperan represif dalam rangka mengukuhkan ideologi dan pihak yang dominan, sekaligus menjadi sarana pembangun hegemoni.³⁴

Karena itu, pemberitaan-pemberitaan dari media-media massa AS tersebut pada umumnya memang berjalan “pincang” dengan memihak pada kepentingan AS dan mendeskriditkan Islam dan fundamentalisme Islam.

Hubungan antara kepentingan AS dan pencitraan buruk terhadap fundamentalisme Islam ini pernah dijelaskan oleh Azyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul *Pergolakan Politik Islam*. Menurutnya, kepentingan-kepentingan tertentu AS telah menimbulkan pola hubungan ambivalen dalam bentuk “cinta” dan “benci” dalam melihat dunia Islam. Dengan kata lain, jika ada bagian masyarakat Islam yang bertentangan dengan apa-apa yang ada di Barat dan tidak menyangkut kepentingannya (AS), maka Islam haruslah dilukiskan serancu mungkin. Di pihak lain, bila ada masyarakat Islam yang gigih melawan musuh

³¹ op cit Firman Saladdin. hal.3

³² ibid. hal.4

³³ op cit. Ariel Cohen

³⁴ Emma Khotimah. *Analisis Wacana Ideologi Tandingan*. Penerbit tidak diketahui, 2004 hal.21

AS (misalnya mujahidin Afganistan sewaktu melawan Sovyet), haruslah digambarkan dalam potret yang megah, warna-warni, dan cemerlang.

Dengan pola hubungan seperti ini pula, dalam penyajian beritanya pers Barat berusaha menimbulkan ketakutan di kalangan pembacanya tentang adanya ancaman terhadap “kebangkitan Islam”. Pemberitaan yang semacam ini dengan sistematis menggiring masyarakat Barat ke arah terciptanya suatu perasaan takut (*suspence*) terhadap Islam. sehingga akhirnya timbullah kebencian terhadap Islam sekaligus pula diikuti dengan upaya-upaya untuk menghancurkannya.³⁵

Hal yang sederhana bisa kita lihat dimana media massa Barat berusaha memunculkan judul-judul yang memancing ketakutan dan stereotip negatif terhadap Islam.³⁶ Beberapa judul dari pemberitaan media massa Barat tersebut antara lain ; *The Roots of Muslim Rage* (The Atlantis, September 1990), *Iran's Mullah : The Roots Of Terrorism* (San Diego Union Tribune, 2001), *In the lair of the terrorist Hero of radical Islam* (National Post-AP, 2001), *This Is A Religious War, September 11 Was Only The Beginning* (New York Times, 2001) dan *Radical Islam is Rising* (United Press International, 2002)

Selain itu, yang juga paling sering kita lihat adalah sajian berita yang tidak *fair*, pendiskreditan, pemutarbalikan fakta, bahkan sering menjadi tuduhan ataupun fitnah yang kadang tidak berdasar sama sekali. Semuanya jelas ditujukan untuk membangun persepsi yang buruk terhadap gerakan fundamentalisme Islam dan sementara di sisi lain turut mengkonstruksikan citra yang positif terhadap AS maupun Barat.

Sebagai contoh misalnya ketika terjadinya tragedi *Oklahoma Bombing* (1995). Sehari setelah kejadian yang menewaskan sekitar 169 jiwa tersebut, tepatnya tanggal 20 April 1995, media massa AS langsung mengekspos bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah kelompok radikalisme dan fundamentalisme Islam. *New York Times* pada hari itu menyajikan berita dengan mengutip pernyataan seorang anggota kongres AS, Dave McDurdy, yang menyatakan pihak mana yang harus bertanggungjawab atas aksi teror tersebut. Ia mengatakan

³⁵ loc cit. Firman Saladdin

³⁶ op. cit Adian Husaini hal. 184

bahwa, "...very clear evidence of the involvement of 'fundamentalist Islamic Terrorist Groups' ".³⁷ (bukti yang sangat jelas tentang keterlibatan dari kelompok teroris Islam fundamentalis). Dengan pemberitaan seperti ini, *New York Times* berarti juga mendukung sikap dan tindakan AS sebagai respon atas tragedi tersebut. Sebagai langkah lanjut, pemerintah AS kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh-tokoh HAMAS di Palestina begitu pula dengan Al Qaeda dan Osama bin Laden turut pula dijadikan sasaran. Selain itu, AS juga meningkatkan sejumlah aksi militer di Palestina yang mereka klaim sebagai balasan atas kekejaman pemboman tersebut. Meskipun pada penyidikan lebih lanjut, AS akhirnya harus menanggung malu atas tuduhan dan tindakan yang tidak berdasar dan ceroboh tersebut karena pelaku sebenarnya dari tragedi tersebut justru adalah seorang warganya sendiri.³⁸

Hal yang sama juga terjadi pasca tragedi WTC 2001. Media massa AS pun juga langsung mengekspos dan turut menuding fundamentalisme Islam dan terorisme internasional sebagai pelakunya, yang lebih spesifik dituduhkan pada Osama bin Laden dan Al Qaeda-nya. Dalam perkembangan selanjutnya, hal ini juga dihubung-hubungkan dengan rezim Taliban di Afganistan dan Saddam Hussein di Irak. Tanggal 12 September 2001, *Washington Post* menyajikan tulisan yang dengan lantang menyatakan bahwa Islam radikal, tepatnya organisasi Osama bin Laden yang bermarkas di Afganistan, yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan William Taylor, seorang pejabat militer AS, ketika diwawancarai oleh CNN pada tanggal 16 September 2001, ia menyatakan bahwa, "*there is no concrete proof as to who has done this but I think there is a great possibility that militant Muslims are involved in this*".³⁹ (tidak ada bukti konkret kepada siapa pelaku peristiwa ini, tapi aku pikir ada sebuah kemungkinan besar bahwa muslim militan terlibat dalam hal ini). Selain itu, beberapa media massa baik dari AS maupun negara-negara lainnya pun sejak peristiwa tersebut secara "rutin" menyajikan ungkapan terkenal presiden Bush baik itu "*We are Under Attack*" maupun "*We are at War*" yang jelas ditujukan

³⁷ op cit. Emma Khotimah hal. 153

³⁸ ibid.

³⁹ ibid. hal. 152

untuk membentuk opini masyarakat tentang adanya musuh baru yang harus diperangi yaitu terorisme, yang secara tidak langsung diasosiasikan kepada Islam (fundamentalis).

Namun di sisi lain, dalam kasus WTC ini juga tampak jelas provokasi besar-besaran dari media massa AS untuk memperkuat tuduhan pemerintahnya terhadap aktor utama dari peristiwa tersebut. Sebagai contoh adalah ketika CNN pada tanggal 12 September 2001, dengan begitu bersemangatnya menampilkan tayangan pesta sekelompok pemuda Palestina yang diolah sedemikian rupa dan kemudian dihubung-hubungkan dengan tragedi WTC, sehingga yang tampak adalah seolah-olah mereka bersuka cita atas tragedi yang menewaskan ribuan orang tersebut. Sebuah tayangan yang jelas berusaha memberikan pencitraan buruk terhadap umat Islam yang sebenarnya merupakan sebuah tayangan yang diambil pada masa perang teluk I dan berusaha dimunculkan kembali guna memancing emosi rakyat AS atas Islam.⁴⁰ Hal ini juga diperparah dengan *banner* yang selalu ditampilkan oleh CNN yang bertuliskan “*America Under Attack*” sebagai tampilan pertama pasca tragedi WTC. Beberapa hari kemudian CNN menggantinya kembali dengan “*America Is At War*”. Selanjutnya ketika Osama bin Laden dijadikan *primary suspect* (tersangka utama) dan *public enemy no.1*, CNN kembali mengganti *bannernya* dengan “*America's New War*”.⁴¹ Di sini tampak jelas usaha provokatif media massa yang seolah ingin mengajak rakyat AS untuk turut mendukung dan terlibat dalam “perang” baru ini.

Hal di atas memang menunjukkan bagaimana peranan media dalam merusak citra Islam dan fundamentalisme Islam. Namun di sisi lain, hal yang juga sebaliknya terjadi adalah ketika AS yang melakukan teror. Ketika perang teluk I dan II, AS benar-benar meluluhlantakkan Irak. Tidak hanya fasilitas militer, tapi juga sektor-sektor lain yang tidak berhubungan juga turut menjadi korban. Rumah sakit, tempat ibadah, pasar, pabrik makanan, pemukiman penduduk, dan sebagainya adalah sasaran yang jelas-jelas tidak ada sangkut pautnya dengan

⁴⁰ <http://www.umwaelzung.de/wtc-bi.html> akses 1 Juli 2005

⁴¹ loc cit. Emma Khotimah

perang. Namun media massa kemudian bisa memberikan “pemakluman” atas tragedi tersebut misalnya dengan menyatakan telah terjadi *technical error*. Padahal sebelumnya, tidak jarang pula media massa mengungkapkan kecanggihan persenjataan yang dimiliki AS, termasuk dalam hal akurasi terhadap sasaran. Media massa juga tidak jarang menutup-nutupi ataupun menyajikan “sekadarnya” bagaimana aksi-aksi militer yang dilakukan oleh AS.

Sebagai contoh dari hal ini adalah ketika perang Irak berakhir dengan tumbanganya rezim Saddam, banyak media massa begitu bersemangatnya menyajikan berita tentang “sukses”nya AS dalam menegakkan demokrasi dan membatasi pertumbuhan fundamentalisme Islam dan terorisme. Namun media tidak begitu “tertarik” untuk mengupas dampak dari serangan AS tersebut. Sebagai contoh adalah dampak dari kecurangan AS menggunakan *cluster bom* yang tercatat telah menelan ratusan korban jiwa dari penduduk sipil Irak. *Cluster bom* adalah bom dengan ukuran fisik yang cukup kecil (mulai sebesar granat tangan hingga seukuran kaleng minuman ringan) yang jika meledak cukup untuk menghancurkan tank dan jika tidak meledak (*unexploded*) akan menjadi ranjau darat dengan kemampuan untuk meledak sendiri (*self destruct*).⁴² *Cluster bom* adalah sejenis “bom pintar” yang penggunaannya sebenarnya tidak dibenarkan karena berpotensi salah sasaran. Oleh karena itu Amnesty Internasional sempat menyebut penggunaan cluster bom di Irak oleh AS sebagai *a grave violation of international humanitarian law*.⁴³

Namun dalam kenyataannya, pelanggaran oleh AS ini tidak terlalu diungkap oleh media. Oleh sebuah LSM bernama Nexis berdasarkan *database*-nya menyimpulkan bahwa hingga pencarian (*searching*) tanggal 5 Mei 2003, “*there have been no in-depth reports about cluster bombs on ABC, CBS or NBC's nightly news programs since the start of the war*”.⁴⁴ (tidak ada laporan yang

⁴² Paul Watson. *Lack Of Data Slowing Cluster Bombs Clean Up*. dalam <http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/consequences/2003/0427lackof.htm> akses 8 Agustus 2005

⁴³ <http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/media/2003/0506notconcerned.htm> akses 8 Agustus 2005

⁴⁴ *ibid.*



mendalam tentang *cluster bom* pada program-program berita malam ABC, CBS, atau NBC sejak permulaan perang).

Memang beberapa kali berita tentang penggunaan *cluster bom* diulas, tapi tidak dalam porsi yang memadai. Media bahkan lebih sering memberikan dan menyajikan pemakluman atas kesalahan AS tersebut dan menunjukkan bahwa sebenarnya hal itu ditujukan untuk target dan tujuan yang jelas. Misalnya stasiun TV ABC pada segmen *World News Tonight* tanggal 19 April 2003 menyajikan berita tentang cederanya seorang penduduk sipil di Irak akibat menyentuh *cluster bom*. Namun tayangan itu juga seolah mengajak pemirsanya untuk memaklumi situasi tersebut dengan mengatakan, “*That's just the way life is in Iraq right now*”.⁴⁵ (begitulah hidup di Irak pada saat ini).

Hal di atas jelas menunjukkan pemberitaan yang tidak seimbang, dimana di satu sisi begitu provokatif dan cenderung mendiskreditkan Islam (fundamentalis) serta mengumbar berbagai citra negatifnya, sementara di sisi lain lebih berusaha memunculkan citra positif AS, atau setidaknya melakukan upaya “pembelaan” terhadap suatu kesalahan AS yang bisa merusak citra positifnya tersebut. Inilah peran media massa dalam kepentingan propaganda AS dengan berusaha menampilkan dikotomi antara fundamentalisme Islam yang buruk dan AS yang baik.

Kemudian selain melalui pemberitaan media massa, upaya pencitraan negatif terhadap fundamentalisme Islam dan pencitraan positif terhadap AS dan Barat ini juga didukung dalam dunia perfilman AS. Film-film keluaran Hollywood seringkali turut membawakan citra negatif terhadap Islam. Hal ini jelas merupakan upaya untuk memupuk stereotip dan *Islamophobia* bagi masyarakat terhadap Islam. Upaya penetrasi lewat jalur budaya ini memang telah sejak lama dimulai. Sejak film *the Sheikh* (1921), yang masih merupakan film bisu, Islam selalu diidentikkan dengan terorisme dan kekerasan. Islam dicitrakan sebagai golongan haus darah, militan, agresif, licik, dan bahkan maniak seks. Gambaran yang kurang lebih sama juga ditemukan dalam film *Thief of Baghdad* (1924), *Arabian Night* (1942), dan *Son of Ali Baba* (1952). Selain itu, dalam

⁴⁵ *ibid.*

perkembangan selanjutnya, film-film produksi Hollywood juga dipenuhi dengan cerita kepahlawanan dan kemenangan AS melawan terorisme yang dalam hal ini kembali diidentikkan dengan Islam. *Operation Thunderbolt* (1986), *Operation Delta Force* (1986), maupun serial TV seperti *Iron Eagle*, *Airwolf*, maupun *Truelies* adalah beberapa contoh yang menggambarkan cerita tersebut.⁴⁶

Dalam lingkup akademis, sebenarnya sikap para intelektual AS bisa dibagi dua, akomodasionis dan konfrontasionis. Kaum akomodasionis secara umum menolak anggapan bahwa Islam adalah inheren anti Barat dan anti demokrasi. Mereka membedakan antara aksi-aksi politik kaum Islamis dengan kelompok ekstrimis Islam yang minoritas. Mereka juga sering mengkritisi kebijakan pemerintah AS yang cenderung mengambil posisi konfrontatif terhadap Islam. beberapa ahli yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah John Esposito, Noam Chomsky, dan Leon T. Hadar. Sementara itu, kaum konfrontasionis adalah kelompok cendekiawan yang menggolongkan Islam – yakni Islam fundamentalis- seperti kelompok komunis yang anti terhadap demokrasi, anti Barat, dan juga anti Amerika. Mereka yang termasuk kategori ini antara lain Bernard Lewis, Gilles Kepel, Daniel Pipes, William Liddle, maupun Samuel Huntington. Kelompok ini mewaris pemikiran kaum intelektual terdahulu seperti St. John pada abad VII maupun Adel Theodore Khoury pada abad VIII, yang hingga kini selalu menampilkan pemikiran dan citra yang buruk tentang Islam dan khususnya fundamentalisme Islam.

Di Barat dan khususnya AS, pemikiran dari aliran konfrontasionis inilah yang lebih “diminati”. Pemikiran maupun saran dari kelompok ini banyak mempengaruhi kebijakan negara Barat dan AS terhadap Islam. Hal ini juga didukung oleh media massa baik dalam negeri AS sendiri maupun luar negeri yang memang lebih “berminat” untuk menyajikan tulisan-tulisan dari para ilmuwan konfrontasionis ini. Meskipun tulisan-tulisan dari ilmuwan akomodasionis juga tidak jarang ditampilkan.⁴⁷

⁴⁶loc. cit Firman Saladdin

⁴⁷op. cit Adian Husaini hal. 200

Hubungan antara pemikiran para intelektual konfrontasionis, media massa, dan citra yang buruk terhadap Islam serta dampak “*clash*” antara Islam dan AS sebagai konsekuensinya pernah dijelaskan oleh Merlyna Lim dalam tulisannya yang berjudul *Islamic Radicalism and Anti Americanism*. Dalam tulisannya tersebut Merlyna Lim menuliskan bahwa media massa memang memiliki peran tersendiri dalam menimbulkan “*clash*” antara Islam dan AS. Interpretasi, pengembangan, dan pemberitaan media massa sangat menentukan pembentukan opini publik yang dikotomis tersebut. Sebagai contoh misalnya ketika media memberi tanggapan atas pidato Presiden Bush pasca 11 September 2001 ;

*The deliberate and deadly attacks which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror, they were acts of war. This will require our country to unite in steadfast determination and resolve. Freedom and democracy are under attack.... This will be a monumental struggle of good versus evil, but good will prevail.*⁴⁸

(serangan yang disengaja dan mematikan yang dilakukan kemarin pada negara kita adalah lebih dari sekadar aksi teror, itu adalah aksi perang. Hal ini membutuhkan persatuan dalam kebulatan tekad setia. Kebebasan dan demokrasi sedang diserang...ini akan menjadi sebuah perjuangan yang monumental antara kebaikan melawan kejahatan, tapi kebaikan akan menang.)

Penggunaan term *good and evil* yang diikuti “penamaan” kebijakan pasca tragedi WTC sebagai *war on terrorism* adalah suatu pilihan politis yang efektif. Rertorika seperti ini bisa menyatukan negara dibelakang pemerintahan Bush. Namun di sisi lain hal ini juga menimbulkan masalah lain. Hal ini terjadi ketika media massa mencoba memetakan pola pemikiran dan kebijakan Bush tersebut. Namun wacana, kerangka pemikiran, dan informasi yang muncul memperlihatkan bagaimana media AS lebih cenderung menggunakan *mainstream* dikotomis seperti *clash of civilization*-nya Samuel Huntington yang dengan jelas

⁴⁸ Merlyna Lim. *Islamic Radicalism and Anti Americanism : The Role Of Internet*. Washington : East West Center , 2005 hal. 29

mengidentikkan “good” sebagai Barat (AS) dan “evil” sebagai Islam (radikal dan fundamentalis) yang selanjutnya memperkuat dualisme antara Islam radikal, fundamentalis, dan teroris yang buruk dengan AS yang baik.⁴⁹

Dengan dukungan para intelektual dan pemberitaan media massa yang gencar seperti di atas, maka akan memperburuk citra Islam dan menanamkannya secara kuat di masyarakat. Mereka ini sedikit banyak akan mempengaruhi pemikiran dari para pembacanya, mulai dari kalangan awam, akademisi, maupun politisi. Hal ini juga kian diperparah dengan upaya simultan yang juga dilakukan melalui dimensi budaya, sebagai contoh adalah lewat film maupun acara radio dan televisi.

Sejauh ini, upaya propaganda AS ini sudah tampak hasilnya. Citra negatif Islam bahkan *Islamophobia* mulai tersebar di masyarakat dunia. Sementara di sisi lain, AS pun berusaha mengembangkan citra positif dirinya untuk mendapatkan dukungan internasional. Hal ini bisa kita lihat terutama setelah tragedi WTC terjadi dimana AS begitu banyak mendapatkan simpati dan dukungan dunia sebagai “korban” dari aksi terorisme yang *notabene* pelakunya diarahkan pada kelompok fundamentalisme Islam. Sehingga, segala tindakan yang dilakukan AS sebagai respon ataupun balasan terhadap aksi teror tersebut cenderung akan mendapat justifikasi dan bahkan dukungan internasional.

Umat Islam pun akhirnya harus menanggung akibatnya, tidak hanya mereka yang disebut fundamentalis tapi bahkan juga mereka yang lebih “moderat”. Tindakan-tindakan tidak menyenangkan seperti teror, penghinaan, dan perlakuan diskriminatif dan rasis sering dialami yang merupakan akibat dari kecurigaan dan fobia yang berlebihan serta tidak berdasar. Di Amerika, banyak warga Muslim yang mendapatkan perlakuan berlebihan di bandara maupun pelabuhan hanya karena mereka berparas *arabic*, berjilbab, maupun memelihara jenggot. Di Prancis, kontroversi pelarangan Jilbab (maupun simbol-simbol keagamaan lainnya) berakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang anti pemakaian simbol agama pada tahun 2004. Hal ini sendiri merupakan respon pemerintah Prancis terhadap bangkitnya gerakan fundamentalisme agama

⁴⁹ *ibid.* hal. 30

(khususnya Islam).⁵⁰ Di Inggris, hasil survey dari lembaga *Open Society Institute* (OSI) pada tahun 2003-2004, menunjukkan bahwa 30% umat Islam Inggris mengaku tidak puas dengan perhatian dan pelayanan pemerintah Inggris terhadap kehidupan beragama dan pemberitaan media massa yang tidak utuh dalam memotret Islam dan lebih “suka” mengekspos sisi buruk Islam yang diusung segelintir Islam militan yang jelas belum merepresentasikan seluruh umat Islam itu sendiri. Selain itu, tidak kurang dari 80% warga Muslim Inggris mengaku pernah menjadi korban dari *Islamophobia*, diskriminasi, dan kecurigaan yang berlebihan pasca tragedi WTC 2001.⁵¹ Sedangkan di Indonesia, *trial by press* (pengadilan oleh media) memiliki peranan besar dalam menambah peliknya kasus penangkapan Abu Bakar Ba’syir yang dituding merupakan jaringan Jamaah Islamiyah. Media berperan dalam pembunuhan karakter Ba’syir dan pencitraan negatif tentang Islam Indonesia. Hal ini seperti yang dilakukan oleh *MSNBC* pada 8-9 Januari 2002 menyajikan liputan tentang Islam di Indonesia yang “militan, anti AS, dan mendukung teroris Osama bin Laden”. Selain itu, *Washington Post* pada 11 September 2002 juga menyajikan “hubungan antara Al Qaeda, Laskar Jihad, dan Abu Bakar Ba’syir”. Demikian pula dengan pemberitaan *Time*, pada 5 September 2002 yang mengungkap hubungan Umar Al Farouq sebagai pimpinan Al Qaeda di Asia Tenggara dengan Abu Bakar Ba’syir yang terlibat dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia dan percobaan pembunuhan terhadap presiden Megawati. Akibatnya citra Indonesia sebagai “sarang teroris” semakin menjadi-jadi dan sementara itu hubungan antara pemerintah Indonesia dengan umat Islam dan khususnya kelompok atau gerakan Islam menjadi renggang. Apalagi setelah penangkapan dan persidangan kontroversial Ba’syir dengan berbagai tuduhan seperti pelanggaran keimigrasian, perencanaan pemufakatan jahat (187 KUHP), ikut pelaksanaan pemufakatan jahat (110 KUHP), perusakan

⁵⁰ <http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=73> akses pada September 2004

⁵¹ <http://gemapembebasan.or.id/?gema=rubrik&menu=baca&kategori=2&id=277> akses pada 17 Desember 2004

barang dan kepentingan umum (408 KUHP), serta percobaan pembunuhan terhadap presiden.⁵²

Semua hal di atas merupakan dampak yang diterima umat Islam sebagai akibat dari upaya AS melakukan pencitraan negatif terhadap fundamentalisme Islam. Hal yang sebenarnya ditujukan untuk memperkuat citra negatif tentang “musuh” baru AS yang selanjutnya akan digunakan untuk mereproduksi kembali identitas AS misalnya sebagai *the good power*. Jadi, AS memang membutuhkan “fundamentalisme Islam yang jahat” sebagai instrumen bagi AS untuk mengambil tindakan dalam rangka “menumpas kejahatan” tersebut dan mereproduksi kembali identitas nasionalnya sebagai *the good power*.

4.3 Penisbatan Kekerasan (Terorisme) Pada Fundamentalisme Islam

4.3.1 Sekilas Tentang Terorisme

Strategi dan kebijakan terakhir AS terhadap fundamentalisme Islam yang akan penulis bahas di sini adalah penisbatan (penghubungan) kekerasan atau yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan yaitu aksi terorisme, kepada gerakan Islam, terutama yang dinilai beraliran fundamentalis.

Terorisme sendiri sebenarnya bukanlah barang baru lagi. Fenomena terorisme sudah dikenal sejak dulu. Hanya saja, hingga kini belum disepakati suatu definisi yang paling memadai tentang terorisme itu sendiri. Dalam kamus Hubungan Internasional, Jack Plano mendefinisikan terorisme sebagai kegiatan negara atau pelaku non negara yang menggunakan teknik kekerasan dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.....Organisasi terorisme biasanya berusaha untuk memperoleh perhatian media massa dan publik dengan tindakan mereka.⁵³ Sedangkan, menurut *Encyclopedia Britannica* (1999) “*terrorism, the systematic use of terror or unpredictable violence against governments, publics, or individuals to attain a political objective. Terrorism has been used by political organizations with both rightist and leftist objectives, by nationalistic and ethnic*

⁵⁰

⁵³ Jack Plano dan Roy Alton, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal.169

*groups, by revolutionaries, and by the armies and secret police of governments themselves.*⁵⁴ (terrorisme, penggunaan teror secara sistematis atau kekerasan yang tidak dapat diprediksikan terhadap pemerintah, masyarakat umum, ataupun individu untuk mencapai sebuah tujuan politik. Terorisme telah digunakan oleh organisasi sayap kanan maupun kiri, kelompok nasionalis maupun kesukuan, kaum revolusioner, dan oleh tentara maupun polisi rahasia pemerintah.)

Seorang ahli lain bernama Walter Laqueur memandang terorisme sebagai suatu bentuk kekerasan, namun tidaklah semua kekerasan adalah terorisme. Banyak terminologi kekerasan yang masih mengandung konotasi positif (misalnya perang gerilya), sementara terorisme hampir selalu memiliki makna yang negatif. Terorisme sendiri menemui kontradiksi dalam tatanan moral dan fakta sejarah. Terorisme dan segala bentuknya secara moral adalah salah. Namun pengecaman total seperti ini sulit sekali dipertahankan dalam sejarah. Hal ini misalnya ketika para teolog Katolik abad pertengahan menemukan argumentasi yang mendukung pembunuhan terhadap kaum Tiran, dan yang paling mutakhir adalah usaha pembunuhan terhadap Hitler dan Heydrich. Hal tersebut tentunya sulit untuk dapat dicela secara moral.⁵⁵ Hal seperti inilah yang mengakibatkan hingga kini belum ada parameter yang benar-benar bisa diterima tentang terorisme. Namun yang jelas (terutama pada terorisme modern), motif dan kepentingan politis memiliki peranan signifikan dalam setiap aksi terorisme.

Dalam prakteknya, aksi terorisme sudah dikenal sepanjang sejarah umat manusia. Josephus Flavius mencatat bahwa pada tahun 60an, di Yerusalem terdapat kaum ekstrimis Yahudi yang bernama *Sicari*. Kelompok ini sering menyerang penguasa Roma yang waktu itu berkuasa di Palestina. Pada abad XI, di daerah Persia terdapat kelompok bernama *Order Of Assasin* yang dalam bahasa Arab disebut *Hashashiyya*, yang berarti "kelompok pembunuh". Kelompok ini berasal dari sekte Muslim, Ismaili. Mereka sering membunuh kaum Sunni dan juga penguasa Kristen seperti Count Raymond II dan Marquis Conrad.

⁵⁴ Robert Young. *Fundamentalism and Terrorism*. Dalam <http://psychematters.com/papers/young2.htm> akses 9 Juli 2005

⁵⁵ Laqueur, Walter. *New Terrorism*. Yogyakarta : Kreasi Wacana. 2005 hal. 10

Pada abad pertengahan, aksi terorisme mulai meredup dan tidak berlangsung lama. Meskipun pada masa ini, tingkat kekerasan cukup tinggi, terutama masa perang keagamaan.

Sedangkan untuk kasus Cina dan India, memang aksi terorisme ditemukan di sana. Namun pada awalnya, mereka tidak terlalu menekankan pada motif-motif politis. Kaum teroris Thug di India memang banyak melakukan kekerasan dan pembunuhan, tapi semua korbannya dijadikan persembahan kepada Dewi Kali. Kasus ini jelas lebih bermuatan religius. Sedangkan di Cina, aktivitas kekerasan yang terjadi lebih mirip dengan gangster atau mafia daripada kebanyakan teroris modern.⁵⁶

Pada abad XX dan XXI, terminologi dan praktek terorisme mengalami pengerucutan. Motif-motif politik lebih berperan di sini, meskipun pada awalnya gerakan terorisme tersebut berangkat dari berbagai motif dan kepentingan. Religi, ekonomi, kriminalitas, kesukuan, bahkan lingkungan (*ecoterrorism*), semuanya akan bermuara pada tujuan-tujuan politis dalam hal ini adalah bagaimana bisa mengakomodasi aspirasi dan kepentingan mereka si pelaku teror tersebut.

Meskipun terorisme sudah dikenal sejak lama, namun kemunculannya yang paling fenomenal, dramatis, dan juga bombastis mungkin baru setelah terjadinya tragedi WTC 2001. Peristiwa tersebut memang benar-benar mengguncang dunia. Seluruh dunia seakan ikut berduka, bersimpati, namun juga sekaligus panik. Hal seperti ini pernah dilukiskan oleh Noam Chomsky dalam wawancara dengan *The Toronto Star* bahwa kini banyak yang percaya bahwa dunia telah memasuki sebuah zaman yang baru namun juga menakutkan, yaitu zaman terror (*age of terror*).⁵⁷ Namun meskipun demikian, dalam sebuah wawancara lain, Chomsky juga menjelaskan bahwa sebenarnya hal tersebut (tragedi WTC) bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Hal tersebut memang menunjukkan suatu kekejian yang luar biasa, tapi bagi negara-negara yang pernah menjadi korban keganasan politik imperialisme, hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, karena memang seperti itulah perlakuan negara imperialis kepada mereka selama ratusan tahun. Peristiwa WTC memang sesuatu yang bersejarah,

⁵⁶ *ibid.* hal. 11

⁵⁷ Noam Chomsky. Reasons to Fear US. Dalam www.chomsky.info/articles/200330907.htm akses 28 Nopember 2004

namun bukan karena skala dan sifat kekejiannya, tapi karena siapa yang menjadi korbannya.⁵⁷

Hal yang disampaikan Chomsky ini memang ada benarnya. Peristiwa serupa mungkin tidak akan sebegitu fenomenalnya jika tidak terjadi di AS. Banyak peristiwa teror lain yang terjadi di berbagai negara, dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak, dan bahkan turut melibatkan AS di dalamnya. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah terlalu “muncul ke permukaan”, mengingat tidaklah semenarik tragedi WTC ini.

Namun terlepas dari itu, peristiwa ini telah merubah secara signifikan politik luar negeri AS terutama masalah pertahanan dan keamanan. Pasca tragedi tersebut AS langsung mengkampanyekan *War on Terror*-nya. Suatu kampanye global yang mengajak seluruh dunia untuk memerangi aksi-aksi terorisme, terutama terorisme internasional. Terorisme dinilai telah ada di mana-mana dan punya jaringan internasional yang solid, sehingga mereka inilah yang merupakan ancaman baru dunia.

4.3.2. Fundamentalisme Islam Sebagai Teroris Internasional

Berangkat dari tataran konseptual seperti yang dikemukakan oleh Cheryl Benard di awal bab ini, fundamentalisme memang merupakan salah satu aliran dalam agama Islam. Fundamentalisme Islam adalah golongan yang ekstrim, ademokratis, dan identik dengan kekerasan. Dalam hubungannya dengan AS baik secara konseptual maupun kepentingan, golongan ini berada dalam posisi yang bertentangan dengan AS.

Cheryl Benard juga menjelaskan adanya “cabang” dari fundamentalisme Islam ini yaitu skripturalis dan radikal. Fundamentalisme Islam skriptural berusaha untuk kembali ke sumber kebenaran utama dan fundamental dalam Islam yaitu Al Quran dan As Sunnah. Sedangkan fundamentalisme Islam radikal justru menghindari nilai-nilai dasar tersebut, dan secara selektif memilih sumber-sumber dari Al Quran dan Al Hadits yang dianggap mendukung tercapainya

⁵⁷ Chomsky, Noam. *Power and Terror*. Yogyakarta: Ikon. 2003, hal. 3

kepentingan dengan mengatasnamakan Islam. Golongan fundamentalisme Islam radikal inilah yang kini telah menjadi permasalahan internasional baru.

Pasca tragedi WTC 2001 istilah fundamentalisme Islam memang seakan menggema ke seluruh dunia. Suatu kelompok atau aliran atau sekte dalam Islam yang dinilai radikal, ekstrem, literal, dan sekaligus pula militan. Fundamentalisme Islam memang (di)muncul(kan) , namun dalam kesan yang negatif. Hal ini tidak lepas dari tuduhan pemerintah AS bahwa tersangka utama dari peristiwa WTC tersebut adalah Osama bin Laden dan Al Qaeda-nya.

Al Qaeda dan Osama bin Laden memang disebutkan sebagai kelompok Islam fundamentalis dan sekaligus teroris. Berdasarkan konsepsi Cheryl Benard, baik Osama maupun Al Qaeda adalah kelompok fundamentalisme Islam yang radikal. Dalam berbagai aksinya, seringkali mereka berusaha menampilkan legalisasi teologis terhadap aksi-aksi teror yang mereka lakukan dengan meyakinkan publik bahwa aksi teror tersebut adalah sesuai dan dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Aksi-aksi teror yang mereka lakukan seringkali mereka anggap sebagai jalan ke hadirat Allah SWT dan pengorbanan yang mereka lakukan akan diridhoi oleh Allah SWT dan surga sebagai balasannya.

Banyak contoh-contoh kasus dimana pelaku terorisme pasca aksinya dengan lantang selalu memekikkan kalimat “*Allahuakbar*” dan ketika mereka ditangkap dan diproses dalam penyidikan, mereka juga seringkali memberikan dalil-dalil baik dari Al Quran maupun Hadits sebagai dasar pembenaran aksi mereka. Tidak jarang pula mereka dengan bangga mempublikasikannya di depan media massa. Dari sini jelas bahwa mereka berupaya membangun opini publik bahwa yang mereka lakukan (aksi teror) adalah suatu tindakan yang benar berdasarkan Islam. Dengan bahasa lain seringkali mereka merencanakan aksi teror tersebut dengan term *jihad*. Seperti yang dilakukan Abu Musab Al Zarqawi maupun Muqtada Al Sadr dari kelompok gerilyawan perlawanan Irak yang seringkali meneror pasukan koalisi pimpinan AS di Irak, termasuk dengan aksi-aksi bom bunuh diri (*suicide bombing*). Sebagai contoh lain adalah pernyataan kontroversial yang pernah diucapkan Osama bin Laden yang mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani (kemungkinan lebih merujuk pada Israel dan AS)

adalah halal darahnya (untuk dibunuh). Pernyataan seperti ini jelas selain berupaya menabuh genderang peperangan dengan sentimen agama juga berusaha menggiring opini masyarakat untuk menjustifikasi aksi-aksi teror yang mereka lakukan terhadap kepentingan-kepentingan Israel maupun AS.

Untuk memperkuat posisi mereka, kelompok fundamentalisme Islam radikal ini juga menjadikan ayat-ayat Al Quran sebagai pembenaran terhadap aksi-aksi mereka. Meskipun tentu saja ayat-ayat yang dipakai ini (sering disebut sebagai ayat-ayat perang) telah mengalami proses pendistorsian dan pemenggalan. Beberapa ayat Al Quran yang seringkali dianggap sebagai legalisasi dari aksi teror mereka tersebut antara lain ; *“dan berperanglah kamu di jalan Allah pada mereka yang memerangi kamu, tetapi jangan berlebihan”*. (22: 190), *“ketika bulan-bulan suci telah berlalu, bunhlah orang-orang kafir dimanapun kamu menjumpai mereka, dan ambil mereka, ikat mereka, dan tunggulah mereka di setiap tempat penyerangan”*. (9: 5), *“perangilah orang yang tidak percaya Allah dan Hari Akhir, dan tidak melarang apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, tidak juga memegang agama yang benar (bahkan jika mereka adalah) dari Ahli Kitab”*. (9: 29). Ayat-ayat tersebut memang seringkali dijadikan pedoman bagi kaum fundamentalisme Islam radikal untuk mengembangkan teologi kebencian dan intoleransi terhadap mereka yang dianggapnya kafir atau tidak sejalan.

Kemudian baik Osama bin Laden, Al Qaeda, ataupun di kawasan Asia Tenggara kita mengenal adanya Jamaah Islamiah (JI), semuanya bisa tergolong dalam kelompok fundamentalisme Islam radikal yang kini telah menjelma menjadi persoalan keamanan internasional terbaru. Osama bin Laden sendiri memang diketahui memiliki hubungan dekat dengan organisasi-organisasi Islam lain (yang juga ditengarai terlibat dalam banyak aksi terorisme) seperti Kaum fundamentalis Wahabi di Mesir dan juga Ikhwanul Muslimin. Al Qaeda sendiri juga disebutkan sebagai organisasi fundamentalis Sunni yang punya banyak kesamaan dengan kelompok teroris *Order Of Assasin* dalam modus operandi

perjuangannya.⁵⁹ Selain itu, menurut *Jane's Intelligence review*, Al Qaeda adalah organisasi teroris Islam semi independen, dengan cabang tersebar di 26 negara termasuk Aljazair, Maroko, Turki, Mesir, Syria, Uzbekistan, Tajikistan, Burma, Lebanon, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Indonesia, Kenya, Tanzania, Azerbaijan, Dagestan, Uganda, Ethiopia, Tunisia, Bahrain, Yemen, Bosnia dan Tepi Barat serta China. Selain itu ada pula negara lain dimana al Qaeda diketahui punya jaringan operasional termasuk Pakistan, Filipina, Malaysia, AS, Inggris, Prancis dan Kanada.⁶⁰

Baik Al Qaeda maupun Osama bin Laden, keduanya juga pernah dituduh terlibat dalam berbagai aksi teror sebelum WTC 2001 seperti percobaan pemboman kedubes AS di Yaman (1992), pengeboman WTC (1993), pengeboman gedung federal di Oklahoma (1995), pengeboman kedubes AS di Tanzania dan Kenya (1998), maupun pengeboman kapal induk AS, USS Cole di Yaman (2000). Pada publikasi resmi FBI tanggal 12 Oktober 2001 menyebutkan bahwa Al Qaeda dan Osama bin Laden masuk dalam daftar nama teroris (*List Of Individual And Entities*). Selain itu disertakan juga nama-nama lain yang dianggap berhubungan dengan Osama bin Laden dan juga terlibat dalam berbagai aksi teror termasuk tragedi WTC 2001 seperti ; Nawaf Al Hazmi, Mohammed Atta, Khalid Almindhar, Salem Alhazmi, Hani Hanjour, Satam Al Susqami, Abdul Azis Alomari, Wail Al Sheri, Waleed Al Shehri, Mohand Al Shehri, Marwan AlShehhi, Saeed Alghamdi, Ahmed Alghamdi, Hamza Alghamdi, dan Ziad Samir Jarrah. Merekalah yang dituduh terlibat dalam pembajakan pesawat *American Airlines* dan *United Airlines* yang selanjutnya digunakan untuk menabrak gedung WTC. Selain itu, FBI kembali “melengkapi” data tersebut dengan publikasinya pada bulan Nopember 2001 dengan menambahkan nama-nama baru seperti Ahmad Ibrahim, Ahmad Yacoub, dan Mustafa Muhammad Fadhil, yang bersama Osama bin Laden juga dimasukkan dalam *Most Wanted Terrorist List*.⁶¹

⁵⁹ <http://www.rotten.com/library/conspiracy/al-qaeda-and-the-assassins/outreach/> akses 9 Juli 2005

⁶⁰ <http://www.rotten.com/library/history/terrorist-organizations/al-qaeda/> akses 9 Juli 2005

⁶¹ _____, *Jaringan Teroris*. Publikasi Departemen Luar Negeri AS. Jakarta, 2001. hal.14-15

Namun meskipun berbagai tuduhan tersebut telah gencar diberikan, tapi terkadang belum ada bukti yang benar-benar akurat tentang keterlibatan mereka dalam serangkaian aksi teror tersebut. Malahan pada kasus *Oklahoma Bombing*, pemerintah AS akhirnya terpaksa “menjilat ludah sendiri” karena Al Qaeda dan Osama bin Laden yang semula dituduh sebagai pelakunya ternyata tidak terbukti bersalah dalam kasus yang menewaskan sekitar 169 orang tersebut. Pelaku yang sebenarnya justru adalah warga negara AS sendiri, Timothy Mc Veight, seorang ekstrimis ultra kanan.

Munculnya Al Qaeda sebagai organisasi fundamentalisme Islam dan pelaku terorisme internasional memang menjadi citra buruk bagi Islam itu sendiri. Apalagi hal ini juga ditambah dengan kebanyakan nama-nama individu maupun organisasi lainnya yang terdaftar dalam *terrorist list* tersebut yang berkesan *arabic* dan cenderung akan diasosiasikan pada Islam.

Sebagai akibatnya, umat Islam, baik itu yang “fundamentalis” ataupun moderat, sama-sama menanggung dampak negatif dari tragedi WTC dan tuduhan AS terhadap Al Qaeda. Berbagai kebijakan AS terhadap terorisme seringkali berujung pada perlakuan yang represif, diskriminatif dan tidak tepat sasaran. Hal ini jelas akan merugikan bagi umat Islam lain yang sebenarnya tidak memiliki pertalian apapun dengan aksi-aksi terorisme.

Sebagai contoh adalah kebijakan AS untuk memperketat keamanan di bandara maupun pelabuhan. Dalam prakteknya, hal tersebut memang dilaksanakan namun juga disertai dengan tingkat kecurigaan yang tinggi terutama kepada mereka yang berpenampilan *arabic* ataupun *Islamic*. Tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang berlebihan dan tidak menyenangkan dari pihak keamanan seperti pemeriksaan dan pengeledahan barang berkali-kali, serta birokrasi yang sangat ketat dan merepotkan dari pihak keimigrasian.

Bagi sebagian muslim maupun non muslim yang berperawakan atau berpenampilan *arabic*, hal ini jelas tidaklah menyenangkan dan tidak tepat sasaran. Mereka merasa sebagai tumbal dari kebijakan AS dalam melawan terorisme. Belum lagi perlakuan yang mereka terima dari lingkungan tempat

mereka tinggal sebagai akibat kesalahpahaman dalam menginterpretasikan Islam dan terorisme.

Umat Islam di berbagai negara harus menerima perlakuan buruk terutama jika mereka dinilai sebagai fundamentalis dan atau berhubungan dengan organisasi terorisme internasional. *Islamophobia* melanda banyak negara tidak hanya di Amerika, tapi juga Eropa, Asia maupun Australia. Di Inggris, tingkat kecurigaan dan perlakuan diskriminatif terhadap warga muslim meningkat. Di AS, kantor-kantor lembaga muslim dan rumah-rumah penduduk muslim diteror dan bahkan dirusak. Di India terjadi perusakan terhadap mesjid-mesjid. Sedangkan di Australia, terjadi *sweeping* terhadap rumah-rumah penduduk muslim. Hal seperti ini merupakan dampak dari tuduhan AS terhadap fundamentalisme Islam sebagai pelaku tragedi WTC tersebut.

Hal ini sendiri sempat menimbulkan ketegangan antara umat Islam dengan negara-negara tersebut, khususnya AS. Mereka menyesalkan perlakuan dari pemerintah negara-negara tersebut yang kurang bijak dalam memperlakukan mereka sebagai umat Islam, yang jelas berbeda dengan para pelaku teror. Mereka juga mengkritik pemberitaan media massa yang banyak mengekspos sisi buruk dari Islam yang sebenarnya hanya merupakan tindakan dari segelintir 'orang Islam' yang jelas-jelas tidak merepresentasikan Islam itu sendiri. Dan tentu saja, pemberitaan-pemberitaan media yang merugikan itu berimbas pada sikap sebagian masyarakat terhadap kalangan muslim.⁶²

Akibat peristiwa ini, citra AS pun sempat merosot di mata kaum muslimin. Untuk itu, AS harus mengambil langkah-langkah antisipatif karena hal ini jelas tidak menguntungkan bagi AS sendiri. AS harus lebih menegaskan pemisahan antara Islam moderat dan fundamentalis. Untuk itu kemudian dalam berbagai pernyataan resminya, pemerintah AS selalu menunjukkan sikap hormat terhadap Islam sebagai suatu agama yang baik dan di sisi lain juga menyatakan bahwa

⁶² <http://gemapembebasan.or.id/?gema=rubrik&menu=baca&kategori=2&id=277> akses pada Nopember 2004

radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme adalah ancaman bagi semua, termasuk bagi Islam sendiri.

Pemisahan tegas antara Islam dengan fundamentalisme Islam ini merupakan upaya AS untuk menghindarkan diri dari konflik *vis-à-vis* dengan Islam secara keseluruhan. Karena jika konflik ini terjadi, justru akan menyulitkan posisi AS sendiri. Citra AS yang semakin merosot di mata umat Islam tentunya merupakan ancaman bagi identitas AS sendiri sebagai *the good power* maupun sebagai negara hegemon. AS akan “dimusuhi” tidak hanya oleh kelompok fundamentalis, tapi juga oleh Islam yang lebih moderat. Jika citra AS terus merosot, maka ia akan kehilangan pengaruh terutama pada negara-negara Islam yang selama ini banyak yang menjadi sekutunya. Karena itu pemisahan yang tegas antara Islam dan fundamentalisme Islam mutlak dilakukan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Daniel Pipes, bahwa pemisahan tegas antara Islam moderat dan fundamentalis adalah sangat penting, karena akan memudahkan AS untuk menerapkan kebijakan atas keduanya (akomodatif terhadap Islam moderat dan konfrontatif terhadap fundamentalis) dan sekaligus pula membina dan menjaga hubungan baiknya dengan umat Islam non fundamentalis.⁶³ Dengan ini, maka AS bisa terus mempertahankan pengaruhnya di negara-negara dan kelompok Islam moderat dan bahkan bisa mendapat dukungan atas berbagai kebijakannya terhadap kelompok Islam fundamentalis.

Selanjutnya kelompok fundamentalisme Islam ini dituduh melakukan berbagai aksi kekerasan, stereotip negatif terhadap mereka terus ditumbuhkembangkan, apalagi hal ini tambah diperparah dengan pemberitaan dari media massa yang provokatif dan propagandis. Sementara itu, lembaga maupun kelompok Islam yang moderat dan lebih pro Barat terus didukung dan dikembangkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memunculkan *counter* wacana terhadap fundamentalisme Islam, sekaligus pula untuk mengarahkan opini publik agar lebih kompromis terhadap Barat dan bersikap tegas terhadap fundamentalisme. Hal seperti ini bisa kita lihat dalam kasus JIL di Indonesia.

⁶³ op cit. Daniel Pipes

Sikap dan kebijakan AS terhadap golongan fundamentalisme Islam dan terorisme, sebenarnya merupakan bagian dari sebuah proses yang panjang dan dinamis. Tentang Al Qaeda dan Osama bin Laden sendiri, keduanya sebenarnya adalah “sekutu” AS pada masa perang dingin, terutama pada masa invasi Uni Sovyet ke Afganistan pada akhir tahun 1980an. Pada saat itu, keduanya punya kepentingan yang sama, yaitu mengusir Sovyet dari Afganistan. Al Qaeda sendiri adalah organisasi bentukan CIA dan bahkan CIA sendirilah yang melatih Osama dan Al Qaeda menjadi teroris terutama semasa perang dengan Sovyet dengan menyerang fasilitas Sovyet di Afganistan.⁶⁴ Fasilitas seperti pelatihan dan bahkan dukungan dana tersebut terus diterima keduanya selama “hubungan baik” antara AS dengan Osama masih terjalin.

Pasca perang dingin, hubungan antara keduanya mulai renggang dan akhirnya retak pada sekitar tahun 1996. Osama menuding AS terlalu mengintervensi urusan dalam negeri Arab Saudi yang hanya ditujukan untuk kepentingan minyak dan hegemoninya. Selain itu ia juga mengkritik rezim Arab Saudi yang terlalu “menjilat” kepada AS. Akibat dari tindakan “berani”nya ini, Osama dicabut status kewarganegaraannya dan mulai menjadi “musuh” baru AS.

Hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik dimana Osama bin Laden yang sebelumnya merupakan sekutu AS, kemudian malah menjadi musuh yang paling utama. Kepentingan AS jelas memainkan peranan signifikan dalam hal ini. Seperti diketahui, AS memang membantu Osama ketika melawan Sovyet, hal ini jelas tidak terlepas dari kepentingan AS pada masa perang dingin yaitu pembendungan pengaruh Uni Sovyet. Pasca perang dingin, setelah Sovyet runtuh, AS tidak lagi memandang Osama sebagai sekutu. Sikap Osama yang berani menentang AS justru akhirnya menjadikan dirinya sebagai musuh baru bagi AS dengan labelisasi fundamentalisme Islam dan terorisme internasional dengan serangkaian tuduhan atas berbagai peristiwa teror.

Seperti penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa AS membutuhkan musuh baru pasca perang dingin yang salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan anggaran belanja militernya yang turun karena tidak adanya

⁶⁴ Ahmad Dumiyati Bushori. *Osama bin Laden Melawan Amerika*. Bandung : Mizan, 2001 hal. 47

ancaman yang signifikan bagi AS. Lebih jauh, hal ini dibutuhkan pula bagi kelangsungan superioritas dan hegemoni global AS. Dengan munculnya Osama yang dicitrakan sebagai ancaman terhadap AS dengan berbagai aksi terornya, maka AS bisa kembali menaikkan anggaran militernya. Jadi, Osama memang “diciptakan” dan kemudian “dihancurkan” tergantung konteks kepentingan aktual AS. Hal seperti ini digambarkan oleh Prof. Michel Chossudovsky dari Universitas Ottawa ; “sejak era perang dingin, Washington sengaja membantu Osama, meskipun bersamaan dengan itu, menempatkannya dalam daftar orang yang dicarisejak perang Sovyet Afganistan, CIA mendukung terorisme internasional melalui operasi rahasianya.”⁶⁵

Selanjutnya, AS juga merancang strategi besar dengan “memanfaatkan” momentum tragedi WTC yang oleh beberapa pengamat ditengarai sebagai rancangan AS sendiri, dalam hal ini adalah CIA dan FBI. Mohammad Atta, yang dituduh FBI sebagai agen Al Qaeda yang memimpin serangan *kamikaze* 11 September dan yang rekening banknya digunakan untuk membiayai operasi tersebut, sebenarnya adalah agen Intelejen Antar Dinas (ISI) -yang merupakan cabang dari CIA- di Pakistan.⁶⁶ Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Profesor Michel Chossudovsky dari Universitas Ottawa bahwa FBI punya misi untuk membawa terorisme ke AS untuk kemudian melancarkan perang terhadapnya.⁶⁷ Dan yang terpilih untuk “dibawa dan diperangi” tersebut adalah Osama bin Laden beserta Al Qaedanya.

Meskipun belum terdapat bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan Osama bin Laden dan Al Qaeda ataupun siapa dalang sebenarnya dari tragedi WTC tersebut, yang jelas AS sudah melakukan berbagai upaya sebagai respon atas tragedi tersebut.

Pemerintah AS melalui berbagai pernyataan resminya telah berkali-kali menegaskan bahwa organisasi fundamentalisme Islam radikal Al Qaeda dan Osama bin Laden sebagai pelaku teror tersebut. Meskipun dalam berbagai

⁶⁵ www.globalresearch.ca/articles/CH0109E.html dalam Thierry Meyssan. *Bohong Besar Amerika*. Bandung : Jalan Lurus. 2003 hal. 97

⁶⁶ Thierry Meyssan hal. 103

⁶⁷ loc. cit Thierry Meyssan

pernyataan resmi berikutnya -untuk mengantisipasi *clash* dengan umat Islam - pemerintah AS juga mengklarifikasi bahwa tujuan perang terhadap terorisme tersebut tidak ditujukan kepada Islam.

Meskipun demikian dalam perkembangan selanjutnya hal ini merupakan langkah awal propaganda AS dengan menciptakan jebakan kepada mereka yang dianggap sebagai "musuh"nya ke dalam fitnah atas perbuatan yang sebenarnya bisa jadi merupakan rancangan AS sendiri, selain itu AS juga melakukan pengkaitan (*linkage*) terhadap kelompok lain yang juga berseberangan dengan dia untuk turut menjebaknya pula dalam perangkat yang sama.

Tragedi WTC tersebut menjadi momentum bagi AS untuk menyiapkan semacam perangkat besar untuk menjebak setiap musuh-musuhnya. Dalam hal ini perangkat tersebut adalah Al Qaeda yang sebenarnya hingga kini masih belum bisa terbukti keterlibatannya dalam tragedi WTC tersebut.

Mereka yang menjadi musuh AS pun akhirnya dimasukkan dalam perangkat ini. Mereka yang dinilai "berseberangan" dengan AS kemudian dihubungkan dengan Al Qaeda dan terlibat atau mendukung aksi terorisme internasional meskipun tuduhan tersebut seringkali tidak berdasarkan atas bukti yang memadai.

Untuk memperkuat hal ini AS membutuhkan pula dukungan baik domestik maupun internasional karena itu berbagai upaya juga dilakukan AS untuk menghimpun dukungan dan legitimasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka kampanye *perang melawan terorisme*-nya ini.

Pasca tragedi WTC, AS langsung menghubungi berbagai negara sekutunya untuk meminta dukungan terhadap perang melawan terorisme sebagai respon atas tragedi WTC tersebut. Dukungan dan simpati internasional pun mengalir, terutama dari negara sekutu AS di NATO yang juga menyetujui dan mendukung setiap usaha AS sebagai respon atas serangan teror tersebut. Hal ini memang sesuai dengan aturan yang berlaku di NATO (pasal 5 pakta Washington) bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota NATO merupakan serangan bagi seluruh anggota. Oleh karena itu, NATO-lah yang paling mendukung dan siap membantu segala upaya AS memerangi terorisme bahkan ketika Bush

mengumumkan akan memberlakukan aksi militer sebagai balasan terhadap aksi terorisme.

Selain NATO, dukungan juga mengalir dari PBB meskipun hal ini juga tidak lepas dari posisi signifikan AS di organisasi tersebut. AS juga berhasil “menggiring” PBB untuk mengambil sikap terhadap terorisme. Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) pada 12 September 2001 memberlakukan resolusi 1368 yang isinya mewajibkan setiap negara untuk mencegah dan menekan aksi terorisme. Selain itu, beberapa waktu kemudian DK-PBB juga memberlakukan resolusi 1373 yang berisikan tentang pembentukan *Counter Terrorism Council (CTC)* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tiap negara untuk melawan terorisme. Selain itu, resolusi ini juga mengatur tentang larangan bagi tiap negara untuk mendanai setiap aksi terorisme serta wajib pula untuk membekukan semua aset dari kelompok-kelompok teroris.⁶⁸

Di dalam negeri, AS juga melakukan beberapa kebijakan anti terorismenya. Pada Oktober 2001, AS memberlakukan Undang-Undang (UU) *Financial Anti Terrorism* yang berisikan larangan bagi setiap warga AS untuk membiayai aksi terorisme. UU tersebut juga bertujuan untuk mengatur penghimpunan dana sukarela dari masyarakat dalam mendukung upaya perang terhadap terorisme. Kemudian, AS juga membentuk Kantor Keamanan Negara yang berfungsi untuk mengkoordinir usaha-usaha perlindungan agen-agen federal terhadap masyarakat.

Dalam tingkatan legislatif, upaya-upaya pemerintah AS untuk memerangi terorisme mendapat dukungan mayoritas dari anggota kongres. Anggaran militer untuk tahun fiskal (FY) 2002 ditingkatkan sebesar US\$ 335,7 milyar dari tahun 2001 yang “hanya” US\$ 304,1 milyar.⁶⁹ Selain itu, pada rapat kongres pada Jum’at, 14 September 2001, kongres sepakat untuk mengucurkan dana sebesar US\$ 40 milyar sebagai paket darurat penanganan terorisme.⁷⁰

⁶⁸ <http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm> akses pada 8 Agustus 2005

⁶⁹ <http://www.truthandpolitics.org/military-US-world.php> akses pada 3 Juni 2005

⁷⁰ O.C Kaligis. *Terorisme : Tragedi Umat Manusia*. Dikutip dari Ratna Kristina. *Kebijakan Amerika Serikat Dalam Merespon Terorisme Menurut Hukum Internasional*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember, 2004 hal. 78

Selain dari tataran eksekutif dan legislatif, upaya pemerintah AS dalam memerangi terorisme juga didukung oleh mayoritas warga negaranya. Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan majalah *Newsweek* pada tahun 2001 menunjukkan, 71 persen warga AS mendukung upaya pemerintah AS dalam memerangi terorisme, termasuk dengan penggunaan kekuatan militer. Begitu pula, dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh *New York Times* dan *CBS* yang memperlihatkan bahwa 85 persen dari responden menyetujui tentang serangan militer pada pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab atas tragedi tersebut.⁷¹

Hal di atas jelas menunjukkan bahwa AS mendapatkan dukungan baik dari dalam negeri maupun internasional tentang perangnya melawan terorisme. Dengan dukungan dan simpati internasional yang tinggi tersebut, maka semakin “sah” lah upaya AS dalam memerangi terorisme bahkan dengan kekuatan militer. Meskipun oleh beberapa negara penggunaan kekuatan militer masih diragukan efektifitas dan efisiensinya, namun AS tetap melaksanakan politik agresifnya dalam *war on terrorism*-nya tersebut dengan targetnya adalah memburu Osama bin Laden serta “musuh” lainnya yang dinilai berhubungan dengan Osama dan Al Qaeda serta tidak mendukung upaya perang melawan terorisme.

Sebagai korban pertama adalah Afganistan dengan rezim Talibannya yang sebelumnya mereka tuduh telah menyembunyikan Osama bin Laden dan tidak mau bekerjasama dalam rangka memerangi terorisme.

Sebelumnya Taliban memang sudah diperingatkan untuk lebih kooperatif dengan menyerahkan Osama bin Laden. Sebelum tragedi WTC terjadi, Taliban sudah pernah diminta untuk menyerahkan Osama bin Laden terkait dengan kasus pengeboman kedubes AS di Nairobi (Kenya) dan Dar Es Salam (Tanzania) pada tahun 1998. Pada bulan Oktober 1998, DK-PBB memberlakukan resolusi 1267 yang meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden dengan ancaman sanksi berupa embargo ekonomi.⁷² Resolusi DK-PBB tersebut tidak diindahkan oleh Taliban sehingga Afganistan pun mendapatkan sanksi keras dari PBB berupa

⁷¹ Jamaludin Ritonga dan Bien Pasaribu. *Perang Bush Memburu Osama*. Jakarta : Pagar Sinar Sinanti, 2001 hal. 94

⁷² *ibid.* hal 105

embargo ekonomi, pembekuan aset Taliban, melarang penerbangan internasional kepada *Afganistan Ariana Airlines*, serta embargo militer.

Selanjutnya pasca tragedi WTC 2001, Taliban kembali diminta untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada AS, atau jika tidak akan turut dianggap sebagai musuh bagi AS karena melindungi pelaku teror. Hal ini seperti diungkapkan oleh Wakil Presiden Dick Cheney saat diwawancarai oleh *NBC*, ia mengatakan, “mereka dan organisasi lain di seluruh dunia harus memahami, jika mereka memberikan perlindungan kepada kaum teroris, mereka akan menghadapi kemarahan yang amat besar dari AS”. Hal ini juga dipertegas oleh Menlu AS saat itu, Colin Powell, “Taliban saat ini menghadapi dua pilihan yang sangat sederhana; menyerahkan Osama bin Laden atau menghadapi aksi militer besar-besaran AS”.⁷³

Desakan untuk menyerahkan Osama bin Laden juga datang dari PBB. DK-PBB mendesak Taliban untuk mematuhi resolusi DK-PBB dengan menyerahkan Osama bin Laden. Hal ini seperti yang tertulis di pernyataan singkat DK-PBB tentang situasi politik keamanan di Afganistan yang dibacakan oleh Duta Besar Prancis untuk PBB, Jean-David Levitte, pada 18 September 2001. Ia menyatakan, “hanya ada satu pesan yang disampaikan DK-PBB kepada Taliban; melaksanakan resolusi DK-PBB dengan segera dan tanpa syarat”.⁷⁴

Akibat desakan internasional yang begitu kuatnya, Taliban sendiri akhirnya mulai melunak. Mereka akhirnya bersedia menyerahkan Osama bin Laden, namun dengan syarat pemerintah AS menunjukkan bukti-bukti keterlibatan Osama bin Laden dalam aksi teror tersebut. Pemerintah Taliban sendiripun juga menentang aksi teror yang merenggut nyawa ribuan orang pada 11 September 2001 tersebut.

Namun hal ini tidak direspon oleh AS. Mereka tetap menganggap bahwa Taliban tidak kooperatif. Karena itu, pemerintah Taliban tetap harus mendapatkan tindakan tegas. Sikap pemerintah AS ini juga didukung oleh kongres AS. Bahkan pada akhir September 2001 menyetujui pengucuran dana sebesar US\$ 344 milyar

⁷³ *ibid.*

⁷⁴ *ibid.* hal. 106

untuk aksi militer terhadap Afganistan karena menolak menyerahkan Osama bin Laden.⁷⁵

Dukungan internasional juga mengalir, terutama dari sekutu AS di NATO. Pada 9 Oktober 2001, panglima tertinggi NATO di Eropa, Jenderal Joseph Ralston, mengatakan bahwa NATO menyetujui pengerahan lima pesawat AWACS 18 E-3A milik aliansi dari pangkalan di Jerman menuju AS. Bahkan jika dibutuhkan NATO bisa menyediakan tambahan pesawat AWACS lagi ke AS. Selain itu, DK PBB melalui presidennya Richard Ryan, menyatakan bahwa dewan dengan suara bulat mendukung serangan AS atas Taliban.⁷⁶

Dukungan kuat tersebut membuat langkah AS semakin mantap. Selanjutnya, AS juga melakukan upaya tekanan kepada negara-negara lain terutama di perbatasan dengan Afganistan. Salah satu negara tersebut adalah Pakistan yang sebelum pelaksanaan serangan terhadap Afganistan, terlebih dahulu AS memerintahkan pemimpinnya yaitu Jenderal Pervez Musharraf untuk mendukung upaya AS menyerang Afganistan. AS mendesak Pakistan untuk menutup perbatasan sejauh 1400 mil dengan Afganistan untuk menghentikan pemasokan bahan bakar bagi Taliban. Upaya serupa juga diberlakukan di Iran. Dan dengan dukungan domestik dan internasional yang kuat tersebut, AS dan sekutunya memulai serangan ke Afganistan pada 7 Oktober 2001.

Perang pun terjadi dengan skala yang cukup besar dan dengan kekuatan yang sangat tidak sebanding. Namun di sisi lain, hal ini juga berdampak buruk tidak hanya bagi pihak milisi Taliban tapi juga penduduk sipil yang harus turut menjadi korban. Dalam hitungan hingga hari ke-12, serangan AS ke Afganistan telah menewaskan sekitar 900 penduduk sipil, dan melukai ribuan lainnya.⁷⁷ Hal ini sendiri akhirnya memancing protes keras dari masyarakat internasional, bahkan yang sebelumnya turut mendukung serangan AS, yang mendesak agar serangan segera dihentikan karena sangat tidak efektif dan salah sasaran. Namun hal ini tidak terlalu ditanggapi oleh pemerintah AS hingga tumbangny rezim Taliban pada Nopember 2001.

⁷⁵ op. cit Ratna Kristina hal. 68

⁷⁶ op cit. Jamaludin Ritonga hal.

⁷⁷ ibid. hal.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana sikap AS terhadap negara yang dinilainya tidak kooperatif dengan perang melawan terorisme-nya. Afganistan dan Taliban harus menanggung akibat dari sikap mereka yang melindungi Osama bin Laden dan tidak kooperatif sehingga turut dianggap sebagai musuh. Meskipun setelah menghancurkan Afganistan AS tidak juga dapat menemukan Osama bin Laden.

Afganistan memang telah “dihukum” karena dinilai berhubungan dan melindungi Osama bin Laden dan Al Qaeda-nya. Memang terdapat relasi kuat antara Osama dan Taliban dimana keduanya memang merupakan mitra sejak Taliban berkuasa dan Osama diusir dari Arab Saudi pada 1996. Karena itu tuduhan bahwa Taliban berhubungan dengan Osama tidaklah salah.

Namun di sisi lain, isu fundamentalisme Islam dan terorisme Osama bin Laden dan Al Qaeda-nya tidaklah selalu “tepat” penggunaannya. Hal ini bisa kita lihat dari kasus Irak yang menjadi target AS kedua setelah Afganistan. Seperti Taliban di Afganistan, rezim Saddam Hussein di Irak pun juga dituduh berhubungan dengan Osama bin Laden dan Al Qaeda dan turut terlibat dalam berbagai aksi terorisme. Meskipun isu fundamentalisme Islam dan terorisme ini merupakan isu sekunder dibandingkan isu pemusnahan *weapon of mass destruction* (WMD/ senjata pemusnah massal).

Dalam kasus Irak ini, Saddam pun dituduh turut menyembunyikan Osama bin Laden dan punya hubungan khusus dengan Al Qaeda. Hal ini seperti yang diungkapkan presiden Bush pada pidatonya di Dearborn, Michigan, tanggal 14 Oktober 2002; *“This is a man that we know has had connections with al Qaeda. This is a man who, in my judgement, would like to use al Qaeda as a forward army.”*⁷⁸ (inilah orang yang kita ketahui punya hubungan dengan Al Qaeda. Inilah orang yang, dalam penilaianku, akan menggunakan Al Qaeda sebagai tentara.). Hal yang sama juga diucapkan Bush dalam sebuah konferensi pers tanggal 7 November 2002, Bush pada waktu itu mengatakan ; *“Some people say, ‘Oh, we must leave Saddam alone, otherwise, if we did something against him, he might attack us.’ Well, if we don’t do something he might attack us, and he might*

⁷⁸ op cit. <http://www.rotten.com/library/history/terrorist-organizations/al-qaeda/> akses 9 Juli 2005

attack us with a more serious weapon. The man is a threat... He's a threat because he is dealing with al Qaeda... And we're going to deal with him."⁷⁹ (beberapa orang berkata, 'Oh, kita harus meninggalkan Saddam seorang diri, karena, jika kita melakukan sesuatu terhadapnya, dia akan menyerang kita'. Baiklah, jika kita tidak melakukan sesuatu dia mungkin menyerang kita, dan dia mungkin menyerang kita dengan sebuah senjata yang berbahaya. Orang ini adalah ancaman...dia adalah ancaman karena dia berhubungan dengan Al Qaeda....dan kita akan menghadapinya).

Hal ini jelas menggambarkan bahwa AS berusaha mengelompokkan musuh-musuhnya dalam sebuah perangkap dan baru setelah itu AS menghabisi mereka dalam perangkap tersebut. Hal seperti inilah yang "menimpa" Saddam dimana ia turut "dijebak" dengan isu fundamentalisme Islam dan terorisme yang diusung Osama bin Laden dan Al Qaeda. Meskipun pada akhirnya isu ini jadi meredup setelah tidak ditemukan bukti korelasi kuat antara Osama, Al Qaeda dan Saddam Hussein. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan tokoh Al Qaeda yang tertangkap di Irak yakni Abu Zubaydah dan Khalid Sheikh Mohamad mengatakan kepada dinas intel AS *Central Intelligence Agency* (CIA) bahwa, "Organisasi mereka (Al Qaeda) tidak bekerja sama dengan rezim Saddam Husein".⁸⁰

Selanjutnya isu pemusnahan senjata pemusnah massal dan demokratisasi menjadi pilihan yang paling utama dan akhirnya setelah senjata pemusnah massal pun tidak ditemukan, tinggal isu demokratisasi-lah yang menjadi alibi pemerintah AS tentang serangan ke Irak.

Hal ini tentunya ditujukan untuk berbagai kepentingan AS. AS memanfaatkan isu terorisme untuk mencapai berbagai kepentingannya. Dalam kasus Irak misalnya, banyak analis yang menuliskan tentang kepentingan minyak, penjualan senjata, maupun kepentingan politik dalam hal ini mempertahankan peranan dan hegemoninya di kawasan Timur Tengah, sebagai kepentingan AS

⁷⁹ *ibid.*

⁸⁰ Rosihan Anwar. *Terbuka, Tipuan Bush Soal Irak*. Dikutip dari <http://www.korwilpdip.org/17TIPUAN140404.htm> akses pada 14 September 2005

dibalik isu terorisme maupun senjata pemusnah massal yang dijadikan rasionalisasi dari kebijakan AS menginvasi Irak tersebut.

Kemudian sebagai contoh lain misalnya di wilayah Asia Tenggara, AS juga menerapkan strategi serupa dengan menggunakan perangkap yang kita kenal dengan nama Jamaah Islamiyah (JI). JI dinyatakan sebagai organisasi cabang Al Qaeda di kawasan Asia Tenggara dengan daerah operasi meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, kesultanan Brunei dan bagian selatan Filipina, Thailand dan bahkan Kamboja.

Organisasi ini dipimpin oleh Hambali, salah satu orang kepercayaan Osama bin Laden. Organisasi ini ditengarai terlibat dalam berbagai aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara, termasuk kejadian di Indonesia seperti bom Bali, bom Marriot, maupun bom Kuningan.⁸¹

Dengan “instrumen” JI ini, AS bisa melakukan berbagai upaya tekanan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk bersikap kooperatif dengan AS dalam rangka perang melawan terorisme internasional.

Dalam kasus ini, JI dicitrakan sebagai organisasi teroris internasional yang menebar ancaman terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan serangkaian aksi-aksi terornya. JI juga dihubungkan dengan organisasi terorisme internasional lainnya seperti Al Qaeda, bahkan disebut-sebut sebagai cabang organisasi tersebut untuk kawasan Asia Tenggara.

Dalam aksi teror di Indonesia, JI dituduh menjadi tersangka utamanya. Sebagai contoh misalnya seperti “kesepakatan” antara presiden Bush (AS), PM Blair (Inggris), dan PM Howard (Australia) sehari setelah tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 yang mengklaim bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Al Qaeda dengan mitra lokalnya yaitu JI.⁸² Pernyataan resmi para pemimpin negara “korban” ini kemudian juga semakin diperkuat dengan pemberitaan-pemberitaan media massa. Tanggal 14 Oktober 2002, ABC News Online merilis tulisan dengan judul *JI : The Prime Suspect* (JI : Sang Tersangka Utama) yang antara lain menuliskan ; *Australia has named militant Islamic group Jamaah Islamiyah as a*

⁸¹ <http://www.rotten.com/library/history/terrorist-organizations/al-qaeda/> akses 9 Juli 2005

⁸² op. cit. Emma Khotimah hal. 165

*suspect in the Bali terrorist attacks. But until now, very few Australian are likely to have heard of JI or it's leader, Abu Bakar Ba'syir. The Islamic militant group Jamaah Islamiyah (JI) whom Australian named as a suspect in the bombing in Bali, is an Al Qaeda linked group whose alleged leader lives in Indonesia, despite intense international pressure for his arrest.*⁸³ (Australia telah menunjuk kelompok Islam militan Jamaah Islamiyah sebagai tersangka dalam serangan teroris di Bali. Tapi hingga kini, sangat sedikit warga Australia yang pernah mendengar JI ataupun pemimpinnya, Abu Bakar Ba'syir. Kelompok Islam militan Jamaah Islamiyah yang disebutkan sebagai tersangka dalam pengeboman di Bali, adalah sebuah kelompok jaringan Al Qaeda, yang pemimpinnya diduga berada di Indonesia, meskipun kuat tekanan internasional untuk penangkapannya). Selain itu, dari dalam negeri sendiri, media massa juga cenderung turut mentaklidi *mainstream* seperti di atas dengan menyajikan berita-berita mengarahkan opini pembaca ke arah pembenaran atas tuduhan terhadap JI dan Abu Bakar Ba'syir tersebut. Sebagai contoh misalnya Koran Tempo pada 9 Nopember 2002 yang menulis adanya teroris dari Ngruki (tempat asal Abu Bakar Basyir) yang cukup menggentarkan presiden Bush. Atau judul pemberitaan Kompas pada 2 Nopember 2002 dengan judul *Ustad Menanam Dakwah, Ustad Menuai Teror* yang cukup dapat menggiring opini pembacanya meskipun hanya selintas membaca konstruksi judul tersebut⁸⁴

Pemerintah Indonesia sendiri tampaknya juga tidak bisa mengambil sikap dan posisi yang signifikan dalam hal ini, bahkan cenderung mengikuti tekanan dari negara-negara besar "korban" terorisme tersebut (AS dan Australia). Pada Kompas edisi 11 Februari 2003 diberitakan bahwa pemerintah RI memang mengakui belum banyak hal yang bisa dilakukan berkaitan dengan terorisme internasional.⁸⁵ Hal ini tentu memperjelas tentang sikap pemerintah sebelumnya yang turut mengusulkan kepada DK PBB untuk menetapkan status JI sebagai salah satu organisasi teroris internasional. JI sendiri ditetapkan sebagai organisasi teroris internasional pada tanggal 26 Oktober 2002.

⁸³ *ibid.* hal. 167

⁸⁴ *ibid.* hal. 172

⁸⁵ *ibid.* hal. 164

Dengan status barunya ini, jelas menimbulkan dampak negatif langsung terhadap JI. Aktivitasnya di berbagai negara menjadi terganggu seiring dengan tuduhan bahwa mereka adalah pelaku teror dan berhubungan dengan Al Qaeda. Para pemimpin maupun aktivis JI banyak yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara, apalagi pasca teror bom melanda Indonesia, tidak hanya mereka yang benar-benar “orang JI” tapi juga warga biasa yang dinilai berhubungan dengan JI pun turut mengalami nasib serupa. Segala hal yang berhubungan dengan JI seakan menjadi momok yang menakutkan. Hal ini jelas semakin memperkuat stigma bahwa JI adalah organisasi Islam fundamentalis seperti halnya Al Qaeda, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya, termasuk dengan aksi terorisme dan kekerasan.

Pencitraan negatif dan stigmatisasi terhadap JI ini selanjutnya berdampak luas. Banyak kasus lain yang muncul sebagai akibat dari hal ini. Salah satu kasus yang paling fenomenal misalnya kasus Abu Bakar Basyir, *amir* (pemimpin) Majelis Mujahidin Indonesia. Abu Bakar Basyir dituduh sebagai pemimpin JI dan terlibat dalam berbagai aksi teror di Indonesia.

Dalam kasus Ba'syir ini, nuansa politik memang sangat kuat bahkan dibandingkan dengan aspek hukumnya sendiri. Banyak pihak yang meyakini bahwa kasus Abu Bakar Basyir tidak lepas dari intervensi pemerintah AS terhadap Indonesia, seiring dengan kepentingan mereka dalam perang global melawan terorisme. Peranan pemerintah AS memang cukup besar dalam kasus ini. Pemerintah AS berkali-kali melontarkan tuduhan dan tekanan kepada pemerintah RI untuk menghukum Abu Bakar Basyir atas berbagai kasus antara lain; keterlibatan dalam aksi terorisme termasuk berhubungan dengan JI, percobaan makar (pembunuhan) terhadap presiden Megawati, hingga kasus yang lebih “kecil” seperti pelanggaran keimigrasian. Yang selanjutnya jadi permasalahan, meskipun berbagai tuduhan tersebut sangat gencar dilayangkan, namun tidak disertai bukti-bukti yang memadai, hal ini jelas semakin menunjukkan adanya kepentingan politis AS dari kasus tersebut. Bahkan berdasarkan pengakuan Fred Burks, mantan penerjemah dari Deplu dan Presiden AS (era Clinton hingga Bush) dalam persidangan kasus Abu Bakar Basyir tanggal 13 Januari 2005, ketika

pemerintah AS melihat Indonesia gagal “menyelesaikan” kasus Abu Bakar Ba’syir, presiden Bush pada September 2003 pernah mengirimkan utusan khusus kepada presiden Megawati untuk menyerahkan Abu Bakar Basyir pada AS dan selanjutnya akan disidik serta dipersidangkan di sana.⁸⁶ Meskipun hal ini ditolak oleh Megawati pada saat itu karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam skala nasional, terutama sekali dalam hubungan pemerintah dengan umat Islam.

Kini kasus Abu Bakar Basyir masih terus dalam proses persidangan dan berbagai tudingan AS tersebut belum juga bisa dibuktikan, meskipun Abu Bakar Basyir juga sempat dijatuhi hukuman penahanan selama 18 bulan karena “hanya” kasus pelanggaran imigrasi.

Memang kampanye perang terhadap terorisme internasional sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan AS sendiri. AS bisa melakukan rekayasa dan propaganda terhadap aksi terorisme internasional, yang pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingannya sendiri. Dalam kasus fundamentalisme Islam, penisbatan aksi terorisme internasional terhadap mereka adalah bagian dari usaha AS dalam rangka memunculkan musuh baru yang mendapatkan “legitimasi” global.

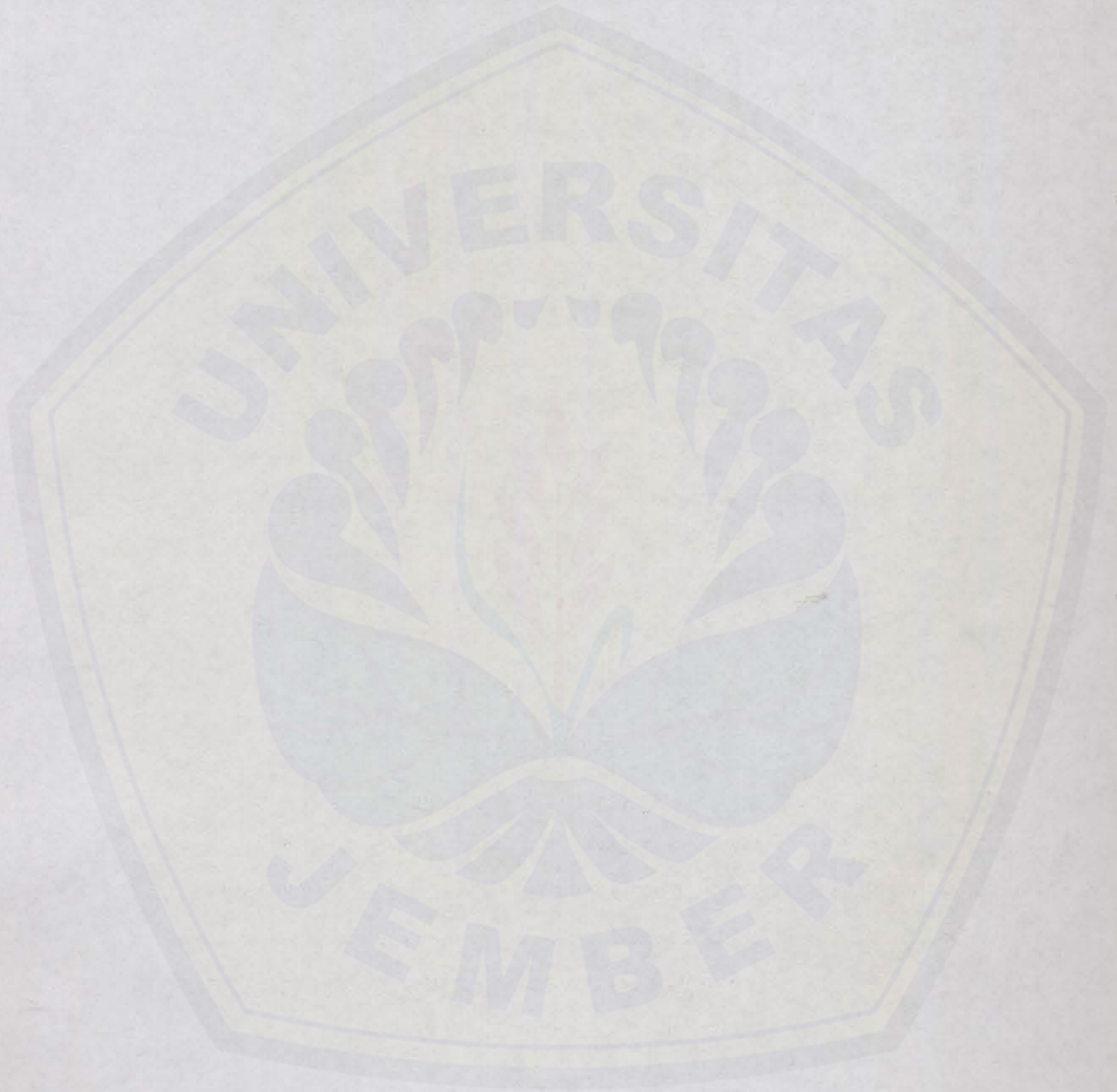
Pasca perang dingin, AS memang membutuhkan musuh sebagai ancaman baru untuk menjaga kestabilan anggaran militernya yang sempat fluktuatif pasca perang dingin. Karena itu, strategi yang harus diambil adalah dengan “memunculkan” adanya musuh baru.

Cara ini terbukti efektif karena secara faktual anggaran belanja militer AS pasca tragedi WTC misalnya, mengalami peningkatan sekitar 24% . AS menjadi negara dengan belanja militer terbesar dunia, dimana jumlah belanja militer AS saat ini, sama dengan jumlah dua puluh lima negara dengan belanja militer terbesar dunia setelah AS.⁸⁷

⁸⁶ http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/berita/islam/baasyir_burks_dan_bush.xhtml 1 akses pada 15 September 2005

⁸⁷ op cit. Thierry Meyssan hal. 145

Hal ini jelas ditujukan untuk kepentingan AS yang lebih besar. Dengan anggaran militer yang sangat fantastis tersebut, kekuatan militer AS jelas tidak ada tandingannya saat ini. Ini berarti pula bahwa AS berhasil mempertahankan identitasnya sebagai *the single super power* dan sekaligus melestarikan kekuatan hegemoni globalnya atas negara-negara lainnya di dunia.



Bab V

Kesimpulan

Fenomena fundamentalisme pada hakikatnya dapat terjadi pada setiap agama manapun di dunia baik itu Islam, Kristen, Hindu, Yahudi, dan sebagainya. Fundamentalisme sebenarnya sama saja dengan berbagai aliran keagamaan lainnya. Ia merupakan salah satu bentuk keyakinan dan interpretasi pemeluk agama terhadap agamanya yang juga terimplementasikan dalam praktek-praktek keagamaan yang ia lakukan sehari-hari berdasarkan keyakinan dan interpretasinya tersebut.

Fundamentalisme memang bisa terdapat pada setiap agama, namun untuk fundamentalisme Islam tampaknya telah menjadi fenomena tersendiri. Fundamentalisme Islam kini telah menjadi salah satu isu internasional yang penting dalam dunia kontemporer, terutama sejak berakhirnya perang dingin. Perkembangannya yang signifikan baik dalam jumlah pengikut maupun perluasan wilayah aktivitasnya dan di sisi lain juga paralel dengan eskalasi aksi terorisme internasional, membuat nama fundamentalisme Islam yang pada awalnya hanya “bermain” di tingkat sosial-budaya dan religius, kini telah menjadi momok yang cukup menakutkan terutama dalam persoalan pertahanan keamanan.

Fundamentalisme Islam memang sering diasosiasikan dengan aksi-aksi terorisme internasional. Nama-nama seperti Al Qaeda, Hamas, Hizbullah, maupun Jamaah Islamiyah, adalah organisasi Islam yang ditengarai menganut paham fundamentalisme dan dalam mencapai tujuannya tidak segan untuk menghalalkan segala cara, termasuk dengan aksi kekerasan dan terorisme. Selain itu, organisasi Islam lain seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin juga dituduh terlibat dalam proses indoktrinasi dan kaderisasi muslim-muslim fundamentalis yang selanjutnya akan “disumbangkan” dalam aksi-aksi terorisme. Posisi dan peranan kelompok fundamentalisme Islam yang seperti ini jelas merupakan ancaman nyata bagi keamanan internasional.

Namun demikian, fenomena munculnya fundamentalisme Islam sebagai sebuah ancaman internasional baru ini tidaklah merupakan hal yang berdiri

sendiri. Dalam hubungan internasional, sebuah struktur ataupun fenomena yang terjadi adalah merupakan hasil dari sebuah proses konstruksi. Begitu juga dengan munculnya fundamentalisme Islam sebagai sebuah ancaman. Ada proses konstruksi dari pihak-pihak yang berkepentingan dari terciptanya konstruksi tersebut.

Proses konstruksi ini ditentukan oleh identitas nasional yang dimiliki suatu negara. Identitas nasional adalah pendefinisian diri suatu negara yang mana selanjutnya akan menentukan pemahaman mereka tentang “diri sendiri” dan “orang lain” serta kepentingan-kepentingan yang akan muncul dari pendefinisian tersebut. Dari sinilah akan tercipta sebuah struktur atau fenomena yang terjadi. Identitas ini mutlak dimiliki oleh suatu bangsa dan akan selalu diproduksi dan direproduksi, serta akan dipertahankan bila mendapat ancaman. Salah satu media dalam proses ini adalah politik luar negeri.

Dalam kasus ini, salah satu pihak yang paling berkepentingan adalah Amerika Serikat (AS). Munculnya fundamentalisme Islam sebagai ancaman adalah sebuah konstruksi yang dibangun oleh AS berdasarkan identitas nasional yang dimilikinya. Hal yang sama juga pernah dilakukan AS terhadap Uni Sovyet dengan memunculkan adanya *Red Menace* (Bahaya Merah).

AS memunculkan fundamentalisme Islam sebagai ancaman tidak lain adalah untuk mereproduksi kembali identitas nasionalnya. AS merasa bahwa dirinya adalah *the good power* (kekuatan baik), maka ia memunculkan musuh yang dipandang sebagai *evil power* (kekuatan jahat). Pasca perang dingin, identitas AS ini memang mengalami krisis karena tidak adanya musuh yang bisa dianggap jahat. AS akan sulit dianggap sebagai kekuatan baik jika tidak ada ancaman dan kekuatan jahat.

Dalam prakteknya, fundamentalisme Islam seringkali diidentikkan dengan aksi terorisme internasional. Karena itu, ketika kampanye perang terhadap terorisme dilancarkan oleh AS, banyak negara yang menyatakan dukungannya, termasuk terhadap aksi agresif AS ke Irak dan Afganistan yang dilakukan dengan dalih memburu organisasi teroris fundamentalis Islam Al Qaeda dan Osama bin Laden sebagai pemimpinnya maupun sebagai serangan untuk menegakkan

pelaksanaan demokrasi di Timur Tengah yang dilakukan dengan menumbangkan rezim otoriter Islam fundamentalis yang sebelumnya berkuasa di kedua negara tersebut.

Dukungan internasional tersebut menyiratkan bahwa dunia internasional percaya akan kapasitas AS sebagai kekuatan baik yang “bertugas” menumpas kekuatan jahat. Artinya di sini bahwa upaya AS dalam mereproduksi identitasnya sebagai kekuatan baik bisa dikatakan mendapatkan hasil.

Selain itu, AS juga memunculkan fundamentalisme Islam sebagai ancaman demi kepentingan identitasnya sebagai *the global super power*. Identitas ini direproduksi kembali karena AS sendiri memang menemui ancaman terhadap superioritasnya di dunia pada masa pasca perang dingin. Untuk itu, dengan memunculkan musuh baru dan dunia tetap memandangnya sebagai *good power* dan pelindung bagi mereka, maka AS akan lebih mudah pula untuk mempertahankan superioritas globalnya tersebut, termasuk dengan pengembangan kekuatan militernya. Aksi-aksi dan pengembangan kekuatan militer yang dilakukan AS akan lebih mudah dijustifikasi jika dunia internasional percaya akan kekuatan baik AS yang bertugas untuk menumpas kekuatan jahat. Jika, pengembangan kekuatan militer AS sudah mendapatkan justifikasi internasional, jelas posisi AS sebagai *the global super power* masih akan terus berlangsung.

Lebih jauh lagi, hal di atas juga dilakukan untuk mereproduksi identitas AS sebagai negara hegemon. Dengan tetap mempertahankan statusnya sebagai *good power* dan *global super power*, maka hegemoni global AS kemungkinan besar masih terus akan berlangsung. Jadi, munculnya fundamentalisme Islam sebagai ancaman adalah sebuah konstruksi yang dilakukan AS dalam rangka mempertahankan identitasnya sebagai negara hegemon global.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Rais, M. Amien. *Politik Internasional Dewasa Ini*. Surabaya : Usaha Nasional, 1989
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Satu Dasawarsa The Clash Of Civilizations*. Jogjakarta : Ar Ruzz Press, 2003
- Al Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Penerbit Arkola, 2001
- Al Barry, M.D.J. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*. Surabaya : Penerbit Indah, 1996
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Jakarta : CV Rajawali Pers., 1990
- Qutub, Sayyid. *Hari Esok Untuk Islam* (terjemahan oleh Djamaludin Kafie). Surabaya : Bina Ilmu, 1982.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam, 2002
- Watt, W. Montgomery. *Islam dan Peradaban Dunia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Hitti, Philip dan M.J. Irawan. *Islam and The West*. Bandung : Sinar Baru, 1984
- Ali, H.M. Daud. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- Indriati, Ety. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : Gramedia, 2002
- Barber, Benjamin R. *Jihad vs Mc World*. Surabaya : Pustaka Prometheus, 2002
- Lewis, Bernard. *The Crisis Of Islam*. Jakarta : Jawa Pos Press, 2004
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993
- Muhammad Asy Syakah, Mustofa. *Islam Tidak Bermazhab*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta : Paramadina, 1996
- Eliot, Thoma: . *Governing America*. New York: Dodd Mead Company, 1962
- Said, Edward W. *Orientalisme*. Bandung, Penerbit Pustaka : 1996

- Armstrong, Karen. *Islam Sejarah Singkat*. Yogyakarta : Jendela, 2003
- Ambarman. *Pakta Warsawa & Comecon*. Bandung : Alumni. 1979
- K. J. Holsti. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. 1988
- An Outline of American History*. United States Information Agency. 1994
- Sihbudi, Riza. *Timur Tengah, Dunia Islam, dan Hegemoni Amerika*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1993
- Linarto, Sugeng dan Basuki Widodo. *Tata Negara*. Malang: Dian Ilmu. 1997
- Jatmika, Sidik. *AS Penghambat Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001
- Husaini, Adian. *Islam Liberal : Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Said, Edward. *Covering Islam*. Yogyakarta : Jendela, 2002
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik*. Bandung :Remaja Rosdakarya. 2004
- Khotimah, Emma. *Analisis Wacana ideologi Tandingan*. Bandung: Penerbit tidak diketahui, 2002
- Plano, Jack dan Roy Alton, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A. Bardin, Jakarta ,1999
- Laqueur, Walter. *New Terrorism*. Yogyakarta : Kreasi Wacana. 2005
- Chomsky, Noam. *Power and Terror*. Yogyakarta: Ikon. 2003
- _____. *Jaringan Teroris*. Publikasi Departemen Luar Negeri AS. Jakarta, 2001
- Bashori, Ahmad Dumyati. *Osama bin Laden Melawan Amerika*. Bandung : Mizan, 2001
- Meyssan, Thierry. *Bohong Besar Amerika*. Bandung : Jalan Lurus. 2003
- Ritonga, Jamaludin dan Bien Pasaribu. *Perang Bush Memburu Osama*. Jakarta : Papar Sinar Sinanti, 2001
- Chomsky, Noam. *Maling Teriak Maling : Amerika Sang Teroris?*. Bandung : Mizan, 2001
- Sihbudi, Riza dkk. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995

- Berger, Peter L. *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*. Yogyakarta : Arruz, 2003
- Imarah, Muhammad. *Barat versus Islam : Kritik Di Balik Hegemoni Wacana Barat Atas Islam*. Yogyakarta : Sajadah Press, 2005
- Abas, Nasir. *Membongkar Jamaah Islamiyah*. Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2005
- Esposito, John L. *Islam Aktual*. Depok : Inisiasi Press, 2005
- Hanafī, Hassan. *Agama, Kekerasan, Dan Islam Kontemporer*. Yogyakarta : Jendela Grafika, 2001
- Hanafī, Hassan. *Islamologi I*. Yogyakarta : LKIS, 2003
- Jainuri, Ahmad dkk. *Terorisme Dan Fundamentalisme Agama*. Malang : Bayumedia Publishing, 2003

Skripsi, Artikel, Makalah dan Jurnal Ilmiah

- Rahmawati, Yanti. *Berlanjutnya Simbolisasi Negara Pembangkang oleh AS terhadap Kuba Pasca Perang Dingin*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember, 2004
- Ali, M. Mufti. *Propaganda AS Dalam Penyerangan Ke Afganistan Pada Tahun 2001*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Jember: Jember, 2004
- Kristina, Ratna. *Kebijakan Amerika Serikat Dalam Merespon Terorisme Menurut Hukum Internasional*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember. 2004
- Asmira, Evin. *Kebijakan Presiden Uzbekistan Islam Karimov Dalam Memerangi Terorisme Internasional Pasca Serangan 11 September 2001*. skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember: 2003
- Warastuti, Y. Windradi. *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap China Masa Pemerintahan W.J. Clinton*. 'Skripsi Ilmu Hubungan

- Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2001.
- Purwanto, Faris. *Keterlibatan AS Dalam Penyelesaian Konflik Bosnia Herzegovina*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2004
- Sari, Ratna. *Propaganda Anti Terorisme Amerika Serikat Melalui VOA Pasca Serangan 11 September 2001*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2004
- Nizar Messari. *Identity and Foreign Policy : The Case of Islam in U.S. Foreign Policy*. Nama jurnal dan penerbit tidak diketahui
- Wendt, Alexander. *Anarchy is What State Make Of It*. Nama jurnal dan tahun tidak diketahui
- Kubalkova, Vendulka. *A Constructivist Primer*. Nama jurnal tidak diketahui, 2001
- James Fearon and Alexander Wendt. *Rationalism v. Constructivism : A Sceptical View*. Dalam *Handbook Of International Relations*. Sage Pub, London, 2002
- Ted Hopf. *The Promise Of Constructivism*. Dalam *International Security*, Vol.23, No.1, 1998
- Robert S. Litwak. *What's in A Name?The Changing Foreign Policy Lexicon*. *Journal Of International Affairs*. Tempat dan Tahun penerbitan tidak diketahui.
- Saladdin, Firman. *Radikalisme, Fundamentalisme Islam, Kata Siapa!* Makalah disampaikan pada *Simposium Regional Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer*. Di Samarinda, 25-27 Nopember 2004
- Mathar, M. Qasim. *Kecenderungan Pemikiran Islam dan Interaksinya Dengan Dunia Luar*. Makalah disampaikan pada *Simposium Regional Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer*. Di Samarinda, 25-27 Nopember 2004

Jurnal Demokrasi dan HAM. *Islam, Radikalisme, dan Demokratisasi*. Vol. 3, No.1, Jakarta : The Habibie Center. Januari – April, 2003

Jurnal Tashwirul Afkar. Edisi no.13 , Jakarta : Lakpesdam NU dan TAF. 2002

Internet

Herdi dan Al Chaidar. *Fundamentalisme Islam*. dalam <http://oposan.itgo.com/kedua.htm> diakses pada September 2004

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/01305/Bentara/661693.htm> diakses pada September 2004

<http://media.isnet.org/islam/Etc/fundamentalisme.html> diakses pada September 2004

Sihbudi, Riza. *Islam, Radikalisme, dan Demokrasi*. Dalam http://www.republika.co.id/ASP/kolom_detail.asp?id=1734188katid=16 diakses pada September 2004

http://www.nayatulislam.net/comments.php?id=306_0_1_0_C diakses pada Desember 2004

Abu Khalid, Ibrahim. *The Green Threat Or Green Saviour?*. Dalam <http://www.islam.org.au/articles/24/cover.htm> diakses pada April 2005

<http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/57.htm> diakses pada 24 Mei 2005

Abdulgani, Ruslan. *Politik Amerika Selaku Penguasa Tunggal*. Dalam http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/siyasah/politik_amerika_selaku_adikuasa_tunggal.xhtml diakses pada 24 Mei 2005

<http://www.truthandpolitics.org/military-US-World.php> akses pada 3 Juni 2005

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/24/sorotan/1578786.htm> diakses pada 8 Juni 2005

Cheryl Benard. *Civil Democratic Islam : Partners, Resources, and Strategies*. Dalam <http://www.rand.org/publications/MR/MR1716> akses pada Mei 2005

- Pipes, Daniel. *There Are No Moderate (Among Islamist)*. Dalam <http://www.danielpipes.org/article/274> akses pada 14 Juni 2005
- Cole, Juan. *Arguing With Bush And Global War On Terrorism*. Dalam <http://www.juancole.com/2005/10/arguing-with-bush-and-gwot-bush.html> akses 24 oktober 2005
- Sullivan, Andrew. *This Is Religious War, September 11 only The Beginning*. Dalam <http://www.andrewsullivan.com/print.php?artnum=20011007> akses 18 Oktober 2005
- <http://archives.cnn.com/2001/COMMUNITY/10/09/rec.kinzer.cnn/> akses 24 Oktober 2005
- Abdurrahman, Yahya. *Hizbut Tahrir Menjawab Tuduhan Miring*. Dalam redaksi@hayatulislam.net. Koneksi via mi-lis akses 3 Maret 2005
- Cohen, Ariel. *Radical Islam and US Interest in Central Asia*. <http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/Test102903.cfm> akses pada 27 Juni 2005
- Muslimov, Ulugbov. *Uzbek Prisons After Visit Of International Committee Of Red Cross : Report Fo Hizbut Tahrir Prisons*. Dalam http://www.muslimuzbekistan.com/eng/ennews/2004/02/ennews07022004_g.html akses pada 12 Oktober 2005
- Syuhud, A. Fatih. *Amerika Serikat dan Islam Liberal*. <http://aneka-media.blogspot.com/> akses 27 Juli 2005
- <http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm> akses 8 agustus 2005
- http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1499&Itemid=1 akses 27 Juli 2005
- <http://home.wanadoo.nl/tcc/un/scr/r0836.html> akses pada 31 Juli 2005
- <http://www.rotten.com/library/history/terrorist-organizations/al-qaeda/> akses 9 Juli 2005
- Adian Husaini. *Paradoks Kebangkitan Islam*. dalam http://arnisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/hukum/paradoks_kebangkitan_islam.xhtml akses 1 Juli 2005

<http://www.unwaelzung.de/wtc-bi.html> akses 1 Juli 2005

Watson, Paul. *Lack Of Data Slowing Cluster Bombs Clean Up*. dalam <http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/consequences/2003/0427lackof.htm> akses 8 Agustus 2005

<http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=73> akses pada September 2004

<http://gemapembebasan.or.id/?gema=rubrik&menu=baca&kategori=2&id=277> akses pada 17 Desember 2004

Young, Robert. *Fundamentalism and Terrorism*. Dalam <http://psychematters.com/papers/young2.htm> akses 9 Juli 2005

Chomsky, Noam. *Reasons to Fear US*. Dalam www.chomsky.info/articles/?00330907.htm akses 28 Nopember 2004

<http://www.rotten.com/library/conspiracy/al-qaeda-and-the-assassins/outreach/> akses 9 Juli 2005

<http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm> akses pada 8 Agustus 2005

http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/berita/islam/baasyir_burks_dan_bush.xhtmll_1 akses pada 15 September 2005

Lampiran 1

U.S.-Designated Foreign Terrorist Organizations¹

Name and base of operations	Description	Goals and targets	Est.strength	Year founded	Activities
Abu Nidal Organization (ANO) a.k.a. Fatah; Iraq	Transnational organization, composed of functional committees	Targets U.S., UK, France, Israel, moderate Palestinians, the PLO, Arab countries	A few hundred	1974	Attacks in 20 countries, killing or injuring 900. Leader Abu Nidal died in 2002
Abu Sayyaf Group; Philippines, Malaysia	Separatist group composed of several semiautonomous factions	Aims to create Islamic state in Philippines; profit-driven terror	200-500	1991	Kidnappings, bombings, assassinations, and extortion
Al-Aqsa Martyrs Brigade; West Bank, Gaza Strip, Israel	Small cells of Fatah-affiliated activists	Aims to drive out Israelis and to establish a Palestinian state	Unknown	2000	Shootings, suicide operations (first Palestinian female suicide bombing)
Ansar al-Islam (AI); Iraqi Kurds and Arabs	Iraqi Kurds and Arabs	Aims to create an Islamic state in Iraq; allied with al-Qaeda	500-1,000	2001	Ambushes and attacks
Armed Islamic Group (GIA); Algeria	Islamic extremists	Aims to replace Algerian regime with an Islamic state	Less than 100	1992	Massacred thousands of civilians, targeted foreigners
Asbat al-Ansar; Lebanon	Sunni extremist group associated	Aims to create	300	1990s	Assassinations, bombings of

	with Osama bin Laden	Islamic state, opposes peace with Israel			Western targets, failed coup
Aum Shinrikyo (Aum); Japan, Russia	Cult established by Shoko Asahara	Claims U.S. will start WWII with Japan, beginning Armageddon	1,950	1987	Chemical attacks on Tokyo subways, no recent activity
Basque Fatherland and Liberty (ETA); Spain, France	Established to create an independent Basque homeland	Targets Spanish and French government interests, tourists	Unknown	1959	Since 1960, more than 850 killed, hundreds injured
Communist Party of the Philippines/New People's Army (CPP/NPA); Philippines	CPP's military wing that aims to overthrow the government through guerrilla warfare	Targets Philippine security forces, politicians, judges, government informers, NPA rebels	Less than 9,000	1969	Assassinations, murders, attacks on U.S. personnel and interests
Continuity Irish Republican Army (CIRA); Northern Ireland, Irish Republic	Splinter group, also called Continuity Army Council and Republican Sinn Fein.	Targets British military, Northern Ireland security forces, Loyalist paramilitary groups.	Less than 50	1990s	Bombings, assassinations, kidnappings, hijackings, extortion, robberies
Gama'a al-Islamiyya (Islamic Group); Egypt	Egypt's largest militant group now split into two factions, one calling for cease-fire.	Aims to replace Egypt's government with an Islamic state	Unknown	1973	1993 World Trade Center bombings, attacks on tourists
HAMAS (Islamic Resistance)	Ouigrowth of the Palestinian branch of the	Aims to replace Israel with	Unknown	1987	Large-scale suicide bombings and

Movement); West Bank, Gaza Strip, Israel	Muslim Brotherhood	Palestinian Islamic state using political and violent means			attacks against Israelis and Palestinian collaborators
Harakat ul-Mujahidin (HUM); Pakistan	Islamic militant group aligned with the radical JUI-F faction	Targets Indian troops, Kashmiri civilians, and Western interests	Several hundred	1985	Linked to al-Qaeda, hijacked Indian airliner in 1999
Hezbollah (Party of God); Lebanon, worldwide cells	A radical Shi'ite group with aims for the creation of Iranian-style Islamic republic	Dedicated to eliminating Israel, is anti-U.S. and anti-Israel	A few hundred	1982	Suicide bombings, hijacked 1985 TWA Flight 847
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU); South Asia, Tajikistan, Iran	Islamic militants opposed to Uzbekistani President Islam Karimov's secular regime	Aims to remove Karimov, establish an Islamic state, and to fight anti-Islamic opponents	Less than 500	1991	Car bombs, taking foreign hostages, most active in Kyrgyzstan and Tajikistan
Jaish-e-Mohammed (JEM) (Army of Mohammed); Pakistan	Islamic extremist group formed after Masood Azhar's release from prison.	Aims to unite Kashmir with Pakistan, targets Indian government and political leaders	Several hundred	2000	Murder of U.S. journalist, Indian Parliament bombing, anti-Christian attacks
Jemaah Islamiya organization (JI); cells span Southeast Asia	Southeast Asian network aims to create an idealized Islamic state	Plotted against tourist spots, U.S., Israeli, British, and Australia 1 diplomatic buildings	Unknown	1990s	Bombings in Indonesia and Philippines
Al-Jihad (AJ); Cairo, Egypt, Yemen,	Egyptian Islamic extremists, merged with al-	Aims to replace the Egyptian	Several hundred	1970s	Attacks on Egyptian government

Afghanistan, Pakistan, Lebanon, UK	Qaeda in 2001	government with Islamic state, attack U.S., Israeli interests			personnel, assassinated Anwar Sadat
Kahane Chai (Kach); Israel, West Bank	Jewish extremist group aims to restore the biblical state of Israel	Organizes protests against the Israeli Government	Unknown	1994	Threats made to Arabs, Palestinians, and Israeli officials
Kongra-Gel (KGK), a.k.a. Kurdistan Workers' Party (PKK) and KADEK; Turkey, Europe, Middle East	Marxist-Leninist insurgent group aims to create a democratic Kurdish state	Targets Turkish security forces, officials, and villagers who oppose organization	4,000-5,000	1974	Attacked diplomatic and commercial facilities, bombed tourist sites
Lashkar-e-Tayyiba (LT) (Army of the Righteous); Pakistan	Armed wing of a Pakistan-based Sunni anti-U.S. missionary group	Targets Indian troops and civilians in Kashmir	several thousand	1989	Attacks on border security forces and Indian Parliament
Lashkar i Jhangvi (LJ); Pakistan, Afghanistan	A Sunni sectarian radical group banned in Pakistan in 2001	Anti-Shi'ite group aims to create a Muslim state in Pakistan.	less than 100	1996	Armed attacks, bombings, attempted assassinations
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE); Sri Lanka	Most powerful Tamil group in Sri Lanka aims to create a Tamil state	Targets key personnel, senior political and military leaders	8,000-10,000	1976	Assassinations, suicide bombers: "The Black Tigers"
Libyan Islamic Fighting Group (LIFG); Libya, United Kingdom, other countries	Libyans who had fought against Soviet forces in Afghanistan and the Qaddafi regime in Libya.	Pledged to overthrow un-Islamic government of Libyan president Muammar al-Qaddafi.	several hundred	1990s	Suicide bombings, assassination attempt against Qaddafi, clashes with Libyan security forces
Mujahedin-e	Marxist-Islamic	Largest	Over 3,000	1960s	Assassinations,

Khalq Organization (MEK); Iraq	group expelled from Iran receiving Iraqi support	armed Iranian opposition to the present government, advocates a secular Iranian regime			terrorist bombings, foreign military- aided assaults, large-scale overseas attacks
National Liberation Army (ELN); Colombia, Venezuela	Marxist insurgent group inspired by Fidel Castro and Che Guevara	Targets foreign employees from large corporations	3,000	1965	Kidnapping, hijacking, bombing, and extortion
Palestine Islamic Jihad (PIJ); Israel, West Bank, Gaza Strip	Militant Palestinians committed to destroying Israel through holy war	Targets Israeli military and civilians, opposes secularism	Unknown	1970s	Suicide bombings, attacks on Israeli interests
Palestine Liberation Front (PLF); Iraq	Broke away from PFLP-GC and split into pro-PLO, -Syrian, and -Libyan factions	Known for aerial attacks against Israel	Unknown	1970s	Attacked Italian ship <i>Achille Lauro</i> , murdered a U.S. citizen
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP); Syria, Lebanon, Israel, West Bank, Gaza Strip	Marxist-Leninist group that broke away from the Arab Nationalist Movement	Targets Israel's "illegal occupation" of Palestine and opposes negotiations with Israel	Unknown	1967	International terrorist acts in the 1970s, attacks against Israel and moderate Arab targets since 1978
Popular Front for the Liberation of Palestine- General Command (PFLP-GC); Syria	Split from the PFLP to focus on fighting, opposes Arafat's PLO	Attacks in Europe and the Middle East. Targets Israel, West Bank, and Gaza Strip	several hundred	1968	Unusual attacks: hot air balloons, hang gliders, Lebanese guerrilla operations
Al-Qaeda; Afghanistan	Osama bin Laden's network	Targets "non-	several thousand	1980s	Bombings of embassies and

until 2001, Southeast Asia, Middle East, worldwide cells	of Arabs who fought against the Soviet Union. Goal to establish a worldwide pan-Islamic Caliphate	Islamic” regimes and U.S. citizens			<i>USS Cole</i> ; September 11, 2001, U.S. attacks
Real IRA; Northern Ireland, UK, Irish Republic	Armed wing of the 32-County Sovereignty Movement to unify Ireland	Targets civilians, military, police, and Protestant communities	less than 100	1998	Bombings, assassinations, robberies.
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC); Colombia	Oldest and most-capable Marxist insurgency with ties to narcotics trafficking	Targets Colombian political, military, and economic interests, also foreign citizens	9,000–12,000	1964	Bombings, mortar attacks, kidnappings, extortion, guerrilla warfare, and drug trafficking
Revolutionary Nuclei (formerly ELA); Athens, Greece	Emerged from antiestablishment and anti-U.S./NATO/EU leftist groups	Targets U.S. and European interests and government buildings in Greece	Believed small	1995	Arson attacks, low-level bombings, usually striking in early-morning hours
Revolutionary Organization 17 November; Athens, Greece	Radical leftist group named for student uprising in 1973	Seeks removal of U.S. bases, Turkish military, and the severing of NATO and EU ties	Believed small	1975	Assassinations, bombings, improvised rocket attacks, supported by bank robberies
Revolutionary People's Liberation Army/Front (DHKP-C); Turkey	Marxist-Leninist group: “Party” refers to its political activities, “Front” refers to its militant	Anti-U.S., anti-NATO, and anti-Turkish establishment group	Unknown	1978	Attacks on U.S. interests, suicide bombings

	operations				
Salafist Group for Call and Combat (GSPC); Algeria	Outgrowth of GIA and the most effective armed group in Algeria	Military and government targets, pledges to avoid civilians	Several hundred	1992	Attacks military, police, and government convoys
Shining Path (Sendero Luminoso, SL); Peru	Based on Maoist teachings, aims to destroy Peruvian institutions	Aims to build communist regime, targets political enemies	300	1960s	30,000 dead, assassinations, bombings, villiage raids
Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR) a.k.a. Al-Zarqawi Network and Al-Qaeda in Iraq; Iraq	Established soon after start of Operation Iraqi Freedom to bring together jihadists and other insurgents; merged with al-Qaeda	Aims to expel Coalition forces and establish Islamic state in Iraq, then move to Syria, Lebanon, Israel, and Jordan	unknown	2003	Many bombings, killing hundreds; assassination of key Iraqi political figures; beheadings of Americans
United Self-Defense Forces of Colombia (AUC); Colombia	Umbrella organization that consolidates paramilitary groups	Targets "insurgents" from FARC and ELN	8,000–11,000	1997	Assassinations, guerrilla warfare, and drug trafficking

1. As of April 2005, the U.S. State Department has designated these groups as Foreign Terrorist Organizations (FTOs).

Source: U.S. Department of State, Office of Counterterrorism, Center for Defense Information, Terrorism Project.

Information Please® Database, © 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

<http://www.infoplease.com/ipa/A0908746.html> akses 15 juli 2005

Lampiran 2

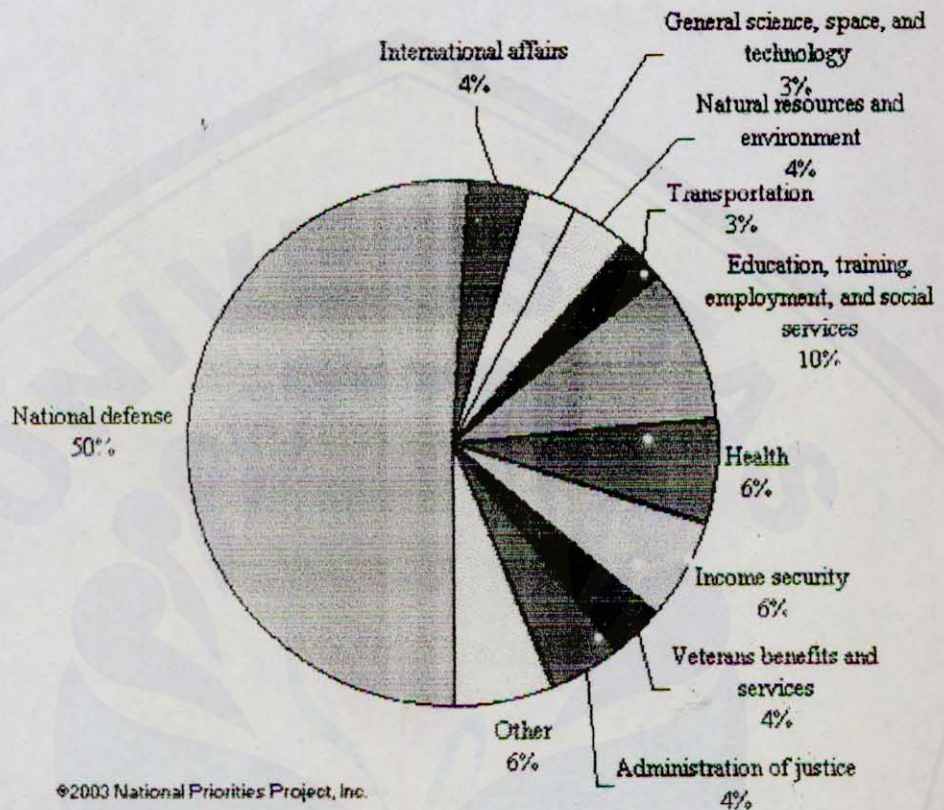
U.S. National Defense Budget (\$ billions)			
	FY 2001	FY 2002	FY 2003
DOD	\$309.9 billion	\$329.9 billion	\$378.6 billion
DOE/other related budgets	\$16.05 billion	\$17.73 billion	\$18.18 billion
Total National Defense (050)	\$329.0 billion	\$350.7 billion	\$396.8 billion
Emergency Supplemental Spending Bills	Public Law 107-38 ¹ \$20 billion total → \$13.8 billion went to DOD	Public Law 107-117 ² \$20 billion total → \$3.4 billion went to DOD	
		Public Law 107-206 ³ \$28.9 billion total → \$14.4 billion went to DOD	

Budget Authority By Function (\$ billions)

	FY 01	FY 02	FY 03	FY 04	FY 05	FY 06	FY 07
National Defense	\$329.0	\$350.7	\$396.8	\$405.6	\$426.6	\$447.7	\$469.8
International Affairs	\$18.7	\$22.3	\$23.9	\$24.8	\$25.6	\$26.3	27.2

<http://www.dtic.mil/comptroller/fy2003budget/FY03GBpdf.pdf>

Pie Chart Prosentase Anggaran Pemerintahan Bush FY 2002 Pasca WTC 2001



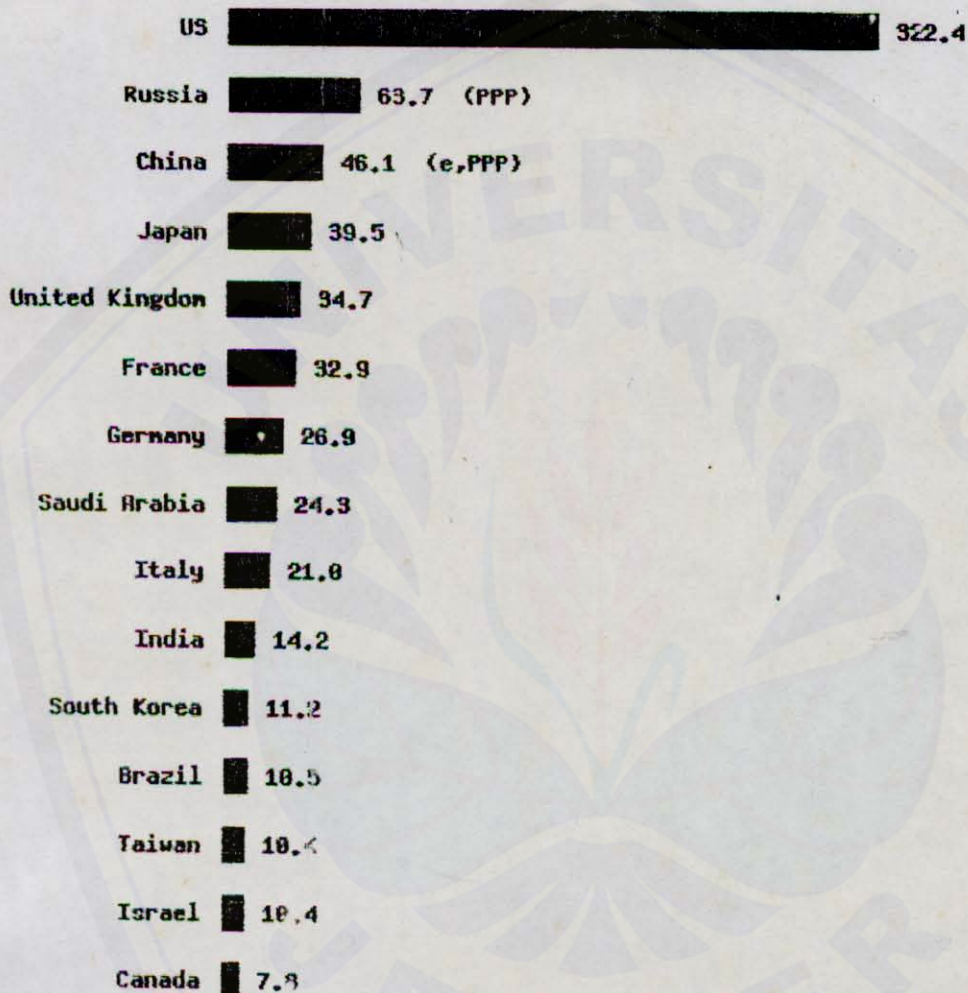
<http://borgenproject.org/images/DiscFY2004Pie.gif>



Lampiran III

Chart 7: Top 15 nations, as ranked by military spending in 2001 (data from IISS's "The Military Balance, 2002—2003

The Military Balance" is an annual publication of IISS (the International Institute for Strategic Studies).



Sumber : <http://www.truthandpolitics.org/military-US-World.php> akses pada 3 Juni 2005